

DINAMIKA KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESA WISATA

Studi Kasus Desa Wisata Kampung Pisang Trepan

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018-2022

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik



Disusun oleh:

Rif'an Amirudin (2006016094)

Program Studi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Rif'an Amirudin
NIM : 2006016094
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Dinamika Kerja Sama Pengembangan Desa Wisata : Studi Kasus Desa Wisata Kampung Pisang Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018-2022

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 April 2024
Pembimbing,



Masrohatun, M.Si.

NIP: 198806212018012001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DINAMIKA KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESA WISATA
Studi Kasus Desa Wisata Kampung Pisang Trepan Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan Periode Tahun 2018-2022

Disusun Oleh :
Rif'an Amirudin
NIM. 200601604

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 6 Mei 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

Sekretaris Sidang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. Nur Syamsudin M.A.', written in a cursive style.

Drs. Nur Syamsudin M.A.
NIP:196805051995031002

Penguji Utama

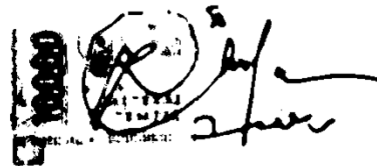
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuqlir Bariklana, M.Si.', written in a cursive style.

Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Dinamika Kerja Sama Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Kampung Pisang Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Periode 2018-2022” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2024

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UIN WALISONGO SEMARANG' and 'KEMAHASISWAAN'.

Rif'an Amirudin

NIM.2006016094

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Swt atas rahmat dan karuniannya .Serta limpahan kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul sebagai berikut: “DINAMIKA KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESA WISATA : Studi Kasus Desa Wisata Kampung Pisang Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018-2022”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai persyaratan guna memenuhi Ujian Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari meskipun dalam terlaksananya penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta dijalankan dalam penelitian lapangan, namun penulis merasa bahwa Laporan Tugas Akhir Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis, baik berupa saran, bimbingan, maupun dengan semangat selama terlaksananya penelitian lapangan hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Nuqlir Bariklana M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik dan dosen wali yang telah memberikan dukungan, motivasi dan arahannya kepada penulis
4. Ibu Masrohatun M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih atas waktunya, arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir;
5. Segenap jajaran dosen dan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Shobqi dan Ibu Darti Ningsih dan juga adik-adik penulis Zukrifi Laila dan Febriyanti Ayu yang telah memberikan semangat hidup, motivasi belajar dan mencurahkan segala doannya untuk membantu lancarnya penulisan skripsi.
7. Keluarga besar Mbah Kakung Pranoto Amin yang telah membantu dan menjadi penyemangat hidup dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
8. Patner saya Afifah yang sudah mau menemani, memotivasi dan saling support keluh kesah dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan terutama kelas Ilmu Politik C angkatan 2020 terimakasih telah menemani dan juga berproses bersama selama perkuliahan, terutama teman dekat saya Dimas, Admid, Nafisah, Latiana, Lilis, Latifah yang sudah mau saling membantu dan saling support dalam penulisan skripsi ini
10. Susi dan Noviani yang sudah turut membantu dalam pengerjaan skripsi dan menjadi teman yang mau direpoti dalam penulisan skripsi ini
11. Teman-teman KKN UIN Walisongo MIT-106 yang sudah menjadi teman keluarga baru dan kebersamaan di perkuliahan
12. Bapak Asikin selaku Kepala Desa Trepan dan jajarannya, Bapak Djuwoto mantan Kepala Desa Trepan, Ketua POKDARWIS Trepan Agritage, GAPOKTAN Desa Trepan, pelaku UMKM Desa Trepan dan masyarakat Desa Trepan terimakasih telah mempermudah penulis selama penelitian berlangsung;
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang selama ini, terimakasih sudah kuat, terimakasih untuk tidak menyerah sampai akhir, dan merasa bersyukur bisa menyelesaikan proses lika-liku dibangku perkuliahan sampa pada titik penulisan skripsi.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis, pihak yang terlibat, dan pembaca. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan kedepannya.

Semarang, 18 April 2024

Rif'an Amirudin

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Shobqi dan Ibu Darti Ningsih dan saya pribadi yang telah berjuang dan berusaha menuntut ilmu untuk memperoleh gelar sarjana. Puji syukur alhamdulillah, berkat kerja keras dan teriring doa orang tua menjadi motivasi penulis untuk mempersembahkan kepada keluarga besar Mbah Kakung Pranoto Amin yang saya cintai.

MOTTO HIDUP

تَعَلَّمَ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا # وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

“Belajarlah, karena manusia tidak dilahirkan dalam keadaan memiliki ilmu, dan saudaranya ilmu tidak seperti orang bodoh”

“Kegagalan adalah ketika anda berhenti berjuang untuk apa yang anda inginkan”

~ Chairul Tanjung ~

ABSTRAK

Desa Trepan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang sedang menjalin hubungan kerja sama dengan CSR Petrokimia Gresik dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi desa untuk timbal balik yang saling menguntungkan. Namun dalam proses kerja sama yang dilakukan, ditemukan macam polemik dalam kerja sama diantaranya tidak ada keterbukaan transparansi dan akuntabel pada hubungan mitra kerja antara kelompok sadar wisata dan CSR Petrokimia Gresik dengan Pemerintah Desa Trepan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika kerja sama terjalin antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan dan apa dampak adanya polemik dalam hubungan kerja sama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan pendekatan studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan terkait dinamika kerja sama awal yang menyebabkan adanya polemik kerja sama pada proses pelaksanaan mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan secara mendalam berdasarkan data secara fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell & Gash.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika terjalinnya kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan, dipengaruhi dengan saling ketergantungan pemangku kepentingan atas masalah yang dimiliki dari keterbatasan pemerintah Desa Trepan kepada warga terkait pemberdayaan dan tanggung jawab perusahaan Petrokimia kepada masyarakat desa terkait limbah perusahaan masuk di areal persawahan warga. Kemudian masalah tersebut menghasilkan pertemuan bersama dengan masyarakat desa dan kemudian menawarkan program Kampung Pisang Trepan dan tahapan negoisasi bersama tanpa membuat Mou secara tertulis. Kedua, dampak polemik kerja sama yang dihasilkan memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat Desa Trepan, meskipun dampak yang dihasilkan masih ada kekurangan dalam hubungan kerja sama.

Kata Kunci : Dinamika, Kerja sama, Desa wisata

ABSTRACT

Trepan Village is a village in Babat District, Lamongan Regency which is currently establishing a cooperative relationship with CSR Petrokimia Gresik by involving community groups in developing the village's potential for mutually beneficial reciprocity. However, in the collaboration process, various polemics were found in the collaboration, including a lack of transparency and accountability in the working partner relationship between the Petrokimia Gresik tourism and CSR awareness group and the Trepan Village Government. This research aims to see how the dynamics of cooperation exist between the Trepan Village Government and CSR Petrokimia Gresik in developing the Kampung Pisang Trepan tourist village and what impact the polemics have on the cooperative relationship.

This research uses qualitative research methods with field study research and a case study approach. This aims to understand and explain the dynamics of the initial collaboration which led to a collaboration polemic in the implementation process of developing the Kampung Pisang Trepan tourist village in depth based on factual data in the field. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis in this research uses Ansell & Gash's collaborative governance theory.

The results of this research show that the dynamics of cooperation in developing the Kampung Pisang Trepan tourist village are influenced by the interdependence of stakeholders regarding the problems faced by the Trepan Village government's limitations to residents regarding empowerment and responsibility of Petrochemical companies to village communities regarding company waste entering the area, residents' rice fields. Then this problem resulted in a joint meeting with the village community and then offering the Kampung Pisang Trepan program and joint negotiation stages without making a written MoU. Second, the resulting polemic impact of cooperation has had a political, social and economic impact on the people of Trepan Village, although the resulting impact still has shortcomings in the cooperative relationship.

Keywords: *Dynamics, Cooperation, Tourism village*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO HIDUP	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Definisi Konsep	15
1. Konsep Collaborative.....	15
2. Konsep Governance	16
3. Konsep Dasar Collaborative Governance	17
4. <i>Pengertian</i> Pariwisata	19
5. Desa Wisata	20
B. Kerangka Teori	21
1. Teori Collaborative Governance Ansell & Gash	21
2. <i>Model</i> Collaborative Governance Ansell & Gash.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DESA WISATA KAMPUNG PISANG TREPAN	26

A.	Gambaran Umum Desa Trepan.....	26
1.	Kondisi Geografis	26
2.	Kondisi Demografis	28
3.	Profil Pemerintah Desa Trepan	32
B.	Gambaran Desa Wisata Kampung Pisang Trepan	33
BAB IV DINAMIKA KERJA SAMA DESA TREPAN DENGAN CSR PETROKIMIA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG PISANG		40
A.	Kondisi Awal Desa Trepan	40
1.	Keterbatasan Pemerintah Desa Trepan Memberdayakan Masyarakat	41
2.	Keinginan Masyarakat Meningkatkan Sumber Penghasilan.....	46
3.	Konflik Masyarakat Masalah Dampak Limbah Perusahaan Masuk Areal Persawahan Warga.....	51
B.	Proses Kolaborasi Desa Trepan Dengan CSR Petrokimia Gresik	55
1.	Diskusi Bersama Masalah Warga	55
2.	Pembagian Peran Tanggung Jawab Tanpa Ada Mou Tertulis	61
3.	Pengelolaan Desa Wisata Kampung Pisang Kurangnya Kordinasi	69
4.	Prestasi Kelompok UMKM Desa Trepan Sebagai Keberhasilan Proses	75
BAB V DAMPAK POLEMIK KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG PISANG		81
A.	Dampak Politik Bagi Masyarakat Desa Trepan	81
1.	Kebijakan Pemerintah Desa Yang Demokratis.....	81
2.	Stigma Negatif Warga Adanya Politik Kepentingan	83
B.	Dampak Sosial Bagi Masyarakat Desa Trepan.....	85
1.	Meningkatkannya Sumber Daya Pengetahun Masyarakat Desa Trepan	85
2.	Ketimpangan Sumber Pendapatan Dan Masalah Tenaga Kerja.....	87
C.	Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Trepan	91
1.	Membuka Lapangan Pekerjaan Warga & Keuntungan Kelompok UMKM.....	91
2.	Dampak Kerugian Yang Dihasilkan	94
BAB VI PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Trepan.....	28
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	29
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok	29
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	31
Tabel 6 Aktor yang terlibat & Pembagian Peran	63
Tabel 7 Hasil Sementara Kolaborasi Program Kampung Pisang Trepan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Ansell & Gash.....	23
Gambar 2 Peta Desa Trepan	26
Gambar 3 Kantor Pemerintah Desa Trepan	27
Gambar 4 Pintu Masuk Desa Trepan	34
Gambar 5 Denah Kampung Pisang Trepan.....	34
Gambar 6 Perkebunan Pisang Trepan	35
Gambar 7 Kebun Percobaan Kampung Pisang	35
Gambar 8 Kerajinan Pelepah Pisang.....	36
Gambar 9 Produk UMKM Desa Trepan	37
Gambar 10 RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan	45
Gambar 11 Pertemuan Rencana Program Kampung Pisang Trepan.....	56
Gambar 12 Bantuan Fasilitas Dari CSR Petrokimia	71
Gambar 13 Produk Trepan di Sponsori Artis Ternama	71
Gambar 14 Branding Kampung Pisang Via Instagram.....	72
Gambar 15 Juara 1 Festival Inovasi Pemuda Nahdlatul Ulama.....	76
Gambar 16 Piagam Penghargaan Ibana Craft	77
Gambar 17 Aktivitas Warga Mencari Pelepah Pisang.....	86
Gambar 18 Hasil Penjualan Produk UMKM Trepan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah serta memperhatikan nilai potensi dan keanekaragaman daerah dalam hal pemerataan pembangunan yang mengedepankan nilai demokrasi guna membantu mempercepat pembangunan di suatu daerah. Salah satunya, dengan meningkatkan taraf perekonomian daerah dan percepatan pembangunan ialah dengan mengembangkan dan menggali potensi pariwisata di suatu daerah. Pembangunan di suatu daerah dengan mengembangkan pariwisata yang dikembangkan dan dikelola dengan optimal tentu akan membuka ruang dari segi pendapatan daerah dan hal tersebut merupakan salah satu strategi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang masih dihadapi negara berkembang, salah satunya Indonesia (Akbar, 2022).

Kepariwisataan Indonesia merupakan hal yang selalu ditandai dengan kaitannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ruang lingkup yang menjadi pelopor pelaku utama dalam menjalankan roda pembangunan kepariwisataan diantaranya melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, serta akademisi dan LSM (Sedaryamanti, 2014). Pengembangan pariwisata yang ada di daerah dengan melibatkan banyak pihak tentu diharapkan mempermudah pemerintah dalam bermitra baik dari institusi bisnis, lembaga masyarakat sipil, dan juga dukungan dari partisipasi masyarakat.

Sejak terbitnya Perda Jawa timur nomor 4 tahun 2022 terkait pemberdayaan desa wisata, pemerintah daerah telah memberikan ruang bagi desa untuk menggali potensi yang ada di desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya masyarakat, mengelola sumber daya alam dan cagar budaya yang dapat membantu perekonomian masyarakat dengan memperhatikan keaslian tradisi, partisipasi masyarakat secara kolaboratif. Salah satu diantaranya ialah Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang mencoba mengembangkan dan menggali potensi desa wisata dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam melalui banyaknya pohon pisang dan

cagar budaya tradisi yang ada di Desa Trepan dalam memanfaatkan tanaman tersebut.

Adanya desa wisata diharapkan dapat membantu sektor perekonomian masyarakat desa dan kemandirian pemerintah desa dengan cara menggali keaslian desa dan keberagaman potensi desa yang dimiliki. Penelitian yang mengkaji pengembangan desa wisata juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya Sugianto (2016), Molla (2021), Sungkawati (2022), dan Vandayani (2022) yang memiliki karakteristik pada sektor pengembangan, kultur budaya, adat istiadat, dan cerminan asli desa untuk diangkat sebagai salah satu objek fokus wisata. Sugianto (2016), dalam penelitiannya di Desa Karangpatihan Ponorogo menunjukkan bahwa keindahan alam yang ada di desa dapat dijadikan desa wisata karena memiliki ciri khas nilai jual berupa kekayaan alam dan keindahan asli desa yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berbeda dengan Molla (2021), adanya kampung desa wisata juga bisa digambarkan dengan memiliki nilai kebudayaan, seperti rumah adat istiadat yang bisa ditawarkan kepada wisatawan dengan memperkenalkan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

Hal tersebut seperti Desa Wisata Kampung Majapahit yang berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang memiliki kebudayaan dengan adanya patung Budha terbesar di Indonesia dan peninggalan Kerajaan Majapahit yang dijadikan tempat pengembangan desa wisata dari sisi sejarah dan kebudayaan (Vandayani & Widiyantara, 2022). Selanjutnya Sungkawati (2022), dalam kajiannya melihat dalam pengembangan desa wisata yang ada di Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar menjadikan desanya dengan nilai jual agrowisata melalui buah alpukat sebagai penciri khas desa wisata mereka. Selain itu, mereka juga memanfaatkan potensi pertanian buah alpukat dengan membuat batik ciri khas desa dengan adanya corak motif buah alpukat.

Hal yang dilakukan Pemerintah Desa Trepan saat ini ialah mencoba menggali potensi dan mengembangkan desa wisata dengan cara memanfaatkan sumber daya alam melalui tanaman pohon pisang yang dapat dikelola masyarakat desa untuk dijadikannya destinasi wisata edukasi kampung pisang. Wisatawan yang datang akan diperlihatkan dengan keindahan alam banyaknya kebun pisang warga Desa Trepan yang pengelolaan pohon pisang dapat dijadikan menjadi olahan makanan dan kerajinan tangan seperti pembuatan aksesoris melalui limbah pisang, pembuatan keripik pisang, sambel pisang dan makanan lainnya yang semua

berdasar dari tanaman pohon pisang. Aktivitas tersebut merupakan wujud adanya kerja sama yang dibangun antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik untuk tujuan visi bersama menggali potensi desa serta dapat memberdayakan masyarakat Desa Trepan dengan timbal balik yang saling menguntungkan.

Hal tersebut berdasarkan kepentingan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Dimana CSR Petrokimia Gresik membutuhkan wadah untuk merealisasikan program *Community Development* sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat Desa Trepan karena perusahaan Petrokimia bidang instalasi air yang masih (satu) 1 ring dengan kawasan Desa Trepan. Sedangkan, dari Pemerintah Desa Trepan memiliki keterbatasan dalam memberdayakan masyarakatnya. Sehingga mendorong pemerintah desa untuk melakukan kerja sama dengan pihak CSR yang dapat membantu pemerintah desa dengan adanya program CSR Petrokimia Gresik.

Jalinan kerja sama yang dibangun kedua belah pihak antara pemerintah desa dan pihak swasta juga melibatkan (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani dan pelaku UMKM Desa Trepan sebagai sasaran dalam pelaksanaan program mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan, para stakeholder masih belum memiliki arah pandang yang jelas dalam melakukan kerja sama. Tantangan dalam kerja sama menurut Ansell & Gash (2007), bahwa tantangan yang dihadapi dalam kerja sama ialah harus ada kejelasan arah pandang terkait tujuan dan pendekatan yang digunakan serta komitmen secara utuh. Hal tersebut ditemukan macam polemik terkait program yang dijalankan, seperti bantuan anggaran dari pihak CSR yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat langsung tanpa disampaikan secara jelas kepada pemerintah desa, tidak adanya keterbukaan POKDARWIS dengan pemerintah desa terkait income yang masuk dari masing-masing pelaku UMKM, serta kurangnya kordinasi Ketua POKDARWIS kampung pisang dengan pihak pemerintah desa tanpa adanya aturan dasar yang jelas terkait masuknya wisatawan dari segi pengelolaan yang berpengaruh pada arah pemanfaatan desa wisata.

Tantangan lain juga ditemukan dari POKDARWIS yang masih belum bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif terkait pengelolaan desa wisata dengan sumber daya manusia yang rendah, menyebabkan kurangnya peran dan

sinergi kesamaan antara pemerintah desa dengan POKDARWIS dalam menjalankan desa wisata kampung pisang. Sehingga, pengelolaan yang dilakukan belum bisa dimaksimalkan sepenuhnya.

Polemik pada lingkup pemerintah desa dengan pihak swasta juga berkaitan dengan tidak adanya transparansi dan akuntabel pada hubungan mitra kerja yang dilakukan. Hal ini yang menimbulkan perbedaan pandangan dari pihak swasta terkait arah strategi dalam pengelolaan desa wisata kampung pisang serta menjadi penyebab keterbatasan dalam pengelolaan karena memiliki tujuan yang berbeda. Sehingga hal tersebut menjadi faktor kegiatan maupun program pengembangan desa wisata kampung pisang dengan melibatkan GAPOKTAN Desa Trepan dan pelaku UMKM masih belum bisa dikembangkan secara optimal karena perbedaan pandangan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti membagi menjadi dua kajian yang akan diteliti lebih lanjut untuk menggali informasi dan mengetahui lebih dalam terkait polemik yang ada dalam kerja sama pemerintah maupun dengan pihak CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata kampung pisang. Kajian pertama, bagaimana dinamika kerja sama Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata kampung pisang. Kedua, apa dampak polemik kerja sama dalam pengembangan desa wisata kampung pisang. Sehingga hal tersebut menjadi alasan peneliti mengangkat judul Polemik Kerja Sama Pengembangan Desa Wisata : Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Kampung Pisang Trepan Kecamatan Kabupaten Lamongan Periode 2018-2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti membagi dua pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang sudah diuraikan oleh peneliti:

1. Bagaimana dinamika kerja sama Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata kampung pisang?
2. Apa dampak polemik kerja sama dalam pengembangan desa wisata kampung pisang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas peneliti memiliki tujuan untuk diuraikan dengan topik POLEMIC KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESA WISATA

(Studi Kasus Kampung Pisang Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai berikut) :

1. Mengetahui dinamika kerja sama Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata kampung pisang
2. Mengetahui dampak polemik kerja sama dalam pengembangan desa wisata kampung pisang

D. Manfaat Penelitian

Dari beberapa yang sudah dijelaskan di rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca diantaranya sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi sarjana Ilmu Politik maupun perguruan tinggi. Kemudian juga menjadi pemahaman bagi peneliti dan meluaskan kajian dalam hal polemik dan tantangan dalam menjalin kerja sama baik pemerintah maupun pihak swasta.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lembaga pemerintah desa dan masyarakat sebagai bahan masukan dalam pengembangan desa wisata kampung pisang Desa Trepan dalam menjalin kolaborasi dengan aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar pengembangan desa wisata kampung pisang Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat melibatkan semua pihak dan saling memiliki kesepahaman bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang kerja sama dalam pengembangan desa wisata sudah pernah banyak dikaji oleh banyak sarjana Ilmu Politik di Indonesia, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Hal yang dilakukan peneliti ialah meninjau melihat dari sisi adanya polemik dalam kerja sama dalam pengembangan desa wisata.

Oleh karenanya peneliti ingin membandingkan dan mengkaji lebih jauh lagi sebagai telaah pustaka dan fokus penelitian. Peneliti membagi dua tema kajian yaitu: *collaborative governance* dan desa wisata.

E.1 *Collaborative Governance*

Kajian terkait *collaborative governance* telah banyak diteliti oleh para ahli atau peneliti sebelumnya. Diantaranya yakni Febrian (2016), Alamsyah (2019), Kirana & Artisa (2020), Molla (2021), (Setiawan & Sutikno, 2022). Febrian (2016) dalam penelitiannya mengkaji tentang “*Collaborative Governane Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan*”. Dalam kajiannya meninjau konsep dan regulasi yang ada dalam UU tentang desa. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten atau Kota yang terkandung dalam UU No.6 tentang Desa dalam pasal 83 ayat 1 . Diantaranya diperlukan kolaborasi untuk memajukan potensi desa baik dari sumber daya yang dimiliki. Hasil kajiannya membahas terkait ditemukannya sistem yang tidak berjalan dilihat dari keadaan kondisi perubahan undang-undang yang berdampak pada faktor kepemimpinan. Dengan kata lain kurangnya dari segi kepemimpinan sangat berdampak pada perencanaan pembangunan desa sebagai mediator dan masih banyak temuan dinamika kolaborasi yang tidak sehat yang berdampak terhambatnya jalinan kolaborasi dari berbagai macam pihak dan berakibat pembangunan kawasan pedesaan yang belum optimal. Alamsyah (2019), dalam penelitiannya mengkaji terkait mengenai *collaborative governance* dalam mengembangkan wisata edukasi yang ada di Desa Kemiri. Dalam temuan kajiannya menunjukkan bahwa adanya keberhasilan jalinan kolaborasi dalam mengembangkan desa wisata di Desa Kemiri ditandai adanya saling percaya antara pemerintah Luwu Utara, dinas kebudayaan dan pariwisata dengan melibatkan masyarakat yang membahas keuntungan dan pembagian lahan yang dijadikan pembangunan serta menjamin saling menguntungkan berbagai pihak.

(Kirana & Artisa, 2020) mengkaji mengenai analisis membangun desa wisata yang ada di Kota Batu berbasis *collaborative governance* yang dilakukan oleh para aktor dan kerjasama yang dibuat sehingga menghasilkan kolaborasi. Dalam hasil kajiannya upaya pemerintah menggandeng pihak swasta, media dan masyarakat berdampak dengan memberikan manfaat bagi daerah diantaranya meningkatnya (PAD). Masing-masing aktor memiliki peranan masing-masing dalam menjalin kolaborasi seperti pihak swasta punya andil memberikan suntikan baik berupa materi maupun non-materi,

sedangkan masyarakat memiliki peran pada bentuk partisipasi aktif dengan adanya komunitas masyarakat serta program masyarakat yang dapat diselaraskan dengan program pemerintah. Sedangkan media memiliki peran sebagai alat untuk mendukung pemerintah. Dalam hasil kajiannya juga ditemukan kendala dalam menyelaraskan peran masing-masing aktor dalam mengembangkan desa wisata di Kota Batu yang disebabkan pada masing-masing kebutuhan *stakeholders* terutama terkait penyediaan lahan. Sehingga diperlukan komunikasi intensif dari berbagai pihak untuk memaksimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata yang ada di Kota Batu.

Molla (2021), dalam penelitiannya mengkaji proses dan faktor collaborative governance yang ada di kampung wisata praijing di Desa Tebara. Hasil kajiannya mengatakan bahwa kampung wisata praijing dianggap belum berjalan efektif dalam menerapkan collaborative governance yang disebabkan berbagai hal macam permasalahan. Seperti tidak konsistennya pengelola desa wisata mengikuti atau mentaati AD/ART Badan Usaha Milik Desa. Faktor lain terhambatnya kolaborasi juga diperkarai kualitas SDM dan atraksi budaya yang tidak dikemas dengan baik berdampak pada ketidakjelasan program yang dibuat. Sedangkan Setiawan (2022) dalam penelitiannya mengkaji terkait proses kolaborasi pembangunan desa wisata di Desa Winduaji. Hasil kajiannya membahas bahwa adanya collaborative governance dalam pengelolaan desa wisata berdampak pada sektor pembangunan desa, melihat keberadaan otonomi desa dan undang-undang tentang pembangunan desa yang dilaksanakan secara mandiri memberikan peluang bagi pemerintah desa. Kemampuan Desa Winduaji dalam proses kolaborasi menjadikan desa tersebut mendapatkan penghargaan prestasi karena berhasil berbagi peran dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak menghasilkan terciptanya kegiatan pariwisata yang ada di desa.

Berdasarkan hasil studi telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap lima kajian pustaka diatas menunjukkan terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini fokus yang menjadi dasar penelitian ini dengan melihat dari segi kerja sama yang dibangun pemerintah Desa Trepan dengan pihak CSR Petrokimia Gresik menggali potensi desa dengan social mapping dan saling kebergantungan.

E.2 Desa Wisata

Para ahli atau peneliti telah banyak mengkaji mengenai desa wisata. Diantaranya yakni Zakaria (2014), Sidiq (2017), Prafitri (2016), Gautama (2020). Zakaria (2014) dalam penelitiannya mengkaji mengenai menentukan konsep pengembangan kawasan desa wisata yang ada di Desa Bandungan Pamekasan. Dalam temuan kajiannya masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia akan sulit mengoptimalkan pengembangan pariwisata yang ada di desa. Sehingga dalam pengembangan desa wisata diperlukan sebuah konsep agar ciri khas suatu desa dapat dikembangkan menjadi tempat desa wisata. Sementara itu, Sidiq (2017) mengkaji pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Dalam kajiannya ditemukan bahwa dalam pembangunan pengembangan desa wisata sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat lokal desa hanya dijadikan objek dari pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat akan sulit terwujud bila masyarakat tidak diberikan andil keterlibatan secara langsung dan harus ada peran pemerintah yang mengajak masyarakat untuk merancang konsep model pariwisata secara mandiri. Terutama peran pemerintah harus mampu menjadi fasilitator terhadap masyarakat yang dapat memberi manfaat secara besar dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Pafitri (2016) dalam penelitiannya mengkaji kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata. Dalam kajiannya kapasitas organisasi dalam pengelolaan desa wisata tidak akan berjalan secara sempurna bila tidak dibarengi dengan kapasitas individu. Keefektivan itu semua harus saling dilengkapi baik dari kapasitas organisasi yang dilihat dari kepemimpinan dan kordinasi yang mampu mengelola desa wisata dan mampu mempromosikannya. Sementara itu, dari kapasitas individu ialah ada inisiatif masyarakat untuk mau merintis pariwisata dengan menganali jenis potensi yang ada di desa dan dikembangkan potensi tersebut menjadi atraksi wisata baik potensi alam maupun cagar budaya. Sedangkan Gautama (2020), mengkaji terkait pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil kajian peneliti adanya peran

akademisi dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian sangat membantu dari sisi untuk mengetahui hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu, peneliti juga mencoba menyamakan persepsi dengan pariwisata agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Adanya program pengabdian masyarakat dapat membantu meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa dengan memberikan pelatihan pengembangan desa wisata serta kegiatan apa yang harus diperbaiki

Berdasarkan telaah kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap empat kajian pustaka diatas menunjukkan adanya sebuah perbedaan terkait lokus penelitian dan konteks pembahasan yang akan peneliti lakukan. Hal ini ditandai dengan peneliti memfokuskan pada proses dinamika *collaborative governance* yang ada di Desa Wisata Kampung Pisang Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang memiliki ragam keunikan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai tempat desa wisata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor dalam studinya mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur untuk mendapatkan penemuan informasi yang jelas baik berupa perkataan lisan atau tulisan yang bersumber dari informasi orang lain atau perilaku yang dilihat oleh peneliti (Moelong, 2016) Sedangkan untuk melakukan pendekatan, digunakan sebuah pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipakai untuk berkonsentrasi pada suatu peristiwa atau permasalahan yang telah terjadi dengan mengumpulkan segala jenis data yang ada untuk ditangani guna menghasilkan jawaban atas permasalahan yang ada (Creswell, 2015).

Selanjutnya, jenis penelitian yang dipakai ialah dengan menggunakan penelitian lapangan atau dikenal dengan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui peristiwa keadaan yang ada dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung untuk memperoleh sumber data sebagai penguat informasi sebagai fokus penelitian. Peneliti dalam hal ini juga mengamati dan terlibat secara langsung dengan masyarakat Desa Trepan sebagai locus penelitian dan mengamati aktor-aktor yang terlibat dalam

menjalinkan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata kampung pisang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan bersifat natural tanpa adanya manipulasi data yang diambil.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan digunakan untuk menggali informasi dan dari mana data itu diperoleh baik berupa kata-kata, tindakan, dan data dokumen lainnya (Arikunto, 2011). Dua jenis data tersebut ialah data primer dan data sekunder. Data utama atau data primer diperoleh dari sumber data utama yaitu orang yang diamati dan diwawancarai secara langsung oleh peneliti. Kemudian data sekunder bisa berupa dokumen penting, sumber literatur, maupun ragam media lain yang mendukung data primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah para informan yang meliputi: Kepala Desa Trepan, Ketua (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani, pelaku usaha UMKM, Ketua pengelolaan pariwisata dan beberapa masyarakat Desa Trepan yang nantinya dijadikan sumber informasi oleh peneliti. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bisa berupa dokumen penting yang ada di Pemerintahan Desa Trepan dalam menjalin kolaborasi dalam pengembangan desa wisata kampung pisang baik kajian literatur, berita, media online yang masih ada hubungannya terkait desa wisata kampung pisang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dijadikan sebagai alat oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh yang dibagi menjadi tiga prosedur oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan memiliki ciri yang spesifik guna mendapatkan informasi data (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan peneliti sebagai dasar untuk memperoleh realitas fakta peristiwa dan temuan-temuan dilapangan dari objek penelitian yang dikaji. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi nonpartisipan yang hanya mengamati saja terkait aktivitas masyarakat Desa Trepan terutama Pemerintah Desa Trepan, CSR Petrokimia, GAPOKTAN dan juga pelaku UMKM serta aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata kampung pisang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan maupun berkomunikasi secara langsung dengan informan. Dalam melakukan wawancara peneliti menerapkan metode wawancara tidak terstruktur agar dapat melakukan wawancara lebih mendalam yaitu (*in deep interview*). Penelitian ini memiliki beberapa narasumber yang akan dituju dalam memberikan jawaban pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Narasumber tersebut antara lain Kepala Desa Trepan, Sekretaris Desa Trepan, (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani, Ketua (POKDARWIS) Desa Trepan Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat Desa Trepan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperluas keakuratan informasi yang diperoleh dari lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Prosedur pendokumentasian dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh di lapangan, kronik dan laporan yang berada di daerah eksplorasi atau di luar daerah pemeriksaan. Strategi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan atau yang saat ini dapat diakses dalam arsip arsip. Kemampuannya membantu dan melengkapi informasi yang akan diperoleh melalui persepsi (Herdiansyah, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan pertemuan dengan para stakeholder, bantuan yang diberikan dalam hubungan kerja sama pengembang desa wisata, dan SK POKDARWIS Desa Trepan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data lain seperti wawancara, maka dalam sebuah penelitian data tersebut akan dilakukan sebuah teknik analisis data. Analisis data dipakai untuk menyusun secara sistematis apa yang sudah dikategorikan dan memilah data yang penting maupun tidak untuk ditelaah lebih dalam sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat mempermudah orang lain maupun peneliti dalam memahami (Sugiyono, 2017).

Selanjutnya, teknik analisis data yang dipakai akan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang sudah diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan analisis. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan karena bersifat merangkum, menajamkan dan memfokuskan suatu hal yang penting dan membuang hal yang tidak perlu untuk memperoleh gambaran yang jelas atas data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sehingga peneliti juga dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya bila dibutuhkan. Sehingga, penelitian ini mereduksi data dengan mengumpulkan informasi dari pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti dan merangkum jawaban atau memfokuskan data pokok yang dianggap penting dari informan yang bersangkutan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk penggambaran informasi yang bisa disajikan dengan urain singkat, bagan, jejaring kerja, maupun teks yang bersifat naratif guna merencanakan langkah kerja selanjutnya yang menjadi fokus kajian peneliti. Penyajian data tersebut dalam sebuah penelitian akan lebih mudah dalam memahami serta peneliti juga dapat menemukan analisa dari data yang ditemukan di lapangan.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang digunakan dalam menggunakan teknik analisis data dalam sebuah penelitian ini ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan tersebut diambil guna memperoleh deskripsi gambaran yang jelas yang sebelumnya data awal masih bersifat samar-samar bagi peneliti. Adanya kesimpulan akhir digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah. Dalam bidang penelitian ini, akan menghasilkan kesimpulan terkait komunikasi yang dijalin Kepala Desa Trepan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang dan mengetahui proses kerja sama yang dijalin pemerintahan desa dengan aktor-aktor yang terlibat dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang yang ada di Desa Trepan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diharapkan membantu dan mempermudah para pembaca agar mengetahui alur yang dijelaskan oleh penulis dan sudah dikelompokkan menjadi enam bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab awal ini akan dipaparkan secara jelas terkait pendahuluan sebagai prolog yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, juga akan dipaparkan tinjauan pustaka yang digunakan untuk menghindari replikasi penelitian serupa dan kerangka teori yang digunakan serta metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian. Selain itu, bagian terakhir bab satu ini akan dijelaskan susunan penulisan secara sistematis yang nantinya akan menjadi kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II: TEORI *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Pada bagian bab dua ini akan dijelaskan teori *collaborative governance* sebagai rujukan dalam penelitian penulisan skripsi secara komprehensif. Penjelasan teori yang digunakan agar dapat memberikan pemahaman secara utuh dan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian yang dikaji.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA WISATA KAMPUNG PISANG TREPAN

Bab ini akan memuat gambaran umum desa wisata kampung pisang Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang menjadi objek penelitian diantaranya:

- a) Profil lengkap Desa Trepan yang terdiri dari kondisi geografis, struktur sosial dan budaya, visi misi pemerintah desa dan struktur kepengurusan pokdarwis Desa Trepan.
- b) Peta dan Struktur Desa

BAB IV: DINAMIKA KERJA SAMA DESA TREPAN DENGAN CSR PETROKIMIA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG PISANG

Dalam bab ini akan dijelaskan secara mendetail terkait dinamika atau proses terjalannya kerja sama dengan CSR Petrokimia Gresik dalam pengembangan desa wisata kampung pisang.

BAB V: DAMPAK POLEMIK KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG PISANG

Dalam bab ini akan dijelaskan secara mendetail terkait dampak polemik kerja sama Pemerintah Desa Trepan dengan aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata kampung pisang. Terutama sejauh mana polemik tersebut mempengaruhi pada outcome pada masyarakat serta para aktor pengembang desa wisata kampung pisang.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini akan memuat hasil akhir atau kesimpulan dari pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis dari beberapa rumusan masalah. Serta akan ada saran dan masukan dari penulis untuk Pemerintah Desa Trepan dan masyarakat desa dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang terutama bentuk jalinan yang dibangun dengan pihak aktor yang terlibat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konsep

1. Konsep Collaborative

Secara etimologi kata *collaborative* atau sering disebut kolaborasi diambil dari dua suku kata dalam bahasa Inggris yaitu *co* dan *labor* yang memiliki makna bersama dan tenaga kerja. Secara arti etimologi, kata tersebut mengandung makna yang luas dimana arti tersebut juga bisa diartikan dengan penyatuan tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sudah ada ketetapan dan jalinan kesepakatan bersama dalam berkolaborasi. Sedangkan menurut pandangan O'Leary dalam (Saleh, 2020) mendeskripsikan bahwa kata kolaborasi dipakai untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, sektor, hubungan, maupun organisasi dan negara.

Dalam artian penjabaran makna, kolaborasi secara umum bisa kaitannya dengan kondisi dimana adanya situasi atau keadaan yang memungkinkan dalam menyelesaikan sebuah masalah diperlukan kerja sama antara beberapa orang maupun institusi yang saling memahami dan kebergantungan untuk saling mengerti satu sama lain dalam permasalahan masing-masing serta berusaha untuk saling membantu menyelesaikan keadaan permasalahan masing-masing secara bersama. Secara spesifik kolaborasi merupakan langkah kerja sama secara intensif untuk menyelesaikan sebuah masalah yang harus diselesaikan dari kedua belah pihak, baik secara personal perorangan maupun instansi kelembagaan.

Konsep kolaborasi sendiri secara pengertian memiliki banyak arti yang luas dari para ahli tergantung melihat sudut pandang yang beragam dalam memahaminya. Hal tersebut didasari dengan identik dengan kesatuan ilmu sosial pada umumnya sebagai landasan dasar pada bagian salah satu konsep disiplin ilmu sosial. Secara pengertian sendiri kolaborasi kaitannya erat dengan prinsip kerja sama, kebersamaan, konsensus, berbagi tugas sesuai dengan kesepakatan, pola kesetaraan dan mau berbagi tanggung jawab. Hal tersebut yang memungkinkan pada titik suatu hal yang rumit dikarenakan banyaknya bidang dan aspek dalam kolaborasi. Secara umum, kolaborasi juga

bisa dikategorikan dengan adanya sebuah pola bentuk hubungan yang berkaitan baik secara individu maupun secara organisasi yang mempunyai keinginan saling berpartisipasi satu sama lain, saling berbagi sumber pengetahuan maupun tenaga dan berbagai manfaat yang lain yang secara khusus harus dilakukan bersama sama tanpa adanya suatu paksaan dalam pengambilan suatu putusan yang dicapai. Hal itu sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Roschelle dan Teasley dalam (Saleh, 2020) bahwa interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, kesamaan struktur, dan tingkat negosiasi, interaksi, dan adanya ketergantungan yang tinggi.

Selanjutnya, ada definisi kolaborasi yang dikembangkan oleh Sanaghan, 2015 dalam (Saleh, 2020) secara terperinci baik secara unsur-unsurnya. Kolaborasi yang dimaksud ialah dengan melibatkan komunikasi yang transparan dan terpercaya di mana semua pihak merasa mendapat informasi dan dapat memberikan umpan balik dan ide kepada orang lain yang bekerja dengan mereka. Hal terpenting dalam kolaborasi ialah melibatkan pengambilan keputusan bersama yang mana aturan keputusan dipahami oleh semua orang dan semua pihak yang terlibat dalam memahaminya, menginformasikan, atau mempengaruhi keputusan penting yang berpotensi berdampak pada mereka, terutama keputusan alokasi sumber daya.

Uraian beberapa definisi dalam memaknai kolaborasi dari para ahli diatas tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kolaborasi yang dimaksud ialah jalinan kerja sama dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah dari masing-masing kepentingan serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja sama saling terhubung dan memahami satu sama lain dalam mengambil suatu putusan secara konsensus dan dileberatif serta adanya kesetaraan dalam mengambil tindakan yang ingin dicapai.

2. Konsep Governance

Sebelum pada arti makna pembahasan terkait *collaborative governance* yang merupakan proses kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah kita perlu mengenal arti dari konsep governance sebelum dilanjut pada pembahasan *collaborative governance*. Menurut Kooiman (2003), *governance* dapat diartikan sebagai sebuah konsepsi tentang interaksi dalam memerintah, di mana interaksi itu sendiri merupakan hubungan yang saling terkait antara

dua atau lebih aktor dan entitas. Sedangkan menurut (Rhodes,1996) mendefinisikan *governance* dengan merujuk pada perubahan tata kelola pemerintahan yang memiliki makna lebih luas yang meliputi adanya proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur.

Pemahaman terkait *governance* sering kali disamakan dengan istilah *government*, padahal kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda. Konsep *governance* sendiri secara arti memiliki makna dan unsur yang lebih luas dibandingkan *government*, hal tersebut terletak pada tata kelola pemerintahan yang tidak terpusat pada pemerintah saja, melainkan juga melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah baik dari masyarakat, swasta, atau badan badan yang lain untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan *government* sendiri berfokus pada subjek yang mengatur instansi atau lembaga negara saja, dalam artian lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki hak dan wewenang dalam mengatur urusan pemerintah.

Dengan demikian, *governance* dapat dipahami secara jelas bahwa penyelenggaraan kebijakan publik tidak harus selalu terpusat dominan pada keputusan pemerintah, namun secara luas melibatkan berbagai pihak yang mempunyai hak partisipasi baik dari pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat dalam keterlibatan proses baru pengaturan yang akan dikerjakan. Penerapannya ialah peran pemerintah yang menjembatani bahan pendorong dan mampu memfasilitasi pihak yang bersangkutan seperti komunitas lain, sektor swasta dan masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan infrastruktur dan perumusan kebijakan.

3. Konsep Dasar Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan upaya pemerintah menjalin kolaborasi yang di dalamnya terdapat berbagai pihak baik dari pihak swasta, *civil society*, dan komunitas lembaga non pemerintah yang tujuannya ialah mencapai kesepakatan bersama dalam membuat suatu kebijakan yang saling menguntungkan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang mengedepankan masyarakat. Menurut O'Leary dan Bingham, kolaborasi digambarkan pada suatu konsep proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak golongan atau

organisasi lain untuk membantu memecahkan masalah atau keadaan yang tidak mudah diselesaikan oleh sebuah organisasi secara sepihak (Sudarmo, 2011).

Sedangkan menurut Dwiyanto (2011), dalam penjelasannya terkait kolaborasi dalam kerjasama ialah terjadi penyampain visi, tujuan strategi dan aktivitas yang dilakukan antara pihak yang melakukan kerjasama untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki kehendak wewenang dalam mengelola dengan patuh dan tunduk terhadap kesepakatan bersama. Selain itu, Robetson dan Choi, 2010 dalam (Astuti, 2020) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif yang memiliki kesamaan misi yang secara jelas para partisipan mempunyai hak di dalam otoritas tersebut dalam menyampaikan aspirasinya serta semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama.

Selanjutnya menurut Fadlurrahman dkk (2022), dalam menyikapi *collaborative governance* bahwa adanya kolaborasi merupakan bentuk respon atas perubahan lingkungan yang digambarkan terhadap isu-isu publik yang semakin kompleks dengan kondisi kemampuan pemerintah yang terbatas. Adapun pengertian *collaborative governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan dalam pengimplementasian suatu kebijakan dan tingginya biaya dan adanya politasi terhadap regulasi. Sedangkan Emerson dkk (2011) memiliki definisi yang lebih luas terkait *collaborative governance*, dimana beliau menggambarkan sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara konstruktif pada lembaga publik, tingkatan pemerintah, swasta, dan sipil yang secara khusus untuk melaksanakan tujuan publik.

Pengertian *collaborative governance* yang sudah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya jalinan *collaborative governance* merupakan bentuk sikap dan realitas keadaan awal yang terjadi dalam ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan secara individu dan kondisi kemampuan pemerintah yang terbatas. Sehingga hal tersebut menunjukkan paradigma baru dalam pemerintah dimana stakeholder, sektor bisnis, termasuk *Non-Government Organization* (NGO) dan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum yang dapat di sepakati bersama dan saling menguntungkan berbagai pihak terkhusus mengedepankan kepentingan masyarakat.

Adanya keterlibatan dari semua pihak merupakan bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara sepihak. Sehingga perlu adanya jalinan kolaborasi dan kemitraan dalam menyelesaikan masalah publik yang semakin kompleks dengan melibatkan kerjasama berbagai pihak yang tujuan orientasinya adalah keberhasilan suatu kebijakan dan menghendaki keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik.

Selanjutnya, dalam pengenalan dan memahami untuk mengetahui definisi desa wisata, peneliti terlebih dahulu mengartikan terkait definisi pariwisata sampai pada tahap secara utuh definisi desa wisata.

4. *Pengertian Pariwisata*

Secara etimologis arti dari pariwisata sendiri dibagi menjadi dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata *Pari* dan *Wisata*. Arti dari kata *Pari* sendiri memiliki makna yang berarti penuh, seluruh, atau semua, sedangkan kata *wisata* sendiri memiliki arti perjalanan. Secara konsep arti dari pariwisata sendiri berkembang dalam pendefinisian baik dari akademis, sosial budaya, maupun industri dilihat dari multidimensi dan latar belakang dari para ahli yang mendefinisikan. Secara akademis sendiri *Pariwisata* menurut Jafari dalam (Utama, 2014) mendefinisikan sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, dan juga termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia dalam melakukan perjalanan yang secara keseluruhan dari dua sisi memiliki dampak baik pelaku perjalanan dan industri wisata terhadap lingkungan sosial dan budaya, ekonomi yang ada di lingkungan setempat. Sedangkan menurut Herman V. Sculalard, pariwisata dapat di definisikan sebagai pengoperasian atau kegiatan yang masih ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung ditandai dengan masuknya wisatawan atau pelaku perjalanan yang masuk dan Bergeraknya dalam suatu negara, kota atau daerah (Wibowo, 2008).

Menurut Wahab dalam (Utama, 2014) pariwisata mengandung tiga unsur yang perlu diketahui diantaranya : unsur insani, unsur fisik, dan unsur tempo. Unsur insani yang dimaksud ialah manusia sebagai pelaku yang melakukan

kegiatan pariwisata, selanjutnya ada unsur fisik yang dimaksud ialah adanya tempat sebagai kegiatan itu sendiri, sedangkan unsur tempo merupakan waktu yang dihabiskan dalam perjalanan pariwisata dan berdiam di tempat tujuan. Dengan demikian dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata kaitannya erat dengan kegiatan perjalanan manusia untuk bersenang-senang yang sudah direncanakan di suatu tempat serta kaitannya erat dengan pada sisi ekonomi di bidang industri pariwisata yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang menjadi tempat lokasi masuknya wisatawan di suatu negara, kota maupun daerah sebagai penerima wisatawan.

5. Desa Wisata

Desa wisata sendiri kaitannya erat dengan kegiatan pariwisata yang berada di lingkup suatu pedesaan yang menjadi tempat destinasi. Telah banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari desa wisata diantaranya Sudibya, (2018) yang mengartikan desa wisata sebagai kegiatan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke desa, melihat dan mempelajari keaslian keunikan dan adanya potensi desa yang dimilikinya. Sementara menurut Nuryanti, (1993) desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi dan atraksi, akomodasi dan adanya fasilitas pendukung yang disediakan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dan memiliki keunikan dan tradisi yang menjadi ciri khas desa tersebut atau tradisi yang berlaku. Halnya dengan World Tourist Organization (WTO) dalam jurnal (Irhandayaningsih, 2019) mengartikan desa wisata merujuk pada pariwisata dengan adanya muatan budaya, adanya kebebasan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa serta adanya potensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hadiwijoyo dalam jurnal (Sudibya, 2018) bahwa suatu desa dapat di kriteriakan menjadi desa wisata dengan melihat beberapa kriteria yang dikemukakannya antara lain ialah :

1. Akseibilitas baik, akses saat dikunjungi wisatawan mudah dan bisa menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Adanya objek yang menarik baik berupa legenda, seni budaya, kekayaan alam dan sebagainya yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata.

3. Masyarakat desa dan pemerintah desa menjamin dan mendukung masuknya wisatawan serta mendukung adanya pengembangan desa wisata.
4. Keamanan yang memadai, dalam artian wisatawan merasa nyaman saat memasuki di suatu desa wisata tanpa adanya tindak diskriminasi atau hal yang merugikan wisatawan.

Adanya desa wisata tak lepas dari peran dari masyarakat untuk mendukung selalu partisipasi mereka untuk menggali dan mengembangkan desa wisata serta adanya dorongan dari pemerintah desa agar adanya desa wisata dapat menjadi nilai surplus untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menambah PAD pemerintah desa yang secara pengelolaan masyarakat memiliki peran keterlibatan dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi dalam mengembangkan desa wisata.

Dengan demikian, apa yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa definisi dari desa wisata sendiri merupakan serangkaian kegiatan pariwisata dengan masuknya wisatawan dilingkup pedesaan yang mengamati dan menikmati keindahan di suatu desa yang di dalam kegiatannya menawarkan keaslian aktivitas desa baik berupa sejarah, keindahan alam, tradisi dan sosial budaya dan kebiasaan kehidupan masyarakat desa dan dari sisi administratif pengelolaan wisata tersebut ada jaminan keterlibatan masyarakat lokal dalam mengembangkan desa wisata.

B. Kerangka Teori

1. Teori Collaborative Governance Ansell & Gash

Teori Ansell dan Gash yang ada dalam jurnalnya *Collaborative governance in Theory and Practice*, bahwa beliau mendefinisikan *collaborative governance* dengan serangkaian sistematisasi lebih dari satu kelembagaan publik yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan “non state” yang di dalam proses pembuatannya bersifat formal, mematuhi setiap keputusan musyawarah dan dileberatif yang bertujuan untuk membuat kebijakan publik, megimplementasikan dan mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2007). Definisi yang

dikemukakan oleh Ansell dan Gash terkait *collaborative governance* memiliki enam kriteria penting yang perlu diketahui diantaranya:

- a) Forum dipelopori oleh badan atau lembaga publik.
- b) Partisipan dalam forum termasuk aktor non-negara.
- c) Partisipan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan sekedar “berkonsultasi” dengan badan publik.
- d) Forum dalam kolaborasi terstruktur secara formal dan adanya bertemu secara kolektif.
- e) Adanya forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan secara konsensus (walaupun, secara praktik tidak terwujud).
- f) Fokus kolaborasi merujuk pada kebijakan publik dan manajemen publik.

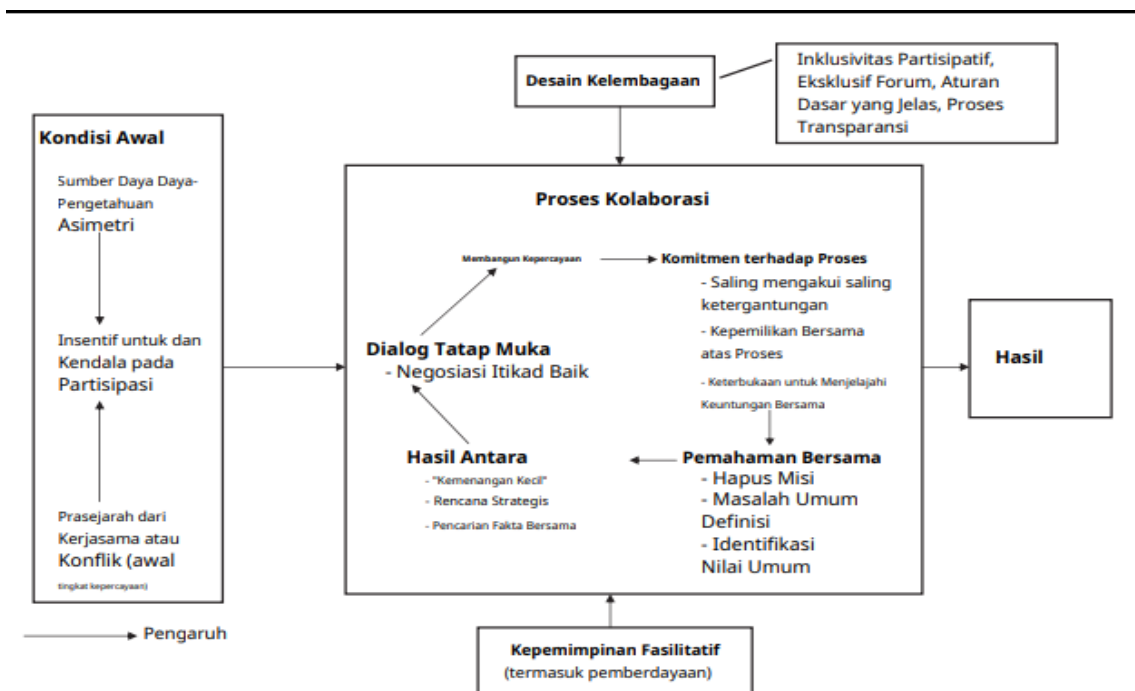
Kolaborasi yang dimaksud Ansell dan Gash (2007) dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk bagian dari partisipasi warga dan non-negara ialah sebagai bentuk adanya kepedulian memiliki rasa tanggung jawab nyata atas hasil kebijakan yang dibuat. Karena dalam kolaborasi menurutnya, harus ada komunikasi dua arah yang secara kolektif dalam setiap putusan mematuhi segala proses dileberatif. Meskipun, dalam berkolaborasi secara praktik nantinya akan terdapat perbedaan persepsi dalam setiap putusan-putusan yang akan diambil dalam perumusan kebijakan.

Collaborative governance pada dasarnya ialah menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash, 2007). Selanjutnya, tata kolaborasi yang dimaksud juga bukan menekankan pada perantaraan kepentingan pemenang memegang kendali dalam setiap putusan yang diambil. Namun, dalam tata kelola kolaborasi akan selalu ada permusuhan atau perbedaan pandangan (konflik) terhadap satu sama lain dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Dengan adanya hal tersebut tidak selalu bersifat negatif menurutnya, justru hal tersebut juga berdampak memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan masalah secara bersama dan timbul menjadi hubungan yang kooperatif dengan adanya tawar menawar yang nantinya memunculkan ide atau gagasan yang kemudian dapat dikembangkan dan memunculkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

2. Model Collaborative Governance Ansell & Gash

Collaborative governance yang dikemukakan Ansell dan Gash memiliki model prinsip yang dibagi menjadi empat variabel utama yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Adapun variabel tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa subvariabel. Hal ini dilihat dari kondisi awal sangat menentukan dasar adanya jalinan baik dari kepercayaan, konflik serta modal soisal yang menjadikan peluang dalam proses kerjasama. Desain kelembagaan menentukan aturan main secara prosedur yang jelas dalam berkolaborasi, serta kepemimpinan menjadi modal peran penting sebagai fasilitator dalam terjalannya proses kolaborasi yang dibangun.

Gambar 1 Model Ansell & Gash



Menurut Ansell dan Gash dalam kajian literatur (Astuti dkk, 2020). Prinsip model *Collaborative governance* yang dikembangkan menjadi empat variabel secara terperinci yaitu:

1) Kondisi awal

Kondisi di awal sangat mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjalin yang disebabkan beberapa fenomena, diantaranya adalah para stakeholder memiliki kepentingan atau capaian visi bersama yang diraih, sejarah di masa lampau dalam kerja sama yang pernah terjadi, sehingga saling menghormati kerja sama yang sudah pernah terjalin di masa lalu, bentuk dorongan dan kepercayaan dari masing-masing stakeholders, adanya ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan suatu hal yang sangat penting agar aturan yang jelas dan legitimasi secara prosedur dalam proses kolaborasi dapat sesuai apa yang diharapkan bersama termasuk stakeholder. Hal ini berkaitan dengan strategi dan pedoman penting dalam kerja sama untuk sistem proses upaya bersama yang sah, bagaimana diskusi dibingkai, dan bagaimana adanya kejelasan dalam proses pelaksanaan upaya bersama.

3) Kepemimpinan

Dalam menjalin kolaborasi diperlukannya kepemimpinan sebagai fasilitator yang mampu merangkul, memberdayakan, yang dapat diakui kebenarannya dalam melibatkan para pemangku kepentingan untuk turut serta berpartisipasi. Hal tersebut dikarenakan dalam berkolaborasi sangat mungkin adanya konflik atau perselisihan yang tinggi adanya ketidakpercayaan. Sehingga peranan kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholder, dengan menetapkan pedoman penting yang jelas, serta mediator yang dapat diandalkan dalam memfasilitasi dialog antara stakeholders dan pembagian keuntungan bersama sehingga menghasilkan kolaborasi yang efektif.

4) Proses kolaborasi

Adanya proses kolaborasi merupakan variabel yang sangat penting untuk awal dari proses kolaborasi yang dapat dimulai dari dialog tatap muka yang berorientasi pada lahirnya konsensus sehingga dapat membangun kepercayaan yang baik, saling ketergantungan juga akan meningkatkan komitmen dalam berkolaborasi, dan diperlukan pemangku kepentingan yang mampu mengembangkan pemahaman bersama terkait tujuan yang ingin dicapai secara jelas agar dalam proses kolaborasi yang dijalankan

memiliki dampak hasil secara nyata dan menjadikan dorongan terus menerus dalam membangun kepercayaan dan komitmen sehingga memunculkan rencana strategis selanjutnya.

BAB III

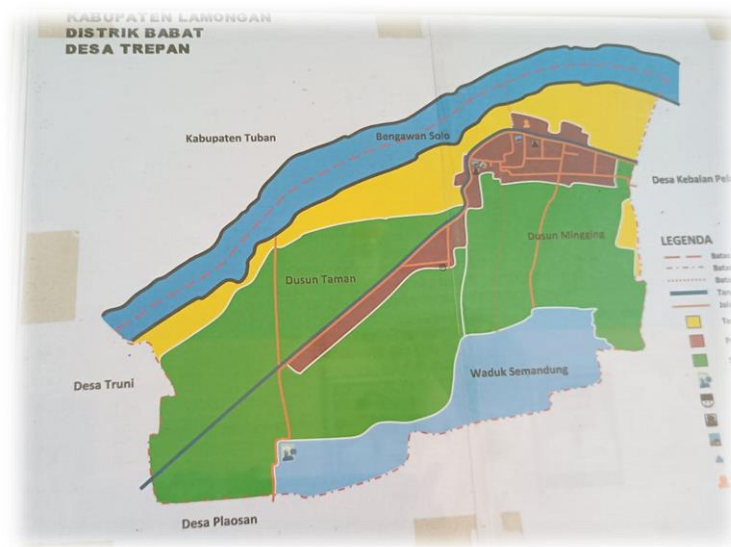
GAMBARAN UMUM PROFIL DESA WISATA KAMPUNG PISANG TREPAN

A. Gambaran Umum Desa Trepan

1. Kondisi Geografis

Desa Trepan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Babat yang berada di wilayah Utara Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Desa Trepan sendiri merupakan desa yang dekat dengan bantaran sungai Bengawan Solo dengan kondisi geografis pada titik kordinat antara $06^{\circ} 52'' 18''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 17' 12''$ Bujur Timur. Luas wilayah Desa Trepan sendiri adalah 188 Ha, dengan ketinggian 9 m di atas permukaan air laut. Jarak desa ke kecamatan sendiri menempuh sejauh 5 Km, sedangkan jarak desa ke kota atau Kabupaten Lamongan menempuh sejauh 27 Km.

Gambar 2 Peta Desa Trepan



Sumber : Pemerintah Desa Trepan

Secara administrative batas-batas Desa Trepan adalah :

Di sebelah Utara : Bengawan Solo
Di sebelah Selatan : Rawa Semando
Di sebelah Barat : Desa Truni Kecamatan Babat
Di sebelah Timur : Desa Kebalanpelang Kecamatan Babat

Luas Wilayah : 188 Ha
Komplek Balai Desa : 1 Ha
Lapangan Olahraga : 1 Ha
Pekarangan : 26 Ha
Tanah Kuburan : 3 Ha
Tanah Ladang : 40 Ha
Tanah Bengkok : 90,6 Ha
Tanah Untuk Jalan : 6 Ha
Sawah Irigasi Teknis : 40 Ha
Sawah Irigasi ½Teknis : 20 Ha
Sawah Tadah Hujan : 80 Ha

Gambar 3 Kantor Pemerintah Desa Trepan



Sumber : Dokumentasi Pribadi (4 Desember 2023)

2. Kondisi Demografis

Desa Trepan secara demografis sendiri merupakan desa yang hanya terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun Gumingging dan Dusun Taman, kependudukannya secara keseluruhan berjumlah 2.289 jiwa meliputi laki-laki-laki 1.143 jiwa, dan perempuan 1.146 jiwa. Desa Trepan sendiri secara mayoritas kependudukannya sebagai seorang muslim dan mata pencahariannya mayoritas sebagai petani. Desa Trepan sendiri telah dikenal dengan “*Agro Heritage Villa*” karena Desa Trepan sendiri identik dengan masyarakat kalangan mayoritas petani yang mampu mengelola pupuk secara mandiri dan memanfaatkan sumber daya alam pisang menjadi produk olahan dan kerajinan tangan dari limbah pisang. Untuk mengetahui lebih rinci dan secara jelas berikut tabel dibawah yang akan dilampirkan terkait jumlah penduduk, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Trepan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	1.143 jiwa
2.	Perempuan	1.146 jiwa
	Jumlah	2289 jiwa
NO	KEPALA KELUARGA	JUMLAH
1.	Laki-Laki	506 kk
2.	Perempuan	109 kk
	Jumlah Keseluruhan	615 kk

Sumber : Monografi Desa Trepan 2023

2.1 Penduduk Desa

Berdasarkan pada tabel diatas, saat ini penduduk desa secara keseluruhan Desa Trepan memiliki jumlah populasi penduduk 2.289 jiwa dengan keterangan laki-laki 1.143 jiwa dan perempuan 1.146 jiwa. Lebih lanjut, kepala keluarga yang ada di Desa Trepan berjumlah 615 KK dengan keterangan laki-laki berjumlah 506 KK sedangkan perempuan 109 KK.

2.2 Penduduk Desa Berdasarkan Agama

Masyarakat Desa Trepan merupakan masyarakat yang mayoritasnya ialah kependudukannya beragama muslim dan merupakan warga yang harmonis dan

saling menjaga toleransi. Hal tersebut juga difaktori dengan tidak banyaknya pendatang yang masuk atau menetap dan tinggal di Desa Trepan dengan agama yang berbeda sehingga mayoritas kependudukannya beragama muslim. Berikut tabel dibawah berdasarkan penganut kepercayaan agama masyarakat Desa Trepan pada tahun 2023 :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	2.287
2	KRISTEN	2 jiwa
3	KATOLIK	0 jiwa
4.	BUDHA	0 jiwa
5.	HINDU	0 jiwa
6.	KONGHUCHU	0 jiwa

Sumber : Monografi Desa Trepan 2023

2.3 Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1	< 1 tahun	49 jiwa
2	1-4 tahun	164 jiwa
3	5-14 tahun	304 jiwa
4.	15-39 tahun	82 jiwa
5.	40-64 tahun	785 jiwa
6.	65 tahun ke atas	158 jiwa

Sumber : Monografi Desa Trepan 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Trepan berdasarkan usia baik pada tingkatan balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Trepan berada di usia produktif antara 15- 64 tahun dengan jumlah total 1.613 jiwa. Sedangkan berdasarkan umur tidak produktif 65 tahun ke atas berjumlah 158 jiwa. Sehingga dapat dipastikan bahwa sebagian besar keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Trepan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada di Desa Trepan dengan dicerminkan keadaan fisik yang masih sehat dan beraktivitas. Seperti

halnya yang disampaikan Suyono dalam (Ukkas, 2017) bahwa usia produktif terletak pada tingkatan usia 15-60 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia yang dianggap masih memiliki kreatifitas yang tinggi sebab masih didukung oleh pengetahuan wawasan yang baik dan luas serta hal tersebut menjadikan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi.

2.4 Keadaan Pendidikan Penduduk

Terkait standar hidup kependudukan di suatu daerah, adanya indikator tingkatan belajar dalam berpendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui gambaran umum secara jelas yang ada di suatu daerah yang ingin diteliti lebih dalam melihat tingkat SDM kualitas penduduk. Produktivitas manusia dapat dilihat dengan tingkatan belajar pendidikan yang ada di masyarakat untuk mengetahui kualitas sumberdayanya. Desa Trepan terdiri dari warga yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai jenjang pada tamatan Perguruan Tinggi.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak / belum sekolah	272
2	Tidak / buta huruf	20
3	Belum tamat SD / sederajat	156
4	Tamat SD	836
5	Tamat SLTP	712
6	Tamat SLTA	684
7	Tamat D1, D2, D3	60
8	Sarjana S-1	55
9	Sarjana S-2	15
10	Sarjana S-3	10

Sumber : Monografi Desa Trepan 2023

Berdasarkan pada table diatas terkait tingkat pendidikan masyarakat Desa Trepan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan warga Desa Trepan masih dibilang cukup rendah karena masih banyaknya warga yang lebih mendominasi tamatan SD dan sebagian juga pada tingkat tamatan SLTA. Menurut MHA. Ridwan dalam penelitiannya, beliau mengatakan bahwa tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi produktivitas wilayah (Yulian,

2021). Dengan hal ini dapat diartikan bahwa produktivitas masyarakat yang ada di Desa Trepan tergolong masih rendah melihat intrespetasi data tabel di atas. Tingginya pendidikan di suatu daerah juga akan menjadi pengaruh pada tingkat produktivitas Sumber Daya Manusia, sehingga pentingnya belajar atau banyaknya tamatan SLTA maupun pada tingkat Perguruan Tinggi sangat berdampak pada masyarakat terkait pentingnya pendidikan serta kesadaran dalam membangun ekonomi di suatu daerah.

2.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Trepan sendiri merupakan desa yang kaya dengan sumber daya alam baik berupa perkebunan maupun areal persawahan yang menjadi sumber pencarian mereka yang tak jauh dari bantaran Bengawan Solo. Banyaknya masyarakat di Desa Trepan berdasarkan tingkat pendidikan yang sudah dijelaskan terkait keadaan pendidikan penduduk disana yang rendah, berdampak juga mempengaruhi rata-rata pencaharian masyarakat Desa Trepan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	LK	PR	Jumlah
1	Petani	550	420	970
2	Nelayan	0	0	0
3	Buruh Tani / Nelayan	407	500	907
4	Buruh Pabrik	115	50	165
5	PNS	9	10	19
6	Pegawai Swasta	75	50	125
7	Wiraswasta / Pedagang	30	28	58
8	TNI	4	0	4
9	POLRI	4	1	5
10	Pegawai swasta	75	50	125
11	Wiraswasta	30	28	58
12	TNI	4	0	4
13	POLRI	4	1	5
14	Dokter	0	0	0
15	Bidan	0	1	1
16	Perawat	1	1	2
17	Lainnya	25	5	30

Sumber: Monografi Desa Trepan 2023

Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan di atas maka dapat dilihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Trepan, bahwasannya sumber pencaharian masyarakat terbanyak lebih pada pekerjaan menjadi petani atau buruh tani dengan keterangan jumlah petani 470 orang, sedangkan buruh tani berjumlah 907 orang.

3. Profil Pemerintah Desa Trepan

a) Visi & Misi Pemerintah Desa Trepan

Adanya visi dan misi pemerintah desa merupakan impian dan harapan yang ingin dicapai oleh kepala desa dan juga perangkatnya dalam rencana waktu yang panjang untuk membangun pemerintah desa yang berintegritas dan memakmurkan masyarakatnya. Adapun visi dari Desa Trepan sendiri ialah “Mewujudkan Desa Trepan menuju masyarakat yg toleran, adil, makmur, sejahtera, berkarakter dan berbudaya serta berakhlak”. Terkait misi dari Pemerintah Desa Trepan sebagai pendukung capaian visi, maka misi dari Pemerintah Desa Trepan diantaranya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dan mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa.
2. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan sektor yang terencana, terarah dan berkelanjutan.
3. Peningkatan atau optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui 5 S, SENYUM, SALAM, SAPA SOPAN dan SANTUN
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, ramah guyub dan rukun.
5. Menjaga serta meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat
6. Mendorong kreatifitas generasi muda melalui karang taruna desa, dusun dan dukuh serta memaksimalkan kegiatan organisasi, lembaga, olahraga, seni budaya dengan membangun fasilitas yg representatif secara bertahap dan berkelanjutan.

b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi yang ada di Pemerintah Desa Trepan diantaranya terdiri dari 9 (sembilan) bidang yang sudah memiliki tugas pokok masing-masing sesuai bidangnya. Adapun untuk mengetahui struktur organisasi Pemerintah Desa Trepan adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Asikin

Sekretaris Desa : Ely Nur Khomsyi A. S.pd

Kaur Keuangan	: Karmono
Kaur Perencanaan	: Hadi Wibowo
Kasi Pemerintah	: Suraja
Kasi Kesejahteraan	: Ahmad Zainuri
Kasi Pelayanan	: Mardiono
Kepala Dusun Taman	: Sri Wulandari
Kepala Dusun Mingging	: Mi'an Subiantoro

B. Gambaran Desa Wisata Kampung Pisang Trepan

Kampung Pisang Trepan adalah desa wisata yang dikenal dengan kultur budaya masyarakat desa dan memanfaatkan banyaknya tumbuhan pohon pisang yang ada disekitar perkebunan warga dan sekitaran Bantaran Bengawan Solo untuk dijadikan destinasi desa wisata. Kampung Pisang sendiri berdekatan langsung dengan 2 desa dari sisi Barat berdekatan dengan Desa Truni. Sedangkan dari sisi Timur berdekatan dengan Desa Kebalanpelang. Letak wilayah Kampung Pisang Trepan sendiri dibidang sangat strategis untuk berkunjung bagi wisatawan karena dekat dengan jalan raya arah Babat-Lamongan yang memudahkan akses untuk berkunjung. Desa Trepan sendiri juga masih berdekatan di lingkup kawasan 1 ring dengan PT. Petrokimia di bidang instalasi air yang turut membantu dan mendorong terbentuknya Desa Wisata Kampung Pisang Trepan dengan program CSR Petrokimia Gresik dalam hubungan jalinan kerja sama.

Kampung Pisang Trepan menjadi penciri khas warga lokal karena keaslian dan aktivitas kultur budaya masyarakat Desa Trepan yang ada di sana dengan banyaknya persawahan yang dikelilingi pohon pisang pada lahan sekitar 40 hektar yang dapat dimanfaatkan warga Desa Trepan menjadi sumber penghasilan warga dengan kreativitasnya dalam membuat kerajinan dan olahan makanan dari pohon pisang yang kebanyakan penduduknya mayoritas bermata pencahariannya sebagai petani. Selain itu, banyaknya tanaman pohon pisang yang berada di perkebunan warga dan sekitaran lahan persawahan Desa Trepan dengan keadaan tanah yang subur dan berdekatan langsung dengan sumber air Bengawan Solo juga menjadikan Desa Trepan dijuluki dengan sebutan Kampung Pisang Trepan.

Gambar 4 Pintu Masuk Desa Trepan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5 Denah Kampung Pisang Trepan



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Kampung Pisang Trepan merupakan wisata edukasi yang menawarkan berbagai hal keaslian aktivitas masyarakat Desa Trepan dalam hal menanam pohon pisang, pembuatan pupuk kompos dari kotoran hewan, dan memanfaatkan tanaman pohon pisang yang dapat dikelola berbagai macam olahan baik dari buah, daun pisang, batang pisang, dan jantung pisang yang menghasilkan macam produk makanan dan kerajinan tangan yang dikembangkan oleh kelompok UMKM Desa Trepan. Selain itu, banyaknya tanaman pohon pisang yang ada di desa, juga ditanami tanaman multikultur berupa tanaman bawang yang mudah dikerjakan

oleh para petani. Tanaman bawang yang dijadikan alternatif bagi para petani juga akibat kegagalan menanam pohon pisang yang terkena penyakit fusarium di kebun percobaan. Sehingga lahan kebun percobaan yang seharusnya di tanami pohon pisang, kemudian di revitalisasi oleh GAPOKTAN dengan cara dibakar tanaman pisang yang terkena penyakit dan dinetralkan dengan cara di jemur selama 3 sampai 5 bulan yang kemudian lahan tersebut dikelola kembali dan diubah menjadi kebun percobaan tanaman multikultur seperti tanaman bawang.

Gambar 6 Perkebunan Pisang Trepan



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 7 Kebun Percobaan Kampung Pisang



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Tanaman pohon pisang yang mudah ditanam oleh kebanyakan kalangan masyarakat Desa Trepan, juga dapat dimanfaatkan sebagai nilai sumber pencaharian sampingan dengan keanekaragaman tumbuhan pohon pisang. Hal

tersebut dapat dikelola menjadi kerajinan tangan dan makanan ringan baik itu berupa cemilan keripik pisang, keripik debok, samprong, sambel pisang, susu dawet dengan pewarna dari daun pisang dan semua itu semua di kelola oleh kelompok usaha bersana pelaku UMKM Desa Trepan yang menghasilkan produk Ibana Craft berupa kerajinan tangan, Kennes Cake berupa kue basah maupun kering, Sambel Manoorra yang bahan dasarnya dari buah pisang, Sahitya makanan ringan semprong, dan keripik pisang Wak Menok.

Produk-produk yang dihasilkan dari para pelaku UMKM Desa Trepan sendiri telah banyak dikirim di berbagai daerah termasuk di Pulau luar Jawa seperti daerah NTT, Maluku, Papua dan daerah Sumatra yang mencoba keunikan produk dari masyarakat Desa Trepan. Baik dari kerajinan tangan maupun makanan ringan dari buah pisang dan batang pohon pisang yang juga dapat dimanfaatkan menjadi makanan bagi masyarakat Desa Trepan. Produk yang terdiri dari Ibana craft, Kennes cake, Sambel Manoorra, dan Semprong pisang menjadi daya tarik wisatawan untuk belajar mengenai cara pemanfaatan limbah pisang dan tanaman pohon pisang agar dapat menjadi sumber penghasilan dengan kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trepan yang memanfaatkan kekayaan alam dari tanaman pohon pisang.

Gambar 8 Kerajinan Pelepah Pisang



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 9 Produk UMKM Desa Trepan



Sumber : Ibu Rina

Produk-produk UMKM Desa Trepan yang menjual berbagai macam jenis makanan yang berdasar pohon pisang juga telah banyak di jual baik secara pasar online maupun offline dengan pengemasan yang sudah berlabelkan standart halal. Selain itu, harga yang diperjuangkan di pasaran masih terbilang terjangkau dengan standart harga dari Rp 5.000,00 sampai Rp 125.000,00 yang sudah di patok harga dari pelaku UMKM Desa Trepan baik dari makanan maupun kerajinan pelepah pisang. Setiap kegiatan yang ada di pemerintah desa, pemerintah juga selalu memperkenalkan produk-produk pelaku UMKM Desa Trepan sebagai penciri khas Desa Trepan sebagai Kampung Pisang.

Selanjutnya, Desa Trepan yang dikenal dengan julukan Kampung Pisang Trepan selalu menarik wisatawan untuk berkunjung dan ingin banyak belajar dari para kelompok pelaku UMKM Desa Trepan yang memanfaatkan pohon pisang yang dapat dikelola menjadi sumber penghasilan. Adapun desa wisata kampung pisang juga dikelola oleh POKDARWIS Trepan di bawah naungan pemerintah desa untuk mengatur dan membuat branding di media sosial yang berkaitan dengan

Desa Trepan sebagai wisata edukasi dengan kultur dan keaslian desa memanfaatkan kekayaan alam dari pohon pisang.

POKDARWIS Kampung Pisang Trepan sendiri merupakan lembaga yang di bentuk oleh Pemerintah Desa Trepan untuk merencanakan dan mengelola serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala Desa Trepan. Adanya POKDARWIS di Desa Trepan juga untuk mendukung terkait pengembangan desa wisata yang ada di Desa Trepan serta meningkatkan potensi wisata yang ada di desa. Berdirinya POKDARWIS Trepan Agritage juga difaktori dorongan dari para kelompok baik dari (GAPOKTAN) gerakan kelompok tani dan pelaku UMKM Trepan agar dibentuknya kepengurusan dan pengelolaan desa wisata agar dapat dikelola secara mandiri dan terus berkembang. Sehingga Pemerintah Desa Trepan membentuk pengurus kelompok sadar wisata “Trepan Agro Heritage Village”. Struktur kepengurusan Desa Wisata Kampung Pisang Trepan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketua : Khoirul Amin
- 2) Sekretaris : Rohim A.R
- 3) Bendahara : Mariadi
- 4) Div. Pengembangan Wisata : Bagas P, Maskuri, Edi Utomo
- 5) Div. Promosi : Khoiron, Karno, Aris
- 6) Div. Media Sosial : Widia, Isnan, Alifatin, Amir
- 7) Div Pengembangan UMKM : Rina, Indah, Surojo, Kiswo
- 8) Div. Pengolahan Limbah Ternak: Supardi, Hadi Wibowo

Kampung Pisang Trepan biasanya di kunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan kebanyakan sering dikunjungi dari kalangan mahasiswa, anak sekolah dan kelompok kerajinan lainnya yang datang di Desa Trepan untuk belajar secara langsung memanfaatkan limbah pisang, buah pisang , batang pohon pisang dan memahami kultur budaya masyarakat Desa Trepan dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. Untuk dapat belajar dan memahami kultur masyarakat Desa Trepan secara langsung biasanya ketua regu atau ketua kelompok harus menghubungi ketua POKDARWIS Desa Trepan terlebih dahulu sebelum kedatangan rombongan. Adanya laporan untuk kunjungan agar dari tim POKDARWIS dapat menyusun agenda dan mengatur regu rombongan untuk belajar banyak hal, baik dari kerajinan tangan Dengan limbah pohon pisang,

pembuatan sambal dari buah pisang, serta aktivitas warga yang identik dengan Trepan Agritage Village yang juga mencari pohon pisang untuk dikelola serta pembuatan pupuk kompos dari kotoran hewan yang dikelola langsung oleh masyarakat Desa Trepan

BAB IV

DINAMIKA KERJA SAMA DESA TREPAN DENGAN CSR PETROKIMIA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG PISANG

Salah satu upaya Pemerintah Desa Trepan agar mampu memberdayakan masyarakatnya untuk bisa tampil kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam pohon pisang yang ada di Desa Trepan ialah dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR Petrokimia Gresik. Hal tersebut dilakukan atas dasar kesamaan yang ingin diraih dalam mencapai tujuan bersama dimana pemerintah desa ingin adanya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata dapat membantu taraf perekonomian masyarakat Desa Trepan yang didukung dengan adanya Perda Jatim No. 4 Tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata. Sedangkan dari program CSR Petrokimia sendiri mendorong untuk kemandirian masyarakat desa serta tanggung jawab bagi perusahaan akibat dampak perusahaan yang berdekatan langsung di lingkungan masyarakat serta dalam upaya mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan Pemerintah Desa Trepan untuk saling berkordinasi dan peran pemerintah sebagai mediator penghubung dengan masyarakat Desa Trepan.

Jalinan kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Trepan secara keadaan memiliki kekayaan alam yang subur dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi desa wisata. Selain itu, Desa Trepan yang masih berada satu kawasan atau 1 ring dengan PT. Petrokimia Gresik di bidang instalasi air memudahkan Pemerintah Desa Trepan untuk menjalin kerja sama dengan pihak PT. Petrokimia Gresik melalui wadah CSR Petrokimia Gresik. Dalam pembahasan terkait dinamika kerja sama ini, penulis akan membagikan hasil temuan dengan menggunakan teori dari Ansell & Gash (2007) terkait *collaborative governance*.

Dalam penelitian mengenai latar belakang kerja sama yang terjadi pada Desa Trepan saat ini, peneliti menggunakan model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) untuk mengetahui kondisi awal kerja sama dilakukan dan dinamika kerja sama itu terjalin.

A. Kondisi Awal Desa Trepan

Kondisi awal merupakan sebagai awal mula proses kerja sama itu dibangun dan sebagai awal hubungan kondisi itu terjalin dengan melibatkan berbagai macam pihak yang saling kebergantungan satu sama lain. Terutama keadaan yang menggambarkan masalah yang sedang terjadi. Menurut (Ansell &

Gash, 2007) ada 3 indikator terjalannya kerja sama dari masing-masing para pemangku kepentingan antara lain ketidakseimbangan sumber daya pengetahuan, adanya dorongan berpartisipasi (motivasi) yang jelas, dan kendala pemangku kepentingan yang tidak mampu menangani masalah yang ada (Konflik).

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik sendiri memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diraih dengan tujuan yang sama, dimana Pemerintah Desa Trepan memiliki keterbatasan memberdayakan warganya, sedangkan dari pihak CSR Petrokimia Gresik mempunyai program *Community Development* yang harus dikerjakan dan program tersebut diberikan karena masih 1 kawasan dengan PT. Petrokimia Gresik salah satunya Desa Trepan atas dampak perusahaan kepada masyarakat Desa Trepan. Kerja sama yang dibangun juga melibatkan kelompok masyarakat Desa Trepan sebagai sasaran penerima manfaat bantuan yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik dengan melihat Desa Trepan memiliki potensi kekayaan alam melalui pohon pisang untuk dikembangkan dan diberdayakan. Kekayaan alam yang dimiliki Desa Trepan dengan banyaknya pohon pisang langsung dibantu masuknya CSR Petrokimia Gresik untuk melakukan *social mapping* untuk memberikan program yang bisa diberikan dan penggalian potensi desa. Salah satunya ialah membuat program kampung pisang.

Hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membagikan temuan terkait dinamika kerja sama itu terbentuk terkait pengembangan desa wisata yang melibatkan Pemerintah Desa Trepan, CSR Petrokimia Gresik dan kelompok sosial masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pemerintah Desa Trepan Memberdayakan Masyarakat

Dalam hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, Desa Trepan tergolong kependudukan masyarakatnya mayoritas pekerjaannya ialah sebagai petani dengan data pekerja 470 orang sedangkan sebagai buruh tani 907 orang. Banyaknya tanaman pohon pisang yang ada di Desa Trepan hanya mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diambil buahnya saja dan banyaknya limbah pohon pisang yang terbengkalai tidak mampu dimanfaatkan masyarakat Desa Trepan dengan batasan pengetahuan yang dimiliki warga.

Desa Trepan yang masih tergolong 1 ring dengan PT. Petrokimia Gresik di bidang instalasi air turut memberikan bantuan insentif dengan masuknya CSR Petrokimia Gresik di Pemerintah Desa Trepan dengan menawarkan kerja

sama dalam hal pemberdayaan pelatihan memanfaatkan tanaman pohon pisang kepada masyarakat Desa Trepan setelah dilakukan riset oleh tim peneliti CSR Petrokimia Gresik agar membantu kemandirian masyarakat desa. Hal itu, disambut baik oleh Pemerintah Desa Trepan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah desa yang tidak mampu memberdayakan warganya serta adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan menggali potensi desa agar dijadikan destinasi desa wisata yang membuat kerja sama itu dimulai. Kerja sama awal yang dibuat antara Pemerintah Desa Trepan dengan pihak CSR yang hanya mempertemukan Kepala Desa Trepan dengan pihak CSR kemudian juga melibatkan masyarakat terutama (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani Desa Trepan yang mayoritas masyarakat Desa Trepan berprofesi sebagai petani sebagai pelaksana program yang dimiliki CSR Petrokimia Gresik.

“ Sejarah awal mula terjalinnya Pemerintah Desa Trepan dengan CSR.Petrokimia Gresik ialah dilihat adanya potensi Desa Trepan untuk dikembangkan menjadi desa wisata kampung pisang karena keadaan kondisi banyaknya pohon pisang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan pemerintah ingin potensi desa dapat dimanfaatkan menjadi desa wisata kampung pisang dan dikembangkan dengan masuknya CSR di Pemerintahan Desa Trepan yang masih 1 ring dengan Desa Trepan, serta pemerintah desa juga ingin masyarakatnya untuk diberdayakan agar dapat membantu taraf perekonomian masyarakat yang lebih maju dengan adanya desa wisata kampung pisang. Dan itu juga sudah dilakukan oleh pihak CSR Petrokimia Gresik setelah melakukan riset social mapping adanya potensi untuk dijadikan desa kampung pisang serta adanya rasa tanggung jawab perusahaan Petrokimia Gresik yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta kemandirian desa. Hal itu dilakukan kerja sama karena pemerintah desa keterbatasan biaya karena tidak mampu memberdayakan masyarakat”. (Wawancara dengan Djuwoto, 4 Desember 2023).

Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Djuwoto selaku mantan Kepala Desa Trepan juga dibenarkan oleh penuturan Bapak Karmono selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Trepan diantaranya sebagai berikut:

“Memang benar mas, bahwa sejarah adanya destinasi desa wisata Kampung Pisang Trepan ini juga berawal dari keinginan pemerintah desa yang ingin menggali potensi desa wisata dengan masuknya CSR yang menawarkan program bantuan untuk melakukan pengembangan desa wisata dengan program kampung pisang dengan bertemunya Pak Kades Djuwoto dan pihak CSR di Kantor Kepala Desa Trepan. Adanya destinasi desa wisata juga memang anjuran dari pusat, apalagi Bapak Yuhronur

Effendi selaku Bupati Lamongan pernah berkunjung di Desa Trepan untuk memberikan arahan untuk segera menggali potensi desa dan membuat destinasi desa wisata saat kunjungan hadir di acara Haul makam Mbah Surogupito yang termasuk leluhur Desa Trepan”(Wawancara dengan Karmono, 8 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djuwoto yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Trepan dan Bapak Karmono selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Trepan, adanya kerja sama antara Pemerintah Desa Trepan dengan pihak CSR Petrokimia Gresik di faktori dengan keadaan Pemerintah Desa Trepan yang tidak mampu memberdayakan warganya. Ketidakmampuan Pemerintah Desa Trepan dalam memberdayakan masyarakat Desa Trepan kemudian dibantu dengan masuknya pihak CSR Petrokimia Gresik yang sudah melakukan riset mapping dengan adanya potensi desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan menawarkan program bantuan pemberdayaan masyarakat karena Desa Trepan masih 1 lingkup dengan perusahaan PT. Petrokimia Gresik bidang instalasi air. Hal ini juga dibenarkan oleh informasi yang disampaikan perwakilan pihak CSR Petrokimia Gresik sebagai berikut :

“Jalinan kerja sama dengan pemerintah desa diharapkan menjadi *engagement* timbal balik yang saling kebergantungan bagi perusahaan, terutama peran dan tanggung jawab CSR kepada masyarakat untuk membantu kesejahteraan masyarakat Desa Trepan serta memudahkan kami dari pihak CSR untuk lebih komunikatif berinteraksi dengan masyarakat desa”. (Wawancara perwakilan CSR, 11 Desember 2023).

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak CSR Petrokimia Gresik dengan Pemerintah Desa Trepan juga sebagai *engagement* bagi perusahaan untuk timbal balik yang saling kebergantungan terutama tanggung jawab CSR Petrokimia Gresik kepada masyarakat Desa Trepan akibat dampak perusahaan yang masih berada di kawasan lingkungan Desa Trepan. Hal tersebut yang menjadikan Bapak Djuwoto selaku kepala desa memberikan izin masuknya tim CSR Petrokimia Gresik dengan program yang dibawah agar dapat membantu Pemerintah Desa Trepan dalam memberdayakan masyarakat Desa Trepan. Sehingga pihak CSR Petrokimia Gresik lebih mudah berinteraksi kepada masyarakat, terkhusus kelompok tani dan pemuda-pemudi Desa Trepan yang juga menjadi sasaran program sasaran.

Hal tersebut dibenarkan Bapak Mariadi selaku ketua kelompok tani dan Ibu Rina sebagai masyarakat Desa Trepan yang mendapatkan program pemberdayaan pelatihan pemanfaatan pohon pisang. Dalam hasil wawancaranya beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Sejarah awal, pihak CSR dulu masuk keliling di Desa Trepan dan menawarkan program kampung pisang dan hanya memberikan bibit saja kepada GAPOKTAN. Untuk aksinya juga dikerjakan semua oleh (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani.”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Hal serupa juga disampaikan Ibu Rina sebagai masyarakat Desa Trepan yang mendapatkan program pemberdayaan dari CSR Petrokimia Gresik, dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:


“ Dulu pihak CSR masuk ke desa memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga, ada yang belajar pemanfaatan limbah pisang, membuat cake, semprong, sambal serta dibuatkannya UMKM”. (Wawancara dengan Rina 11 Desember 2023)

Setelah pihak CSR Petrokimia Gresik yang memohon izin untuk masuk ke Desa Trepan kepada Kepala Desa Trepan. Bapak Djuwoto selaku pemimpin desa memberikan izin kepada CSR untuk mudah berinteraksi dengan warganya mengingat program yang dibawah CSR Petrokimia Gresik dapat membantu pemerintah desa dengan keterbatasan yang dimiliki. Interaksi CSR Petrokimia Gresik kepada masyarakat dalam menjalankan program langsung diberikan dengan pelatihan pemberdayaan pemanfaatan pohon pisang kepada masyarakat dan bantuan bibit pohon pisang untuk kelompok tani. Selain itu, adanya dorongan dari pemerintah pusat dan kunjungan Bupati Lamongan Bapak Yuhronur Effendi yang pernah datang di Desa Trepan pada saat acara Haul leluhur Desa Trepan di Makam Mbah Surogupito beliau juga menghimbau untuk Desa Trepan agar dijadikan desa wisata.

Hal ini juga diperkuat adanya dukungan dan anjuran Bupati Lamongan Yuhronur Effendi melalui program Gerakan Membangun Pariwisata Ramah Dan Terintegrasi (Ramasinta) setelah pasca wabah Covid-19 (Kusbiantoro, 2021). Pemerintah Desa Trepan yang juga memiliki kewenangan pada aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memiliki hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat dan di dukung adanya Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 4 tahun 2022 terkait pemberdayaan desa wisata,

dimana pemerintah daerah telah memberikan ruang bagi desa untuk menggali potensi yang ada di desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya masyarakat. Sehingga dengan keterbatasan pemerintah desa, masuknya CSR Petrokimia Gresik dilihat dari keadaan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.

Gambar 10 RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan



	RPJMN 2020-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Prioritas Pembangunan	Arahan Presiden:	Program Prioritas
	Pembangunan SDM.	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin) Lamongan sehat Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Infrastruktur	JAMULA (Jalan Mantap dan alus Lamongan) Yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pengendalian dan penanganan Banjir dan pembangunan jalan pertanian serta ketersediaan air baku.
	Transformasi Ekonomi	YES (Young Enterprneur Succes) RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) YES (Yakin Semua Sejahtera)
	Penyederhanaan Regulasi	100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
	Penyederhanaan Birokrasi	Peningkatan Kualitas Manajemen ASN

Sumber : Pemkab.Lamongan.go.id

Dalam teori Ansell & Gash (2007), dijelaskan bahwa kondisi awal dalam melakukan kerja sama bisa menjadi pendukung atau penghambat pada proses jalinan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia menunjukkan bahwa adanya sikap saling kebergantungan baik dari Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik yang memiliki tujuan masing-masing yang ingin diraih dan diperlukan kolaborasi bersama. Keterbatasan Pemerintah Desa Trepan yang tidak mampu memberikan program pemberdayaan masyarakat menjadikan hubungan kerja sama itu dimulai dengan masuknya CSR Petrokimia Gresik yang menawarkan program pemberdayaan *Community Development*. Pemerintah Desa Trepan yang memiliki potensi kekayaan alam tapi tidak bisa memberdayakan warganya menjadikan adanya potensi dimanfaatkan kepada pemangku kepentingan yang lebih kuat yang mampu memberdayakan masyarakat Desa Trepan.

Hal tersebut seperti disampaikan dalam teorinya Ansell & Gash, bila pemangku kepentingan dari kapasitas organisasi atau sumber daya yang lemah, akan mungkin terjadi pada proses kolaborasi yang dilakukan menghasilkan komitmen yang lemah (Ansell & Gash, 2007). Pernyataan tersebut dapat ditandai dengan sikap masyarakat yang hanya melihat masuknya CSR Petrokimia Gresik memberikan pengaruh pada program yang dibawah tanpa mengetahui terkait masuknya pihak swasta ada peran dibalik keterlibatan Pemerintah Desa Trepan yang memberikan izin masuk untuk berinteraksi dengan mereka. Dalam konteks kajian, pengaruh CSR Petrokimia Gresik yang memiliki sumber daya dan kapasitas berpartisipasi dengan keterbatasan Pemerintah Desa Trepan yang belum memberdayakan warganya, mejadikan hubungan kerja sama itu dapat dilakukan mengingat para pemangku kepentingan yang terlibat juga menunjukkan sikap yang saling bergantung ditengah Pemerintah Desa Trepan yang belum bisa menangani masalah terkait pemberdayaan dan penggalan potensi desa.

Hal tersebut juga diperkuat pada penelitian sebelumnya oleh Junaidi (2015) dalam jurnal Alamsyah dkk (2019) bahwa adahannya dorongan kerja sama atau *collaborative governance* tidak datang secara tiba-tiba, melainkan ada dorongan insiatif dari berbagai pihak akibat masalah publik yang sedang dihadapi. Sehingga hubungan kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan memiliki kepentingan bersama yang ingin dicapai dengan tujuan berbeda dengan keterbatasan Pemerintah Desa Trepan

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan karena adanya hubungan mitra kerja yang saling bergantung mengingat perusahaan Petrokimia bidang instalasi air yang masih berada 1 kawasan dengan Desa Trepan dan adanya masalah Pemerintah Desa Trepan yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk pemberdayaan masyarakat Desa Trepan.

2. Keinginan Masyarakat Meningkatkan Sumber Penghasilan

Keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Desa Trepan dalam memberdayakan warganya menjadi masalah yang diperlukan penanganan bersama dalam menggali potensi desa yang diingkan Pemerintah Desa Trepan. Keterlibatan CSR Petrokimia Gresik yang juga memiliki program *Community Development* memotivasi masyarakat untuk ikut terlibat karena keinginan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghasilan dan sumber daya pengatuan dalam memajukan Desa Trepan untuk menciptakan desa wisata.

Adanya keterbatasan Pemerintah Desa Trepan yang tidak pernah memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat serta kepedulian kepada kelompok tani menjadikan kelompok masyarakat turut andil untuk berpartisipasi melakukan kerja sama dengan pihak CSR Petrokimia Gresik. Bantuan program pemberdayaan dan bantuan bibit pisang kepada kelompok tani yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik merupakan dorongan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf pendapatan warga Desa Trepan. Masuknya CSR Petrokimia Gresik di Desa Trepan juga mendapat respon positif dari kalangan masyarakat dan hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Rina sebagai masyarakat yang memperoleh bantuan dan menjadi pelaku kelompok UMKM Desa Trepan yang ikut terlibat pengembangan desa wisata.

“Keikutsertaan masyarakat yang diajarkan pihak CSR memiliki keinginan belajar lebih banyak untuk memanfaatkan pohon pisang, apalagi disini buah pisang 1 tandan pun cuma harga Rp. 30.000 kalau di jual. Lambat laun setelah diberikannya pelatihan, masyarakat ada yang merasa cukup dan dimanfaatkan sendiri ilmunya di rumah, ada yang masih mau mengikuti program CSR hingga ditetapkannya anggota kelompok untuk pelaku dan dibuatkannya UMKM dengan binaan CSR Petrokimia untuk mendukung program pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan”. (Wawancara dengan Rina 11 Desember 2023)

Dorongan dan keterlibatan partisipasi masyarakat yang mau mengikuti program CSR merupakan tujuan belajar untuk memperoleh sumber pengetahuan dalam memanfaatkan pohon pisang yang menjadi ciri khas sebagai Desa Trepan. Selain itu, keinginan masyarakat dengan mengikuti pelatihan pemberdayaan pemanfaatan pohon pisang juga untuk meningkatkan nilai jual buah pisang mengingat harga 1 tandannya hanya berkisar harga Rp.30.000 saat dijual. Dengan adanya pelatihan pemberdayaan yang diberikan CSR Petrokimia Gresik kepada warga, lambat laun masyarakat menggunakan pengetahuannya untuk di praktekan mandiri di rumah secara pribadi dan masih ada yang ingin ikut bergabung dengan CSR Petrokimia Gresik hingga dibuatkannya kelompok pelaku UMKM binaan CSR Petrokimia Gresik sebagai pendukung untuk menjalankan program Kampung Pisang Trepan dan menjadi aktor yang terlibat dalam hubungan kerja sama mengembangkan desa wisata.

Masyarakat yang juga ingin memanfaatkan situasi masuknya CSR Petrokimia Gresik ke Desa Trepan sebagai bentuk motivasi yang jelas bagi

warga desa mengingat Pemerintah Desa Trepan kurang memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat dan perhatian kepada kelompok tani. Hal ini disampaikan langsung oleh Amin sebagai masyarakat Desa Trepan yang juga mendapatkan program bantuan CSR dan terlibat pada proses kerja sama mengembangkan desa wisata.

“ Memang pemerintah desa tidak bisa memberikan andil banyak bagi warganya dari dulu, sehingga adanya CSR memotivasi yang lain untuk ikut terlibat terutama para kelompok masyarakat yang ada di Desa Trepan dan para petani Desa Trepan melihat adanya program yang ditawarkan dari pihak CSR sangat memungkinkan menciptakan sebuah inovasi baru dan tentunya bagaimana CSR dan pemerintah desa saling berkesinambungan ”. (Wawancara dengan Amin 7 Desember 2023)

Hal serupa juga disampaikan Bapak Mariadi yang merasa bahwa Pemerintah Desa Trepan kurang memperhatikan kebutuhan para petani dan pemberdayaan kepada masyarakat. Berdasarkan keterangannya beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ Pemerintah Desa Trepan dulu itu enggak mengenal kelompok tani blas sama sekali, pemerintah desa aja gak tahu apa yang menjadi kebutuhan para kelompok tani, pemberdayaan kepada masyarakat juga gak pernah dilakukan. Sehingga, masuknya CSR Petro ini dapat antusias warga adanya program yang ditawarkan kepada kelompok tani dan masyarakat lainnya yang memperoleh bantuan pemberdayaan dari CSR ”.
(Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Kurangnya perhatian pemerintah desa kepada kelompok tani dan tidak pernah memperhatikan kebutuhan yang sedang dialami para petani menjadikan dorongan motivasi para kelompok tani mau ikut berpartisipasi bekerja sama dengan masuknya CSR Petrokimia Gresik memberikan bibit pohon pisang dan pelatihan pemberdayaan pemanfaatan pohon pisang kepada kelompok tani dan social masyarakat yang lain. Keterlibatan kelompok masyarakat yang mau ikut berpartisipasi membuka peluang untuk meningkatkan sumber daya pengetahuan dan sumber daya penghasilan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dimana CSR memiliki program yang harus dijalankan, sedangkan dari masyarakat desa dapat terbantu dengan diberdayakannya oleh pihak CSR Petrokimia Gresik, mengingat hal tersebut kurang dilakukan kepada pemerintah Desa Trepan.

Hal ini disampaikan Ibu Indah sebagai warga Desa Trepan yang juga menginginkan program pemberdayaan yang dibawah CSR Petrokimia Gresik sebagai berikut:

“ Pihak CSR dulu itu masuk ke desa mas, diajak dan ditawarkan program pelatihan pemberdayaan yang diambil 10 orang dusun mingging dan 10 orang dusun taman untuk diberikan pelatihan pemanfaatan pohon pisang. Saya yang mengetahui hal itu langsung ingin terlibat karena adanya pelatihan pemberdayaan juga sebagai wawasan saya dan siapa tahu bisa membuat makanan yang mapu dikembangkan untul dijual. Pada saat itu dulu dapat info dari mas Amin”. (Wawancara dengan Indah, 14 Desember 2023)

Masuknya program yang dibawah CSR Petrokimia Gresik ternyata diambil 10 orang dari Dusun Gumingging dan 10 orang dari Dusun Taman untuk diberikan pelatihan pemberdayaan. Adanya pelatihan pemberdayaan juga disambut positif sebagian warga yang mengetahui adanya program pelatihan pemberdayaan yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik untuk menggali potensi desa dan dikembangkan menjadi desa wisata.

Pada penjelasan diatas informasi yang ditemukan oleh peneliti menunjukan bahwa adanya dorongan jalinan kerja sama dengan keterlibatan kelompok masyarakat karena dorongan motivasi yang jelas untuk meningkatkan sumber penghasilan dan kurangnya kepedulian pemerintah desa kepada kelompok tani. Selain itu, keterbatasan sumber daya masyarakat juga menjadi faktor pendukung kelompok masyarakat ingin ikut terlibat untuk andil melakukan kerja sama dalam mengembangkan desa wisata.

Dalam teori Ansell & Gash (2007), adanya ketidakseimbangan sumber daya akan mempengaruhi insentif kelompok untuk terlibat. Dalam konteks kajian ini, adanya dorongan motivasi dari CSR Petrokimia Gresik juga didasari dengan kapasitas sumber daya masyarakat yang masih rendah serta pengetahuan masyarakat yang belum dimiliki terkait pemanfaatan pohon pisang menjadi sumber penghasilan dan menggali memanfaatkan potensi desa. Sikap antusiasme warga desa dengan masuknya CSR Petrokimia Gresik menjadikan motivasi bersama karena program yang diberikan juga perlu adanya dukungan keterlibatan dari semua pihak yang ingin ikut terlibat. Hal ini seperti disampaikan pihak CSR Petrokimia sebagai berikut:

“Adanya program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pihak kami yang bisa menentukan keberhasilan ialah masyarakat Desa Trepan

sendiri yang mau ikut bergabung bersama kami, seperti pak Mariadi yang mau ikut terlibat dan berusaha menjalankan program dengan mengajak para petani”. (Wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, 8 Desember 2023)

Kerja sama yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dalam program pemberdayaan pelatihan pohon pisang dari pihak CSR juga menginginkan untuk turut andil bersama menggali potensi desa dan keberhasilan program juga yang menentukan ialah partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori Ansell & Gash (2007), apabila ada dorongan insentif partisipasi yang menunjukkan sikap saling kebergantungan dengan pemangku kepentingan yang lain, partisipasi dalam tata kelola kolaborasi untuk banyak terlibat akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan keinginan dari pihak CSR Petrokimia yang juga menginginkan untuk banyak keterlibatan dari masyarakat untuk keberhasilan program yang dibawah CSR Petrokimia Gresik. Partisipasi dari masyarakat Desa Trepan juga di dorong untuk meningkatkan sumber mata pencaharian dengan mengikuti pelatihan pemberdayaan yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik. Hal tersebut yang mendorong masyarakat Desa Trepan juga ingin ikut andil membangun bersama mengembangkan potensi desa dan menaikkan taraf hidup dengan saling berbagi peran dalam hubungan kerja sama, karena *collaborative governance* juga dimaknai sebagai struktur manajemen kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara konstruktif di seluruh lembaga publik baik dari tingkat pemerintah, swasta dan warga sipil untuk melaksanakan kepentingan bersama (Emerson, dkk 2012).

Menurut Ervianti dalam Molla (2022), bahwa sumber daya menjadi permasalahan pada setiap kegiatan dan untuk memberikan pengaruh sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya manusia lainnya diperlukan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan. Melihat keterbatasan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki masyarakat Desa Trepan, dorongan partisipasi warga untuk meningkatkan sumber penghasilan menjadikan kolaborasi itu dilakukan.

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kondisi awal keterlibatan kerja sama yang melibatkan kelompok masyarakat juga didasarkan dengan keinginan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghasilan dengan keterbatasan sumber daya pengetahuan yang dimiliki

warga desa. Sehingga hal tersebut mendorong kelompok social masyarakat ikut berpartisipasi kerja sama karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa Trepan dalam memberdayakan masyarakat.

3. Konflik Masyarakat Masalah Dampak Limbah Perusahaan Masuk Areal Persawahan Warga

Adanya dorongan insentif kepedulian dari pihak CSR Petrokimia kepada masyarakat Desa Trepan, ternyata juga di faktori dengan dampak perusahaan pada lingkungan seperti limbah pabrik air perusahaan yang masuk di lahan sawah warga Desa Trepan yang berdekatan langsung di areal perusahaan Petrokimia bidang instalasi air. Hal ini dilakukan agar tidak berdampak pada timbul adanya konflik dengan warga, maka perusahaan memiliki tanggung jawab bersama dan kepedulian kepada masyarakat dengan adanya wadah CSR Petrokimia Gresik yang dapat membantu masyarakat Desa Trepan. Selain itu, dampak limbah perusahaan yang sudah ada bertahun-tahun masuk di areal persawahan warga, Pemerintah Desa Trepan belum bisa memberikan solusi dalam penanganan masalah ini sampai masyarakat berdekatan dengan lahan perusahaan yang ada di desa sering mengalami hasil tanaman yang kurang subur. Hal ini sesuai dengan informasi Bapak Djuwoto yang pernah menjabat di instansi Pemerintah Desa Trepan.

“ Dulu memang sejarah yang saya tahu adanya PT Petrokimia dibidang instalasi air di Desa Trepan sering menimbulkan amarah warga karena limbah air sering masuk di areal persawahan warga, apalagi dimasa kepemimpinan saya juga masih mendapat aduan-aduan warga, dan air yang masuk di areal persawahan juga termasuk di lahan saya yang dekat dengan petro juga terkena imbasnya” (Wawancara dengan Bapak Djuwoto, 4 Desember 2023).

Limbah air perusahaan yang masuk di areal persawahan warga ternyata sudah ada dari tahun sebelumnya dan masalah ini sudah sering mendapat aduan dari warga di kantor balai desa. Bapak Djuwoto yang dulu sebagai Kepala Desa Trepan juga memiliki lahan yang terkena dampak adanya limbah dari perusahaan Petrokimia bidang instalasi air yang masuk di areal persawahan warga. Ketidakberanian masyarakat Desa Trepan juga menjadi sebuah alasan karena tidak mempunyai kapasitas untuk mengungkapkan permasalahannya kepada perusahaan dan hanya bergantung kepada Pemerintah Desa Trepan. Kekecewaan warga ialah pada sikap

pemerintah desa yang belum bisa memperhatikan masalah para petani serta kepedulian terhadap kelompok tani yang memiliki lahan berdekatan dengan perusahaan menjadikan kekesalan dan amarah pada Pemerintah Desa Trepan. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Mustaqim dalam hasil wawancaranya:

“Adanya limbah perusahaan itu sudah ada sejak dulu, masyarakat yang terkena dampak juga gak berani berurusan dengan Petro, dan sudah berulang kali lapor di pemerintah desa tapi hasilnya juga gak berubah pemerintah gak bisa menanganinnya. Yang paling keras nentang berani menyuarakan itu hanya saya sama almarhum Alimun. Saya sering marah-marah ke pihak petro, marah di kantor desa juga pernah pada saat itu istrinya Pak Djuwoto yang menjadi kepala desa sampai saya (*pisuhi*) ngomong kasar.

Penyampaian yang disampaikan Bapak Mustaqim terkait sejarah lama yang pernah terjadi ialah tuntutan dari masalah limbah perusahaan yang sering berdekatan dengan lahan warga. Masyarakat desa yang terkena dampak cenderung tidak berani mengungkapkan karena tidak beraninya warga dengan keberadaan kapasitas perusahaan. Selain itu, ada dua orang masyarakat yang pada akhirnya berani menyuarakan aspirasinya secara terang-terangan hanya dilakukan oleh Bapak Mustaqim dan Almarhum Bapak Alimun.

Hal tersebut masyarakat hanya bergantung kepada Pemerintah Desa Trepan untuk menyampaikan aspirasinya dan disampaikan kepada perusahaan. Namun, upaya tersebut justru tidak diberikan pemecahan solusi oleh pemerintah desa untuk menangani masalah tersebut yang sudah ada sejak lama. Kekecawaan tersebut yang menjadikan adanya kurang percaya pada kapasitas Pemerintah Desa Trepan.

Sejarah di masa lalu sampai saat ini juga masih belum memiliki titik kejelasan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga masyarakat yang terkena dampak juga sudah membiarkan masalah ini begitu saja dengan hasil panen yang kurang subur. Kebanyakan lahan warga yang terkena dampak kemudian disewakan kepada petani buah dan ada juga yang masih digunakan secara pribadi.

Hal ini seperti disampaikan Ibu Murni selaku istri dari Bapak Alimun yang mempunyai lahan berdekatan dengan perusahaan Petrokimia Gresik. Dalam hasil wawancaranya menyampaikan sebagai berikut:

“ Sampai saat ini lahan masyarakat fan masih terkena air dari petro, kalau ganti rugi gak ada, dan lahannya saya sewakan 1 tahun/ 1 juta mengingat

hasil tanam padi yang kurang subur, dan yang mendapat ganti rugi petani buah yang menyewa sebagian di lahan warga yang berdekatan dengan petro. Jadi yang mendapat ganti rugi petani buah yang menyewa. Kalau sebagiannya dari warga tidak dapat ganti rugi sehingga masyarakat membuat pagar sendiri dengan plastik pagar sawah”. (Wawancara dengan Ibu Murni, 19 Februari 2024).

Masalah-masalah yang sudah ada sejak dulu sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan akibat limbah perusahaan dan kurangnya perhatian pemerintah desa. Sehingga lahan warga sebagian ada yang disewakan kepada petani buah dan ada juga yang masih merawat dan ditutupi dengan plastik pagar sawah. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan juga tidak sepenuhnya dan hanya diberikan kepada petani buah yang menyewa sebagian lahan warga yang dekat dengan lahan perusahaan. Selain itu, temuan lain juga dilihat pada ganti rugi yang diberikan kepada Bapak Djuwoto yang juga memiliki lahan yang terkena dampak dengan sistem sewa 5 tahunan untuk dikelola dan ditanami pohon pisang sebagai program CSR Petrokimia desa wisata Kampung Pisang Trepan yang dibantu pemberdayaan kepada masyarakat.

Informasi tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan Bapak Mariadi yang mengetahui hal tersebut:

“Dalam kerja sama itu hanya 1 lahan miliknya Pak Djuwoto yang di sewa CSR selama 5 tahun dengan nominal Rp.3.500,000 dan penanaman bibit pisang ada sewa lahan yang menggunakan uang pribadi saya sendiri”. (Wawancara dengan Bapak Mariadi 8 Desember 2023)

Permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas kemudian dilakukan kerja sama baik CSR Petrokimia Gresik dengan Pemerintah Desa Trepan dengan cara memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan lahan milik Pak Djuwoto sebagai pemimpin desa yang yang terkena dampak disewa selama 5 tahun dengan nominal Rp. 3.500,000,00 sebagai program kampung pisang untuk penanaman pohon pisang dan dikembangkan menjadi desa wisata

Masalah tersebut yang dimiliki Pemerintah Desa Trepan dan PT. Petrokimia dengan masyarakat perlu memberikan kepercayaan untuk mendorong adanya kerja sama, sehingga dari pihak CSR sendiri sebagai perwakilan dari perusahaan memberikan tanggung jawab sepenuhnya dengan memberikan pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat yang di dukung potensi kekayaan alam pohon pisang Desa Trepan. Permasalahan tersebut bila

dikaitkan dengan teori Ansell & Gash (2007) adanya sejarah buruk atau terjadinya suatu konflik tidak menjadi penghalang untuk melakukan kolaborasi. Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik serta keterlibatan kelompok sosial masyarakat ditandai dengan adanya sejarah kelam yang memiliki permasalahan publik seperti pada kasus yang sudah dijelaskan di atas. Hal tersebut yang menyebabkan para pemangku kepentingan mau menjalin hubungan kerja sama karena ada sikap saling kebergatungan. Masalah konflik pemangku kepentingan dalam sejarah yang tinggi dan tidak ada sikap saling bergantung maka kerja sama yang dilakukan akan sulit terealisasi (Ansell & Gash, 2007). Secara keadaan masalah-masalah publik yang terjadi di lapangan ditujukan pada hubungan yang saling bergantung dengan keterbatasan pemerintah desa dan keinginan masyarakat untuk mendorong sumber daya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Desa Trepan yang mayoritasnya sebagai petani.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama pada kondisi awal dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan difaktori juga dengan adanya sejarah kelam baik Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik kepada masyarakat. Bantuan program yang diberikan pihak CSR juga sebagai bentuk tanggung jawab dampak perusahaan kepada lingkungan dan sosial masyarakat yang diperkuat dengan keterbatasan sumber daya Pemerintah Desa Trepan. Sehingga hubungan kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan memiliki kepentingan bersama yang ingin dicapai dengan tujuan berbeda. Hal ini dapat dikelompokkan oleh peneliti menjadi 3 tahap diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan pemerintah desa dan rendahnya sumber daya pengetahuan masyarakat desa dengan ketidakmampuan memanfaatkan potensi kekayaan alam pohon pisang
- 2) Keterlibatan GAPOKTAN dan kelompok masyarakat adanya dorongan CSR Petrokimia Gresik. (Visi misi bersama membangun kemajuan desa dan meningkatkan sumber penghasilan).
- 3) Sejarah pahit Pemerintah Desa Trepan dan PT.Petrokimia dengan masyarakat Desa Trepan (Konflik)

B. Proses Kolaborasi Desa Trepan Dengan CSR Petrokimia Gresik

1. Diskusi Bersama Masalah Warga

Kerja sama awal yang mempertemukan pemimpin Desa Trepan Bapak Djuwoto dengan pihak CSR Petrokimia Gresik di kantor balai desa, kemudian berlanjut Pemerintah Desa Trepan mengadakan pertemuan bersama dengan masyarakat Desa Trepan terkait keinginan bersama menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam penggalian potensi pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Program pemberdayaan yang sudah diberikan dari CSR Petrokimia Gresik perlu ada perkembangan bersama dan perlu adanya keterlibatan masyarakat menggali dan mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Pada penyelenggaraan kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang, kerja sama awal dengan pihak CSR Petrokimia Gresik ialah dilakukan oleh Bapak Djuwoto selaku Kepala Desa Trepan periode 2016-2022 dan berkat pengalaman dan kepiawain beliau yang sudah pernah memimpin Desa Trepan selama 3 periode. Hubungan kerja sama dengan pihak swasta CSR Petrokimia Gresik masuk di Desa Trepan pada tahun 2018 untuk turut serta tergabung membantu pemerintah desa dalam memberdayakan warga masyarakat Desa Trepan serta menggali potensi desa wisata. Hubungan kerja sama yang dilakukan Kepala Desa Trepan Bapak Djuwoto dengan pihak CSR terbilang intensif di awal dalam menjalin kerja sama dengan masuknya pihak CSR.

Komunikasi yang dilakukan ialah pertemuan yang hanya melibatkan Kepala Desa Trepan dan pihak CSR di kantor balai desa antara Pak Djuwoto dengan pihak CSR Petrokimia Gresik yang memohon izin masuk untuk membantu berinteraksi dengan masyarakat dan memberdayakan warga masyarakat Desa Trepan serta melakukan riset untuk meneliti terkait dampak negatif perusahaan terhadap masyarakat Desa Trepan dengan membuat program yang dapat membantu masyarakat Desa Trepan dengan keberadaan CSR Petrokimia Gresik. Hal ini diperkuat berdasarkan penuturan dari Bapak Djuwoto sebagai berikut:

“Desa wisata Trepan ini ada juga karena ada keterlibatan kerja sama awal dengan pihak CSR. Apalagi Desa Trepan terkenal banyaknya pohon pisang yang kemudian masuknya pihak CSR memohon izin untuk melakukan riset dan menggali potensi desa untuk menyusun

program CSR dalam memberdayakan masyarakat Desa Trepan dan saya mau menjalin kerja sama dengan pihak CSR karena dapat membantu pemerintah desa dalam memberdayakan warganya”. (Wawancara dengan Djuwoto, 4 Desember 2023).

Kepemimpinan Pak Djuwoto dalam menjalin kerja sama awal dimulai dengan komunikasi dua arah dengan pihak CSR Petrokimia, yang kemudian Pak Djuwoto memberikan respon baik dan percaya keberadaan CSR dapat membantu warga Desa Trepan sehingga membolehkan pihak swasta untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat desa serta memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang kemudian hubungan kerja sama tersebut dilanjutkan dengan Pemerintah Desa Trepan yang memfasilitasi pihak CSR untuk bertemu dan penyampaian program yang perlu di dukung perlu adanya keterlibatan masyarakat. Sehingga kerja sama yang dilakukan dalam mengembangkan potensi desa wisata yang ada di Desa Trepan dapat melibatkan *government*, *private sector*, dan *civil society*.

Gambar 11 Pertemuan Rencana Program Kampung Pisang Trepan



Sumber : Pemerintah Desa Trepan

Pertemuan yang diadakan dalam perencanaan program dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020 yang dihadiri GAPOKTAN, Karang Taruna, Pemuda Trepan, CSR Petrokimia Gresik dan jajaran Pemerintah Desa Trepan. Pada pertemuan tersebut membahas terkait rencana strategis program mengembangkan potensi desa wisata Kampung Pisang Trepan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Trepan dan pembagian peran dalam menjalankan program Kampung Pisang Trepan yang

di dasarkan pada komitmen bersama memanfaatkan potensi desa dan mengembangkan desa wisata. Kegiatan pertemuan yang diadakan pemerintah desa diperkuat informan oleh Mas Bagas selaku Ketua Karang Taruna Desa Trepan diantaranya sebagai berikut:

“Kegiatan tersebut di undang sama Pemerintah Desa Trepan fan, Pak Djuwoto mengajak bersama untuk menggali potensi desa wisata dan pertemuan tersebut ada CSR, GAPOKTAN, Karang Taruna dan kelompok UMKM” (Wawancara dengan Bagas, 8 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagas selaku informan yang memberikan keterangan bahwa kerja sama yang melibatkan semua elemen terlihat saat di awal-awal pertemuan membahas program perencanaan pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Kegiatan pertemuan yang menghadirkan berbagai macam aktor di atas menyampaikan keinginan masing-masing dimulai dari keinginan pengelolaan pemanfaatan tanaman pohon pisang, manajemen pemasaran, pembuatan barcode produk olahan, dan keinginan diberdayakan masyarakat Desa Trepan dalam mengembangkan potensi desa wisata agar membuka lapangan pekerjaan dan pemanfaatan pohon pisang yang ada di Desa Trepan. Pertemuan yang melibatkan semua pihak dipertemukan Pak Djuwoto selaku Kepala Desa Trepan untuk penyampain visi bersama dan mendukung adanya potensi desa wisata Kampung Pisang Trepan. Selain itu, pertemuan diadakan untuk mendengar apa yang menjadi keinginan warga Desa Trepan dalam program kerja sama yang melibatkan dengan CSR Petrokimia Gresik. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Karmono selaku Kaur Keuangan Desa Trepan sebagai berikut:

“Pertemuan yang diadakan pak kades di Balai Desa Trepan pernah ada dan itu dilakukan dengan adanya keterlibatan pihak CSR. Semua elemen di undang baik masyarakat, GAPOKTAN, pelaku UMKM dan lain sebagainya yang membahas menggali potensi desa wisata kampung pisang serta visi bersama menyatukan program yang diinginkan”. (Wawancara dengan Karmono, 8 Desember 2023)

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Karmono, beliau memberikan keterangan bahwa Pak Djuwoto selaku Kepala Desa Trepan mengajak dan mengundang para stackholder untuk mengembangkan potensi desa wisata dengan adanya keterlibatan dari CSR Petrokimia Gresik. Namun, peneliti juga menemukan temuan lain terkait kepemimpinan fasilitatif dalam hal komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Pak Djuwoto selama menjadi Kepala Desa Trepan dianggap kurang menginisiasi forum pada pertemuan yang melibatkan para stakeholder untuk mengembangkan desa wisata. Selain itu, pertemuan yang diadakan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain juga jarang dilakukan, dan dari pihak CSR Petrokimia yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat menjalin kerja sama. Hal tersebut yang menjadi kelemahan kepemimpinan Pak Djuwoto sebagai kepemimpinan fasilitatif yang tidak mengetahui tantangan dan hambatan masalah yang dihadapi dalam menjalankan program desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan CSR Petrokimia Gresik terkait sikap kurangnya kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh Bapak Djuwoto dalam hal komunikasi dan menginisiasi forum pertemuan.

“Bapak Djuwoto dulu hampir gak pernah menginisiasi forum terkait hal pengembangan desa wisata. Komunikasi dengan kami dulu jarang dilakukan dan justru dari pihak kami yang langsung datang ke desa untuk lebih banyak pertemuan dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat” (Wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, 11 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, beliau memberikan keterangan bahwa dalam jalinan kerja sama, sosok kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak Djuwoto dianggap kurang menginisiasi dalam forum dan kordinasi komunikasi secara intens dengan pihak swasta . Hal ini berkaitan dengan Bapak Djuwoto yang tidak pernah menginisiatif membuat forum secara berkelanjutan untuk mengatur dan menjaga kredibilitas teknis kerja serta menyakinkan keputusan yang dapat diterima dari para pemangku kepentingan yang lain. Selanjutnya, apa yang disampaikan dari perwaiklan CSR Petrokimia Gresik juga di dukung informasi dari Ibu Rina selaku pelaku UMKM Desa Trepan. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“ Pak Djuwoto masih mengundang untuk keterlibatan bertemu mas di Balai Desa dan itu ada CSR, karang taruna, kelompok tani dan para pelaku UMKM di pertemukan bersama, tapi Pak Djuwoto masih kurang menginisiatif forum untuk arah perkembangan desa wisata dan kalau CSR datang mau bertemu baru berkumpul”. (Wawancara dengan Rina pelaku UMKM, 11 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina bahwa kegiatan musyawarah yang mempertemukan pemangku kepentingan memang pernah dilakukan untuk berunding bersama mengembangkan desa wisata terutama keberadaan Kepala Desa Trepan sebagai fasilitator dengan pemangku kepentingan yang lain. Namun, sikap kurangnya inisiatif dari Pak Djuwoto mengadakan pertemuan untuk arah strategi pengembangan desa wisata kampung pisang dengan kelompok masyarakat yang lain menjadi permasalahan karena tidak ada komunikasi keberlanjutan dengan aktor-aktor yang terlibat. Forum pertemuan di Balai Desa Trepan juga pernah dilakukan yang melibatkan para stakeholder untuk membahas dari sisi pemberdayaan masyarakat dengan adanya inisiatif pihak perusahaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat dan forum pertemuan yang diadakan lebih sering dari pihak swasta CSR Petrokimia Gresik dibandingkan Pemerintah Desa Trepan.

Adanya interaksi, komunikasi, dan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Trepan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat untuk membahas rencana program juga kurang intensif dan kolaboratif yang dilakukan Pak Djuwoto. Hal ini disampaikan langsung Mas Amin selaku Ketua POKDARWIS dan Pak Karmono selaku kaur keuangan Desa Trepan diantaranya sebagai berikut :

“ Kalau komunikasi inisiasi dalam forum pernah dan itu kadang berganti orang dan saya sudah gak ingat betul. Cuma komunikasi dengan yang lain Pak Djuwoto gak pernah kek masih kurang lah sama GAPOKTAN dan saya sendiri, tapi kalau pemimpin saat ini ada tapi gak secara formal komunikasinya, melainkan ngobrol santai dengan yang lain ngopi bareng. (Wawancara dengan Amin ketua pokdarwis, 7 Desember 2023)

“Pertemuan pak kades Djuwoto dengan yang lain pernah dilakukan di kantor balai desa, cuma ya komunikasi kalau ada CSR datang kesini membahas keberlanjutan pengembangan desa wisata” (Wawancara dengan Karmono, 8 Desember 2023)

Merujuk pada teori Ansell & Gash (2007) sebagai bentuk membangun kepercayaan diperlukan dialog tatap muka sebagai langkah awal agar para pemangku kepentingan yang terlibat dapat saling percaya dan mendukung untuk saling kebergantungan. Pertemuan yang melibatkan Pemerintah Desa Trepan, CSR Petrokimia Gresik, kelompok sosial masyarakat seperti GAPOKTAN, kelompok UMKM dan Karang Taruna membahas masalah warga yang dihadapi di desa. Penyesuaian program dilakukan agar dapat membantu masalah warga sebagai bentuk tanggung jawab CSR kepada masyarakat atas dampak perusahaan yang

berdekatan dengan lahan warga yang ada di Desa Trepan. Kerja sama yang dilakukan juga tak lepas dari keterlibatan pemimpin desa yang mempengaruhi mengajak bersama untuk melakukan *collaborative governance*. Menurut Purwanto dalam Mawardia (2022) bahwa kepemimpinan merupakan permulaan dari suatu struktur dan prosedur baru untuk mencapai tujuan dan tujuan organisasi.

Kepemimpinan fasilitatif yang dimaksud dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan ialah kepemimpinan Kepala Desa Trepan yang memiliki wewenang dan mengatur serta memobilisasi masyarakat Desa Trepan. Adanya peran Kepala Desa Trepan mendorong untuk memfasilitasi pemangku kepentingan dengan yang lain seperti halnya pihak CSR Petrokimia Gresik yang dipertemukan dengan kelompok masyarakat lainnya dan lembaga pemerintah untuk duduk bersama dalam suatu forum. Kepala Desa Trepan dapat dianggap sebagai pemimpin yang fasilitatif karena posisi dan peran beliau dalam menjalin komunikasi penghubung antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kepemimpinan fasilitatif ini yang akan menjadi bentuk kepercayaan dalam proses kerja sama dilakukan. Tidak adanya kepemimpinan fasilitatif juga akan berdampak pada gagalnya atau menghambat proses jalannya suatu kolaborasi.

Pertemuan yang diadakan di Balai Desa Trepan mempertemukan berbagai macam aktor sebagai langkah awal dinamika kerja sama itu terbentuk terutama diskusi bersama atas masalah warga yang dihadapi dan penyesuaian program bersama untuk penggalan potensi desa wisata Kampung Pisang Trepan. Upaya yang dilakukan Bapak Djuwoto sebagai pemimpin desa menunjukkan adanya peran yang mampu mempengaruhi masyarakat dan keterlibatan bersama. Namun, keterbatasan sumber daya, insentif waktu, dan ketrampilan dalam menginisiasi forum menjadikan titik kelemahan tersebut dapat berpengaruh pada komitmen saat menjalankan proses kolaborasi karena kurangnya idealnya sebagai pemimpin desa. Seperti halnya disampaikan Lasker dan Weis dalam jurnal artikel Ansell & Gash (2007), bahwa pemimpin kolaboratif juga harus memiliki ketrampilan dalam hal mampu mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif, memastikan punya power atau kontrol yang sangat luas, mampu memfasilitasi produktivitas dinamika kelompok, dan serta memperluas cakupan proses. Selain itu, menurut Huxham dan Vangen dalam jurnal artikel Ansell & Gash (2007) beliau memberikan pandangannya dalam hal penekanan kepemimpinan kolaboratif yang efektif dengan memerhatikan tiga hal antara lain intensif waktu, sumber daya, dan

keterampilan. Dalam hal ini Bapak Djuwoto dapat dianggap pemimpin fasilitatif namun dari segi kolaborasi belum menunjukkan pemimpin yang efektif dalam hubungan kerja sama mengingat terlalu bergantung pada CSR Petrokimia Gresik yang mempunyai program *Community Development*..

Maka dapat disimpulkan adanya pertemuan diskusi bersama terkait pertemuan yang membahas masalah warga dalam proses kerja sama sebagai bentuk pertemuan untuk membangun kepercayaan pada proses kolaborasi dalam pengembangan desa wisata, terutama peran kepala desa sebagai pemimpin fasilitatif yang mempertemukan berbagai aktor kepentingan. Namun, pada proses membangun kepercayaan yang dilakukan masih menjadi kendala dengan pemimpin desa yang kurang terampil, insentif waktu, dan menginisiasi forum yang menjadikan dinamika kerja sama dalam membangun kepercayaan dapat terhambat, meskipun pertemuan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan bersama.

2. Pembagian Peran Tanggung Jawab Tanpa Ada Mou Tertulis

Temuan di lapangan terkait kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan pihak swasta CSR Petrokimia Gresik hanya berdasarkan pada komitmen secara lisan tanpa ada Mou yang dibuat. Keterlibatan GAPOKTAN, dan pelaku UMKM hanya pada komitmen menjalankan peran membangun bersama menggali potensi desa wisata Kampung Pisang Trepan. Masing-masing aktor yang terlibat di undang untuk hadir pada pertemuan yang diadakan di balai pemerintah desa. Tidak adanya Mou yang dibuat dikarenakan mantan Kepala Desa Trepan Bapak Djuwoto tidak ingin mempersulit mekanisme aturan main dalam hubungan kerja sama dengan pihak CSR Petrokimia. Beliau percaya dengan bantuan baik yang dilakukan CSR dapat membantu mensejahterakan masyarakatnya melihat keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Djuwoto selaku Kepala Desa Trepan periode 2016-2022 dalam menjalin kerja sama awal dengan pihak swasta CSR Petrokimia Gresik.

“ Seingat saya dulu, dalam menjalin kerja sama pemerintah desa tidak pernah ada aturan yang dibuat maupun Mou dengan pihak CSR. Saya tidak ingin ambil pusing dan ribet-ribet mas terkait aturan, yang penting masyarakat Desa Trepan sejahtera dapat diberdayakan oleh pihak CSR yang memberi bantuan program pemberdayaan masyarakat. Yang penting saya percaya kepada pihak CSR Petro untuk membantu taraf perekonomian masyarakat Desa Trepan dengan pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan potensi desa wisata”. (Wawancara dengan Djuwoto 4 Desember 2023)

Adanya sikap mantan Kepala Desa Trepan yang tidak mau hal rumit terkait aturan regulasi dalam kerja sama juga keinginan kuat Bapak Djuwoto selama menjabat sebagai kepala desa yang ingin masyarakatnya dapat diberdayakan oleh CSR Petrokimia Gresik. Pemberdayaan yang diberikan pihak CSR akan mendorong untuk terciptanya pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal ini juga disampaikan oleh informan perwakilan pihak CSR Petrokimia dalam memberikan keterangan tidak adanya regulasi yang dibuat dan izin masuk ke Desa Trepan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Terkait regulasi dari pemerintah desa sendiri tidak pernah membuat aturan secara jelas dalam pengembangan desa wisata. Kami dulu hanya komunikasi dengan pak kades memohon izin saja saat masuk untuk memberikan bantuan ke penerima manfaat dalam program pemberdayaan masyarakat pelatihan memanfaatkan pohon pisang. (Wawancara perwakilan CSR, 11 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan informan pihak CSR menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik hanya berdasarkan pada komitmen secara lisan tanpa ada regulasi yang dibuat seperti halnya keterlibatan dari GAPOKTAN dan kelompok masyarakat pelaku UMKM Desa Trepan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Indah sebagai berikut:

“Kerja sama CSR dengan pemerintah desa dulu kalau gak salah gak ada ih mas, Mou yang dibuat pun gak ada zaman kepemimpinan Pak Djuwoto. Dulu ya cuma di undang di balai desa oleh pemerintah desa dengan kehadiran pihak CSR dan kelompok tani juga di undang yang hanya menyampaikan bahwa desa mau ada program rencana kampung pisang trepan dan cuma komitmen bersama membangun desa wisata”. (Wawancara dengan Indah, 14 Desember 2023)

Keterlibatan masing-masing aktor dalam hubungan kerja sama membangun desa wisata Kampung Pisang Trepan saat penyampaian program hanya berdasar undangan pemerintah desa untuk terkait hal-hal penyampaian program Kampung Pisang Trepan dan tidak ada pembahasan yang menyangkut terkait regulasi aturan main dalam hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik. Keterlibatan dari masing-masing aktor pada pertemuan awal hanya membahas diskusi masalah warga serta penentuan program rencana kampung pisang dalam berbagi peran. Hal ini juga diperkuat informasi oleh Bapak Mariadi selaku informan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“ Terkait Mou pemerintah desa dengan csr tidak ada, apalagi pembagian hasil kedepan dan lain sebagainya, dan saat pertemuan hanya berfokus pada penyampaian program dan bantuan CSR kepada kelompok masyarakat dengan pembentukan pokdarwis yang dilakukan pemerintah”.
 (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Pertemuan yang diadakan Pemerintah Desa Trepan dengan keterlibatan CSR Petrokimia Gresik hanya bertahap pada penyampaian program dan kerja sama yang dibangun untuk dapat mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa serta keterlibatan kelompok masyarakat dalam hal pengelolaanya kedepan. Keinginan dari pihak Kepala Desa Trepan untuk segera menggali potensi desa wisata dan tidak ada unsur yang rumit langsung dirumuskan dengan cara membagi peran yang harus dikerjakan tanpa ada MoU secara tertulis pada pertemuan tersebut. Dalam berbagi peran tersebut masing-masing aktor memiliki tugas masing-masing diantaranya sebagai berikut:

Tabel 6 Aktor yang terlibat & Pembagian Peran

NO	Aktor	Lembaga / Instansi	Peran/ Keterlibatan
1	Pemerintah	Pemerintah Desa Trepan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir Pengelolaan Desa Wisata - Bantuan Alat Pelaku Umkm - Pemberdayaan Kelompok Tani
2	Pihak Swasta	CSR Petrokimia Gresik	<ul style="list-style-type: none"> - Support Dana Fasilitas Desa Wisata - Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

3	Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - POKDARWIS TREPAN - GAPOKTAN - Kelompok UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Desa Wisata/ Sosialisasi masyarakat - Branding desa wisata - Penanaman Pohon Pisang di Kebun Percobaan Agritage - Pengelolaan Tanaman Pohon Pisang Menjadi Produk Makanan dan Kerajinan Tangan
---	-----------------------	---	---

Sumber : Data peneliti berdasarkan hasil wawancara

Pembagian peran tersebut dirumuskan bersama dari masing-masing aktor untuk mendukung program pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan yang diadakan pertemuan di Balai Desa Trepan tanpa membahas regulasi aturan main yang jelas. Selain itu, temuan lain di lapangan saat diadakannya pertemuan di pemerintah desa yang membahas program dan berbagi peran dalam pengembangan desa wisata yang melibatkan macam aktor, ada sedikit perdebatan dan ketersinggungan dengan Ketua Karang Taruna Marsudi Utomo Desa Trepan. Kehadiran Ketua Karang Taruna saat pertemuan yang membahas kerja sama program pengembangan desa wisata mendapat sorotan dari Mas Bagas selaku Ketua Karang Taruna karena sejak awal masuk ke Desa Trepan tidak ada kordinasi lebih dalam dengan organisasi kemasyarakatan sosial seperti Karang Taruna dan justru langsung memilih kelompok-kelompok tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Mas Bagas selaku Ketua Karang Taruna:

“Adannya desa wisata Kampung Pisang Trepan awal mula saya tidak diajak, akan tetapi saat pertemuan awal adanya pembahasan program kampung pisang di balai desa saya hadir dan usul kepada pihak CSR kenapa tidak ada kordinasi dengan karang taruna lebih lanjut dengan terfokus pada kelompok-kelompok tertentu dan kenapa tidak semuanya kelompok ikut dilibatkan tanpa adanya kordinasi. (Wawancara dengan Bagas, 8 Maret 2024)

Pembagian peran dalam pertemuan tersebut dianggap suatu keanehan bagi Ketua Karang Taruna karena awal masuk ke desa, CSR bergerak sendiri untuk mengajak kerja sama dengan kelompok-kelompok anggota tertentu seperti para pelaku UMKM binaan CSR yang status keanggotannya masih bagian dari Karang Taruna tanpa ada informasi dan kordinasi dengan ketua Karang Taruna. Selain itu, program yang dibawah CSR terkait pemberdayaan masyarakat dianggap bertindak sepihak tanpa ada komunikasi keberlanjutan dengan ketua Karang Taruna yang menyebabkan program yang dibawah tidak diketahui Karang Taruna dan keinginan Mas Bagas agar semua anggota Karang Taruna dapat dilibatkan dan membahas bersama mengingat Karang Taruna juga bagian dari lembaga organisasi masyarakat. Namun, dalam pertemuan tersebut juga dibahas bahwa kerja sama yang dibangun dengan keterlibatan kelompok pelaku UMKM juga masih bagian dari anggota Karang Taruna dan diambil masyarakat yang masih aktif untuk menjalankan program pelatihan CSR sehingga kelompok yang masih mau menjalankan program itulah yang di ajak menjalin kerja sama bersama. Kemudian perbedaan pandangan itu bisa diterima oleh Ketua Karang Taruna Marsudi Utomo dengan catatan kerja sama yang dibuat dan pembagian peran masih menggandeng Karang Taruna untuk turut serta dilibatkan mengingat masih termasuk dengan lembaga sosial masyarakat.

“ Yang jelas mereka pihak CSR memberikan pembelaan bahwa program ini sudah ada dengan keterlibatan anggota dari Karang Taruna dan kelompok yang dilibatkan hanya berdasarkan kelompok yang masih berkomitmen mengikuti arahan binaan csr yang dikirim di Yogyakarta dan Surabaya untuk mengikuti pelatihan dan mau mengembangkan di desa. Dengan penyampain yang disampaikan dari pihak CSR, saya pun akhirnya menerima keputusan pembagian peran tersebut dan kordinasi yang terpenting kedepan dilakukan ialah saling menggandeng antara POKDARWIS dan Karang Taruna, meskipun agak sedikit kecewa selaku ketua Karang Taruna tidak ada komunikasi keberlanjutan di awal”. (Wawancara dengan Bagas, 8 Maret 2024)

Pertemuan dalam upaya membangun kerja sama antara Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik sebelumnya memang hanya dialog komunikasi dua arah antara Kepala Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik tanpa melibatkan ketua Karang Taruna Desa Trepan sebagai perwakilan kelompok sosial masyarakat. Ketersinggungan tersebut karena dari pihak Pemerintah Desa Trepan tidak berkordinasi juga dengan Ketua Karang taruna Marsudi Utomo atas program pemberdayaan yang dibawah oleh CSR sebelum ada kerja sama yang melibatkan

masyarakat mempertemukan untuk program pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Sehingga pada pertemuan bersama sempat terjadi perdebatan dalam forum karena pemberdayaan yang diberikan CSR bergerak sendiri tanpa ada perundingan dan penyelarasan program dengan pihak Karang Taruna, namun perdebatan tersebut hanya bersifat sementara dan sudah terselesaikan dengan diskusi bersama dan penjelasan yang diberikan oleh pihak CSR Petrokimia Gresik kepada Bagas selaku Ketua Karang Taruna. Ansell & Gash (2007) juga menjelaskan terkait tata kelola kolaborasi bahwa selalu ada perbedaan pandangan terhadap satu sama lain dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini seperti pertemuan yang dilakukan Pemerintah Desa Trepan yang melibatkan semua pihak dan ada perbedaan pandangan dengan Ketua Karang Taruna terkait pembagian peran dan kurangnya koordinasi dengan kelompok masyarakat.

Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa tidak adanya Mou dalam kerja sama awal pada kepemimpinan Kepala Desa Trepan Bapak Djuwoto juga berpengaruh pada transisi sistem pemerintahan Bapak Asikin yang baru menjabat menjadi Kepala Desa Trepan pada tahun 2022 meneruskan kerja sama yang dilakukan Bapak Djuwoto dengan pihak CSR Petrokimia Gresik. Beliau memberikan keterangan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan pemangku kepentingan dalam menjalankan desa wisata Kampung Pisang Trepan masih ditemukan pemangku kepentingan bertindak masing-masing tanpa saling berkordinasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Asikin sebagai berikut:

“Adanya pengembangan desa wisata kampung pisang di Desa Trepan ini dibidang masih semrawut mas bagi saya, kek masih belum jelas arahnya kemana konsepnya bagaimana, pihak CSR datang kesini dulu yang juga menawarkan program pemberdayaan dan objek kampung pisang juga kek berjalan sendiri, kalau ada apa-apa atau informasi apapun kita mencari sendiri di pemerintah. Bahkan aktor-aktor yang terlibat seperti pelaku UMKM dalam segi penjualan dagangan penerima bantuan juga masih bergerak sendiri tanpa ada laporan dari pemerintah desa. Sehingga kek perlu ditata ulang kembali dalam hal berbagi tugas. (Wawancara dengan Asikin, 4 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asikin beliau melihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Pak Djuwoto hanya berdasarkan komitmen yang disampaikan secara lisan dan hal ini berdampak pada tidak kejelasan aturan main yang dijalankan dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang. Selain itu, Bapak Asikin juga merasa bahwa pembagian peran yang tidak dibuatkan aturan

main atau kebijakan yang mengikat pada pemerintahan Bapak Djuwoto memiliki dampak pengaruh yang menghasilkan para aktor yang terlibat bersikap sewenang-wenang saat menjalankan proses kerja yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Selanjutnya, tidak adanya arah strategi dalam sebuah regulasi yang dipimpin Bapak Djuwoto juga dirasakan oleh pihak swasta CSR Petrokimia Gresik terutama dalam hal interaksi bincang keterlibatan sampai pada perencanaan pengelolaan desa wisata. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan CSR sebagai berikut:

“Kami ada perbedaan pandangan itu pasti, apalagi kami lebih ke taktis akademis, strategis dari visi perusahaan, sedangkan pemerintah desa maunnya struktural birokratis. Dimana segala hal apapun harus laporan ke pemerintah desa sedangkan dari visi perusahaan sendiri kan menginginkan agar lebih mudah dan intens berinteraksi dengan masyarakat” (Wawancara dengan perwakilan CSR , 11 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, beliau memberikan keterangan bahwa perbedaan pandangan keinginan pihak swasta dan pemerintah desa dalam hal memberdayakan masyarakat Desa Trepan terkait pengelolaan desa wisata pasti memiliki strategi pendekatan dan cara yang berbeda. Mengingat komunikasi dengan Pak Djuwoto dalam pertemuan tidak adanya membahas Mou dalam hubungan kerja sama yang dilakukan.

Pemerintah desa menginginkan segala hal macam bantuan yang diberikan CSR kepada masyarakat harus disampaikan dan dilaporkan ke pemerintah desa secara birokratis. Sedangkan dari pihak swasta CSR Petrokimia Gresik yang menginginkan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus berbelit-belit untuk selalu melapor kepada pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Trepan terutama visi perusahaan yang menginginkan taktis dan strategis yang memudahkan pihak perwakilan dari perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bantuan yang diberikan oleh perusahaan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang menerima bantuan. Hal tersebut yang dialami Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik dalam jalinan kerja sama tanpa adanya regulasi atau Mou yang mengatur arah strategi perencanaan program desa wisata Kampung Pisang Trepan yang memiliki rencana strategi yang berbeda.

Pada keterangan Teori Ansell & Gash dalam jurnal artikelnya dijelaskan, hubungan kerja sama perlu adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sebagai aspek penting yang mendorong aturan main secara prosedural dan keterbukaan dengan para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2007). Hal ini dilihat dengan keadaan Pemerintah Desa Trepan pada penjelasan di atas menunjukkan tidak ada suatu perjanjian bersama yang membahas aturan yang harus dipatuhi sebagai hubungan mitra kerja, dan justru hanya penyampaian pada pembagain tugas melaksanakan program yang dibawah oleh CSR Petrokimia Gresik. Secara jelas, Pemerintah Desa Trepan dengan kepemimpinan Bapak Djuwoto sebagai kepala desa pada pertemuan forum yang dipertemukan memiliki kekurangan. Kekurangan yang dihadapi ialah belum bisa merumuskan dan kebijakan aturan yang dibuat untuk mematuhi hubungan kerja sama dalam pengembangan desa wisata. Apabila kita merujuk pada teori Ansell & Gash (2007), dalam menjalin kolaborasi kepemimpinan fasilitatif harus mampu menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, fasilitator dialog, dan menjelajahi keuntungan yang bisa diambil bersama. Akan tetapi Bapak Djuwoto belum bisa membuat aturan dasar secara jelas.

Menurut Molla (2022), adanya regulasi merupakan kekuasaan yang diterima baik secara lembaga maupun organisasi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang berada dalam yurisdiksi. Namun, kegiatan pertemuan yang dibuat Pemerintah Desa Trepan belum memiliki kontrol power untuk membuat kebijakan untuh arah strategi pada pengelolaan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Tidak adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat berdampak pada pemangku kepentingan yang terlibat bergerak masing-masing tanpa adanya kordinasi satu sama lain. Selain itu, tidak adanya desain kelembagaan dalam kerja sama berpengaruh pada tidak keterbukaan transparansi dan akuntabel dari para pemangku kepentingan. Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan dan manipulatif dalam melakukan kerja sama dari masing-masing aktor yang terlibat tanpa ada Mou atau desain kelembagaan yang jelas.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak adanya MoU dalam hubungan kerja sama serta kurangnya kordinasi CSR dengan organisasi kelompok masyarakat seperti Karang Taruna berdampak pada ketidakseimbangan program secara prosedural yang dijalankan dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Pisang Trepan.

Permasalahan seperti yang ditemukan oleh peneliti diatas bukan termasuk suatu hal baru, karena peneliti sebelumnya juga pernah terjadi pada penelitian Setiawan dan Sutikno (2022) terkait tidak adanya desain kelembagaan atau Mou pada sistem pengelolaan desa wisata Waduk Penjalin di Desa Winduaji Brebes. Tidak ada Mou tersebut, berpengaruh pada tingkat profesional pengelolaan dan kepedulian masyarakat yang belum optimal dan aturan tiket masuk untuk wisatawan.

3. Pengelolaan Desa Wisata Kampung Pisang Kurangnya Kordinasi

Pada pelaksanaan pembagian peran, para aktor yang terlibat dalam hubungan kerja sama saling menjalankan perannya dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Komitmen yang ditunjukkan saling ditonjolkan baik dari Pemerintah Desa Trepan, CSR Petrokimia Gresik, GAPOKTAN, POKDARWIS, dan pelaku UMKM Desa Trepan untuk saling menjalankan peran yang sudah dibagi pada pertemuan bersama di Balai Desa Trepan. Pembagian peran yang dilakukan pada pengelolaan yang dihasilkan ialah bantuan alat Pemerintah Desa Trepan kepada kelompok UMKM, fasilitas penunjang desa wisata yang diberikan CSR Petrokimia Gresik, pengelolaan kelompok sadar wisata melakukan branding untuk desa wisata Kampung Pisang Trepan dan kelompok UMKM Desa Trepan yang mengelola produk olahan dari pohon pisang. Pada pengelolaan desa wisata tersebut terdapat pola dinamika kurangnya pertemuan bersama dan kordinasi berkelanjutan untuk program Kampung Pisang Trepan. Hal ini peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan aktor yang terlibat kerja sama diantaranya sebagai berikut:

“Pertemuan tatap muka jelas ada, tapi biasanya pihak CSR datang ke desa udah langsung tak suruh saling kordinasi dengan Mas Amin dan kelompok lainnya yang menerima bantuan darinya. Kalau pertemuan rapat-rapat di balai desa ya rapat formal biasa tapi gak sering dilakukan”. (Wawancara dengan Djuwoto, 4 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan Bapak Djuwoto selaku pemimpin desa menjelaskan monitoring atau pertemuan bersama pada pelaksanaan untuk membangun bersama mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan belum terkordinir dengan baik melihat sikap Kepala Desa Trepan yang cenderung kurang menginisiasi forum pertemuan bersama. Selain itu, pertemuan yang

diadakan secara formal masih belum begitu intens pada tahap pengelolaan yang dijalankan. Ada saat-saat tertentu baru diadakannya pertemuan dengan para stakeholder yang membahas terkait pemberdayaan masyarakat desa yang saling berkordinasi dan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan yang menjalin kerja sama. Hal ini disampaikan oleh Ibu Indah selaku informan sebagai berikut:

“Pertemuan tatap muka ada mas di ruang balai desa, tapi ya tidak rutin dilakukan ya paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bertemu di balai desa dan biasanya kalau gak saling komunikasi pemantauan kondisi disampaikan lewat whatsapp grup oleh Pak Kades” (Wawancara dengan Indah, 14 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah beliau memberikan keterangan bahwa pertemuan bersama belum dilakukan secara intens dan hanya mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali dan komunikasi terkait pemantauan kondisi hanya disampaikan di grup *Whatsapp*. Kurangnya kordinasi sampai mendapat respon negatif dari pihak kelompok tani yang salah satunya ialah Bapak Mariadi sebagai berikut:

“Pemerintah desa gak mengenal pertanian di kepemimpinan Pak Djuwoto, aksi pengelolaan desa wisata juga action ya dari para kelompok tani, pemerintah gak ada kontribusi lebih, semua dilakukan POKDARWIS dan kelompok tani.”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Respon demikian ada timbul rasa kecewa karena kurangnya ada pertemuan yang di inisiatif oleh Pemerintah Desa Trepan dibawah kepemimpinan Bapak Djuwoto. Padahal, dalam menjalankan peran pada penentuan program para aktor yang terlibat saling mendukung dan berkomitmen untuk membantu Desa Wisata Kampung Pisang Trepan. Namun, ditengah proses yang dijalankan ada kerengangan dari para aktor dan keraguan saat menjalankan pengelolaan desa wisata. Pihak CSR Petrokimia sebagai perwakilan swasta juga sudah berkomitmen mendukung keinginan penggalian potensi desa dengan fasilitas bantuan yang diberikan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh perwakilan CSR Petrokimia Gresik sebagai berikut:

“Kami tetap berkomitmen dalam membantu mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan dengan bantuan yang kami berikan seperti rumah kompos, gazebo, dan pemberdayaan para kelompok pelaku UMKM, harapannya juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dan kepada masyarakat Desa Trepan apalagi Desa Trepan masih 1 ring dengan perusahaan” (Wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, 11 Desember 2023)

Gambar 12 Bantuan Fasilitas Dari CSR
Petrokimia



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Support dan dukungan dari pihak swasta dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan untuk berkomitmen pada pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan tidak hanya pada fasilitas pendukung desa wisata. Produk yang menjadi ciri khas Kampung Pisang Trepan juga dibantu oleh pihak tim CSR Petokimia Gresik dengan melakukan branding pada artis ternama untuk mengenalkan produk UMKM Desa Trepan yang masih binaan dari CSR Petrokimia Gresik.

Gambar 13 Produk Trepan di Sponsori Artis
Ternama



Sumber: Mbak Indah (Kennes Cake)

Selanjutnya, komitmen juga dilakukan oleh POKDARWIS dan GAPOKTAN Desa Trepan guna menjalankan peran untuk komitmen bersama mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan dengan melakukan branding di media sosial melalui instagram untuk memperkenalkan desa wisata Kampung Pisang Trepan melalui konten-konten yang dibuat.

Gambar 14 Branding Kampung Pisang Via Instagram



Sumber : Instagram banana.trepan

Hal ini dilakukan untuk menarik wisatawan yang lain untuk mengetahui bahwa Desa Trepan memiliki tempat destinasi desa wisata edukasi dengan ciri khas kekayaan alam pohon pisang yang dapat dikelola menjadi sumber penghasilan. Upaya ini dilakukan untuk saling menjaga komitmen dengan para stakeholder yang terlibat. Hal tersebut seperti yang disampaikan Mas Amin selaku ketua POKDARWIS sebagai berikut:

“Kalau terkait komitmen saat ini ya sudah berkomitmen. Saya selaku ketua kelompok sadar wisata, sudah membantu mengenalkan Desa Trepan sebagai destinasi desa wisata. Hal ini bisa saman lihat di instagram banana trepan, saya dan Pak Mariadi juga membuat konten edukasi dan mengenalkan produk-produk UMKM Desa Trepan”. (Wawancara dengan Amin, 7 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Mas Amin selaku ketua kelompok sadar wisata, beliau memberikan keterangan bahwa POKDARWIS dan GAPOKTAN

juga sudah berupaya untuk berkomitmen bersama dengan para stakeholder yang terlibat dengan mensosialisasikan dan mengenalkan di media sosial melalui instagram untuk menarik wisatawan berkunjung di desa wisata Kampung Pisang Trepan yang berada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Pada proses yang dilakukan menjadi timbul masalah ialah karena ada pembagian peran yang dijalankan, namun tidak ada kordinasi secara struktur dan sistematis pada pengelolaan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Sehingga para pemangku kepentingan bertindak masing-masing tanpa ada saling komunikasi karena sikap pemerintah yang kurang berkomitmen memperhatikan pemangku kepentingan yang lain yang sudah menjalankan peran, namun tidak ada kordinasi keberlanjutan secara berkala untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dimiliki para pemangku kepentingan yang terlibat. Tindak keberlanjutan dari masing-masing aktor kemudian tidak ada transparansi dan akuntabel dari masing-masing pihak yang terlibat karena tidak ada komunikasi secara intens. Hal tersebut yang mempengaruhi pada kualitas hubungan kerja sama dari masing-masing aktor untuk melakukan kesepahaman bersama.

Seperti halnya sikap CSR Petrokimia menyikapi komitmen yang diberikan, namun belum bisa dipahami oleh kelompok masyarakat.

“Ini yang belum dipahami masyarakat, bahwa bantuan program CSR bukan menjadi anak buruh yang harus dikasih makan oleh induknya terus, tapi bertumbuh dan CSR hanya membantu. Faktor penentu kontribusi yang diberikan CSR ialah masyarakat sendiri”.
(Wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, 11 Desember 2023)

Keinginan dari pihak CSR dalam membantu program yang diberikan kepada masyarakat harus bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan bertumbuh secara mandiri tanpa bergantung semuanya dengan pihak CSR Petrokimia. Pihak CSR menginginkan bahwa keberhasilan dari kerja sama yang dilakukan harus ada kontribusi dari masyarakat sendiri. Terutama peran POKDARWIS yang masih belum bisa mengkonsep desa wisata dengan baik dan tidak pernah melakukan kordinasi dengan pemerintah desa untuk memberikan laporan yang dikerjakan. Selain itu, peran pemerintah desa yang masih belum bisa memperhatikan kelompok tani dalam membantu pemanfaatan pemberdayaan juga belum dilakukan, sehingga komitmen yang dijalankan sebagian besar belum sepenuhnya

dijalankan dengan baik tanpa adanya saling kordinasi dengan para stakeholder yang terlibat. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Mariadi sebagai berikut:

“Pihak pemerintah desa gak pernah melakukan kordinasi, komitmen ada tapi kurang, kelompok tani dan (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata penting jalan *mlaku dewe* dalam mengelola kampung pisang ini. Apalagi saya kalau diatur-aturl sama pihak CSR juga gak mau”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan Bapak Mariadi memberikan keterangan bahwa Pemerintah Desa Trepan yang dipimpin Bapak Djuwoto belum bisa mengontrol atau mengkordinasikan para aktor yang terlibat untuk saling berkomunikasi dan mengkonsep pengelolaan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Sehingga, para aktor yang terlibat bertindak masing-masing sesuai pembagian peran saat ada pertemuan di Balai Desa Trepan. Kurangnya kordinasi para aktor yang terlibat dan tidak ada aturan yang jelas menjadikan para pemangku kepentingan yang terlibat bertindak masing-masing.

Merujuk teori Ansell & Gash (2007), sebagai bentuk membangun komitmen bersama diperlukan dorongan tingkat kepercayaan awal yang ditunjukkan agar membuat para aktor yang terlibat untuk saling berkomitmen bersama. Pada proses yang dijalankan para aktor menunjukkan sikap saling kebergantungan yang dimiliki sesuai dengan kesepakatan negosiasi pada pertemuan bersama di kantor Balai Desa Trepan. Pembagian peran yang ditunjukkan ada sikap saling membantu apa yang menjadi keterbatasan yang dimiliki dari masing-masing aktor. Akan tetapi, pada proses kolaborasi komitmen bisa saja tidak terjadi bila tingkat kepercayaan di awal digagalkan dengan proses keberlanjutan yang tidak patuh pada keputusan musyawarah dan tanggung jawab yang telah dibuat. Pernyataan dari Ansell & Gash pada tata kelola kolaborasi dapat ditransformasikan dengan membangun komitmen diperlukan tingkat kepercayaan secara keberlanjutan pada proses pelaksanaan yang dikerjakan tanpa hanya melihat pada tingkat kepercayaan awal pada pertemuan bersama untuk saling bernegosiasi sebagai bentuk keseimbangan membangun komitmen agar tidak terjadinya ketidakseimbangan pada proses kolaborasi.

Meskipun menunjukkan saling kebergantungan dengan berbagi peran, bila tidak ada dialog secara intens untuk mengetahui tantangan dan hambatan pada proses kolaborasi akan rentan terjadinya tidak adanya transparansi dalam

berkomitmen. Seperti halnya ditunjukkan sikap Kepala Desa Trepan Bapak Djuwoto yang belum bisa mengkordinir dan memotivasi awal untuk tingkat berpartisipasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan keberlanjutan pada proses kolaborasi. Padahal dalam hal *collaborative governance* peranan kepemimpinan fasilitatif dalam teori Ansell & Gash (2007), sangat penting untuk menetapkan, mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama.

Kurangnya kordinasi, tidak ada pertemuan bersama secara berkala dengan pemangku kepentingan yang terlibat menjadikan sulit untuk melakukan kesepahaman bersama ditengah komitmen yang dijalankan pada pengelolaan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal tersebut yang menjadikan polemik tidak ada transparansi dan akuntabel karena pola struktur beserta konsep pada pengelolaan desa wisata Kampug Pisang Trepan belum memiliki aturam dasar yang jelas untuk dipatuhi. Kurangnya inisiatif Bapak Djuwoto sebagai Kepala Desa untuk saling berkordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat menjadikan sulit tercapai bila masalah yang dihadapi pada proses yang dijalankan tidak ada ruang bersama untuk saling komunikasi dan melakukan kesepahaman bersama untuk mengetahui tantangan dan hambatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kordinasi yang baik dan belum memiliki aturan dasar yang jelas dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan, maka kerja sama yang dilakukan belum menunjukkan *collaborative governance* meskipun para pemangku kepentingan menunjukkan saling kebergantungan dengan berbagi peran yang dijalankan. Selain itu, kurangnya kordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat menjadikan kerja sama yang dilakukan belum memiliki kesepahaman bersama untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam melakukan kerja sama.

4. Prestasi Kelompok UMKM Desa Trepan Sebagai Keberhasilan Proses

Hubungan kerja sama yang melibatkan para stakeholder baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat pasti mengharapakan hasil sementara yang diperoleh pada proses kolaborasi, meskipun proses yang dijalankan belum begitu baik. Hasil sementara yang dihasilkan dengan menjalin kolaborasi dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan ialah prestasi yang diraih

para pelaku UMKM Desa Trepan yang menjadi binaan CSR Petrokimia Gresik melalui pelatihan pemberdayaan. Selain itu, hasil sementara yang diperoleh juga masyarakat sekitar lebih mengenal Desa Trepan dengan adanya dorongan bantuan fasilitas CSR Petrokimia Gresik terkait desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mas Amin selaku Ketua POKDARWIS Trepan Agritage sebagai berikut:

“Dampak sementara yang dihasilkan saat ini yakni masyarakat sekitar di desa lain lebih mengenal Desa Trepan menjadi desa kampung pisang. Pelatihan pemberdayaan yang diberikan CSR mendapat hasil positif dari para kelompok pelaku UMKM dengan kegiatan event lomba yang mereka ikuti mendapatkan prestasi seperti Ibane Craft dan Sahitya, sehingga itu menjadi kebanggaan dari pihak petro karena mereka berhasil menaikkan citra perusahaan melalui binaan dari mereka. Selain itu, pengaruhnya kalau ada rombongan wisatawan yang masuk ya saya tarif 2 juta untuk belajar disini(Wawancara dengan Amin, 7 Desember 2023)

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, dampak sementara terkait pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan memiliki pengaruh untuk membangun hubungan kerja sama keberlanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Mas Amin selaku Ketua POKDARWIS bahwa adanya prestasi dari kelompok pelaku UMKM Desa Trepan yang mengikuti event lomba yang mendapatkan juara menjadi kebanggaan bagi CSR Petrokimia Gresik dan Pemerintah Desa Trepan.

Gambar 15 Juara 1 Festival Inovasi Pemuda Nahdlatul Ulama



Sumber : Mas Amin

Gambar 16 Piagam Penghargaan Ibana Craft



Sumber :Mas Amin

Hasil sementara tersebut juga disampaikan langsung oleh Bapak Asikin terkait dampak sementara yang dihasilkan dalam hubungan kerja sama yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

“Kalau dari penilain saya sendiri mas, terkait dampak sementara ya nggak banyak untuk semua kalangan masyarakat, masih ada kekurangannya lah. Tapi masih ada yang dihasilkan saat ini ya seperti Desa Trepan menjadi percontohan desa desa yang lain dalam pengembangan desa wisata seperti wisata Bulaga di Desa Puncakwangi. Kalau Desa Trepan lebih dikenal dengan sebutan Kampung Pisang Trepan, ditambah para kelompok UMKM seperti Ibana Craft yang dipegang Mas Amin pernah mendapat juara di tingkat Provinsi untuk UMKM Sahitya dikelola Mbak Widya dapat juara di tingkat Kabupaten Lamongan”. (Wawancara dengan Asikin, 6 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan Pak Asikin beliau memberikan keterangan terkait dampak sementara yang diperoleh dalam berkolaborasi mengembangkan potensi desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Indah selaku pelaku kelompok UMKM Kennes Cake diantaranya sebagai berikut:

“Dampak sementara nopo ya mas, ya paling adanya keterlibatan dari pemerintah desa, CSR, dan GAPOKTAN dapat membantu

mengenal Desa Trepan menjadi desa wisata Kampung Pisang Trepan. Pokok sudah punya peran masing-masing seperti GAPOKTAN bisa membuat pupuk kompos. Apalagi saya juga pernah mendapat tamu wisatawan dari Yogya, ada yang dari Malang dan anak-anak sekolah saat berkunjung. Produk-produk UMKM dapat dikemas dengan baik dan dijual di online shop tergantung UMKM masing-masing mas ada yang perbulan dapat 3 juta- 4 juta itu juga gak nentu". (Wawancara dengan Indah,

Dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Indah dan Bapak Asikin, bahwa adanya kolaborasi kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan masih memiliki dampak sementara yang dihasilkan. Meskipun pada proses kolaborasi yang dijalankan masih ditemukan terkait lemahnya kepercayaan, belum saling komitmen, dan kesepahaman bersama.

Adanya kerja sama yang dilakukan juga membantu Desa Trepan menjadi lebih dikenal dan menjadi contoh untuk desa-desa yang lain dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Selain itu, kerja sama yang dilakukan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Desa Trepan serta kemandirian GAPOKTAN dapat menciptakan pupuk kompos secara mandiri dengan adanya pelatihan pemberdayaan yang dilakukan dalam hubungan kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan dan observasi yang peneliti amati, maka dapat disimpulkan dampak sementara ialah Desa Trepan lebih dikenal oleh masyarakat yang lain dengan adanya desa wisata Kampung Pisang Trepan. Pembinaan yang diberikan CSR kepada kelompok pelaku UMKM Desa Trepan dan bantuan alat yang diberikan pemerintah desa dapat menjadi modal prestasi bagi kelompok UMKM Desa Trepan untuk mengembangkan kewirausahaan. Feedback yang di dapat dari prestasi yang diperoleh kelompok UMKM Desa Trepan ialah citra perusahaan Petrokimia Gresik yang semakin baik karena kelompok UMKM Desa Trepan masih binaan dari CSR Petrokimia Gresik.

Adanya pembinaan yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik, potensi desa wisata dapat terus dikembangkan dengan dukungan fasilitas yang diberikan. Selain itu, Pemerintah Desa Trepan juga semakin maju dengan peningkatan kualitas para kelompok tani yang bisa mengelola membuat pupuk kompos secara mandiri dan produk-produk UMKM Desa

Trepan yang dapat dikenal dengan penjualan melalui online shop dengan rata-rata hasil rate penjualan perbulan menghasilkan Rp.3.000.000 sampai Rp4.000.000 tergantung kelompok UMKM yang dihasilkan. Hal tersebut juga berkat dorongan dari pihak CSR Petrokimia Gresik yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Desa Trepan mendorong pelatihan pemberdayaan masyarakat desa dengan program desa wisata kampung pisang.

Berikut peneliti juga lampirkan data dari masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi dan hasil sementara yang di dapat dalam proses pengelolaan pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Sementara Kolaborasi Program Kampung Pisang Trepan

NO	INSTANSI	Bentuk Pelaksanaan Kolaborasi	Hasil Sementara
1	Pemerintah Desa Trepan	1. Pemberian alat / Mesin Penunjang Pelaku UMKM Rp.20.000.000	1. Pelaku UMKM dapat memproduksi makanan Kampung Pisang Trepan
2	CSR Petrokimia Gresik	1. Pembinaan masyarakat pemanfaatan pohon pisang 2. Fasilitas Penunjang Desa Wisata (Denah, Gazebo, Rumah Kompos) 3. Pelatihan pembuatan kompos	1. Prestasi UMKM Desa Trepan 2. Membantu wisatawan dan kelompok tani 3. GAPOKTAN dapat memproduksi kompos

3	POKDARWIS Trepan Agritage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Branding desa wisata melalui media sosial 2. Pengelola desa wisata Kampung Pisang Trepan 3. Branding Produk Umkm Desa Trepan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisatawan berkunjung ke desa/ Rp.2.000.000/ per rombongan 2. Belum cukup baik dalam mengelola 3. Membantu pemasaran UMKM Desa Trepan
4	GAPOKTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman Pohon Pisang 2. Penanaman tumbuhan multikultura (Tanaman Bawang) 3. Membuat pupuk kompos dan pemasaran penjualan pupuk kompos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penanaman banyaknya pohon pisang 2. Petani memiliki panen lain selain padi 3. Membuat pupuk kompos secara mandiri dan diperjualkan
5.	Pelaku UMKM Desa Trepan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pohon pisang menjadi produk Kampung Pisang Trepan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memberikan pengaruh (Hasil yang diperoleh tidak ada laporan)

Sumber: Data diolah oleh peneliti melalui hasil wawancara

BAB V
DAMPAK POLEMIC KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA KAMPUNG PISANG

Hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Trepan dengan pihak CSR Petrokimia Gresik mendorong adanya hasil yang ingin diraih atau dampak dari masing-masing pihak terkait proses kerja sama yang dilakukan. Dampak sendiri memiliki makna sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan yang dikerjakan pada setiap keputusan yang diambil dan memiliki pengaruh atau akibat baik dari sisi positif maupun negatif (Nurhajati, 2018). Dengan adanya polemik kerja sama antara Pemerintah Desa Trepan dan keterlibatan masing-masing aktor, para pemangku kepentingan masih belum adanya keterbukaan transparansi dan strategi. Hal ini berdampak pada hasil positif dan negatif yang dicapai dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Polemik antara Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik serta POKDARWIS Desa Trepan membuat hasil yang dikerjakan tidak maksimal dan berdampak buruk pada proses pengembangan desa wisata karena tidak adanya desain kelembagaan yang mengatur secara jelas dan hanya berdasarkan komitmen. Selain itu, dampak dari masalah yang ada berpengaruh kepada masyarakat Desa Trepan karena belum bisa dirasakan semua masyarakat secara langsung adanya manfaat melakukan kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait dampak polemik kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan dan temuan-temuan peneliti terkait dampak masalah yang ada. Hal ini diuraikan oleh peneliti sebagai berikut :

A. Dampak Politik Bagi Masyarakat Desa Trepan

1. Kebijakan Pemerintah Desa Yang Demokratis

Kerja sama yang melibatkan para stakeholder baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Desa Trepan. Dampak politik yang dihasilkan dengan adanya kerja sama dari sisi positif ialah membuka ruang demokratis dalam setiap keputusan yang diambil. Kebijakan dan keputusan yang dibuat Pemerintah Desa Trepan dalam hubungan kerja sama pada setiap

proses aktor yang terlibat memiliki hak pada setiap pengambilan keputusan bersama tanpa adanya keputusan sepihak dari pemerintah dalam memerintah. Hal ini dapat dilihat dengan diadakannya musyawarah pertemuan yang melibatkan aktor yang berkepentingan pada setiap proses seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Pemerintah lebih terbuka dengan masyarakat dan setiap keputusan yang diambil kelompok masyarakat yang terlibat memiliki peranan pada setiap keputusan. Hal ini disampaikan langsung oleh Mas Bagas selaku Ketua Karang Taruna sebagai berikut:

“Dampak positifnya dengan adanya kerja sama pemerintah juga lebih dekat dengan masalah warga yang dihadapi. Setiap pengambilan keputusan selalu dilibatkan dengan adanya Karang Taruna, GAPOKTAN, LSM. kerja sama ini ya sifatnya memberikan pengaruh lah untuk warga terkait pengadaan desa wisata fan, apalagi CSR memberikan bantuan dari sisi pemberdayaan pelatihan-pelatihan”. (Wawancara dengan Bagas 8 Maret 2024).

Hasil wawancara dengan Mas Bagas selaku Ketua Karang Taruna Desa Trepan. Beliau menyampaikan sisi positif yang dihasilkan adanya kerja sama ini ialah pemerintah dapat dekat dengan keterlibatan masalah warga, sehingga pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu bermusyawarah pada setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya, dampak positif yang sama juga mendorong pemerintah desa untuk keberlanjutan kerja sama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi keterbatasan pemerintah desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Djuwoto:

“Dampaknya jelas ada, dari sisi politiknya pemerintah desa bisa menjalankan program dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah, melalui kerja sama akan memudahkan instansi pemerintahan desa secara terbuka untuk mensejahterakan kepentingan warga. Terutama kita harus saling menjaga hubungan baik sama pihak CSR untuk keberlanjutan kerja sama”. (Wawancara dengan Djuwoto, 4 Desember 2023)

Menurut keterangan Bapak Djuwoto, dengan adanya kerja sama memberikan respon positif yang dapat memudahkan pemerintah desa mengatur masyarakat dan kesejahteraan Desa Trepan dengan sistem pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan Pemerintah Desa Trepan yang melibatkan kerja sama dengan para stakeholder mendorong masyarakat juga untuk turut mengawasi adanya program desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Dampak yang diperoleh dari adanya polemik pada proses kerja sama yang dilakukan para stakeholder masih memiliki dampak positif yang dihasilkan dengan berkolaborasi mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

2. Stigma Negatif Warga Adanya Politik Kepentingan

Dibalik dampak positif yang dihasilkan, ada juga dampak negatif yang diperoleh pada polemik pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Dampak negatif yang diperoleh ialah stigma negatif warga terkait politik kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan kerja sama mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Mustaqim sebagai berikut:

“Ono desa wisata sing ngerasakne ya nduwuran tak sing ngelakoni kerjo karo pihak CSR. Udh pasti politik kepentingan, lah hasilnya keseluruhan juga mana. Saya tahu ada wisatawan rombongan masuk ke desa, terus diarahkan ke rumah e Amin juga masyarakat gak diberikan arahan atau gimana, lah jelas yang menikmati yang kerja sama dengan CSR kayak Amin itu yang jadi ketua POKDARWIS”. (Wawancara dengan Mustaqim, 16 Februari 2024)

Kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan secara dampak yang dihasilkan belum keseluruhan dirasakan warga desa. Justru adanya keterlibatan kerja sama dari para stakeholder hanya dapat dirasakan oleh aktor-aktor yang berkepentingan dengan keuntungan yang diraih. Seperti halnya Mas Amin, selaku ketua kelompok sadar wisata yang dapat kunjungan wisatawan dari luar tapi masyarakat tidak diberikan arahan menyambut wisatawan dan menganggap keuntungan yang diperoleh hanya kepada Mas Amin selaku ketua POKDARWIS Kampung Pisang Trepan dengan masuknya wisatawan. Selain itu, stigma negatif warga juga ditujukan kepada Mas Amin selaku ketua kelompok sadar wisata dan pelaku UMKM yang tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Trepan dan bantuan-bantuan yang diberikan CSR Petrokimia dan pemerintah desa yang hanya dapat dikelola oleh ketua regu kelompok.

“Mas Amin gak pernah ngadain sosialisasi memberikan pemahaman kepada warga terkait desa wisata kampung pisang, cuma masyarakat udah tau sendiri kalau Desa Trepan dijadikan desa wisata. Dulu memang pernah ada Mas Amin ngajak pemuda latihan dirumahnya buat kerajinan dari limbah pohon pisang, tapi sekarang udah gak pernah pemudanya sekarang banyak yang ngerantau. Saya juga ngerti kadang wisatawan langsung ke rumah

Mas Amin gak tau dari mana belajar kerajinan”. (Wawancara dengan Murni, 19 Februari 2024)

Selanjutnya, stigma negatif juga diketahui oleh Bapak Mariadi selaku bagian dari kelompok tani yang terlibat kerja sama. Beliau mendapatkan informasi dari warga terkait alat produksi yang hanya dipegang oleh Ibu Indah dan disimpan di rumahnya.

“Saya tahu respon negatif dari warga, karena ada omongan. Kek Mbak Indah yang menjadi ketua regu kelompok UMKM. Alat bantuan yang ada di rumahnya Mbak Indah mau dipinjem warga itu gak boleh dan itu yang menjadi kekecewaan warga. Padahal kan kalau alat itu bisa dimanfaatkan orang banyak untuk belajar kan berguna, tapi ya gitu alatnya dirumahnya Mbak Indah”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Adanya bantuan alat produksi yang diberikan pemerintah desa hanya dikelola oleh Ibu Indah selaku ketua regu kelompok UMKM dan digunakan secara pribadi. Selain itu, alat-alat bahan produksi juga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain yang juga ingin belajar membuat makanan dari buah pisang. Hal ini diperkuat informasi dari Bapak Asikin dengan adanya sikap stigma negatif warga terkait dugaan politik kepentingan pada polemik pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

“Program yang dijalankan belum jelas mas, masih acak-acakan lah dampak yang dihasilkan malah belum bisa dirasakan semua masyarakat. Mas Amin selaku POKDARWIS ya gak pernah laporan pemerintah, kelompok UMKM ditanyai pemerintah desa terkait produk yang dihasilkan selalu bilangya rugi ae, kalau rugi kok kenapa masih produksi, mestinya kan disampaikan ke pemerintah desa ada kendala seperti ini-ini seperti itu disampaikan bersama”. (Wawancara dengan Asikin, 4 Desember 2023)

Sikap stigma negatif warga terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan juga karena program yang dijalankan belum memiliki kejelasan arah sehingga aktor-aktor yang terlibat bertindak masing-masing yang menjadikan politik kepentingan masing-masing aktor yang mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada di Desa Trepan dengan adanya tanggung jawab bersama mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Maka dapat disimpulkan dampak politik pada polemik kerja sama desa wisata Kampung Pisang Trepan memiliki pengaruh sisi positif dan sisi negatif pada

proses kerja sama yang dilakukan. Sisi positifnya ialah kebijakan pemerintah dalam mendukung desa wisata memberikan ruang bagi masyarakat untuk banyak terlibat dan peran yang diberikan untuk mengatur Desa Trepan menjadi lebih baik dengan keterlibatan semua pihak yang menjadikan pemerintah desa lebih demokratis. Sedangkan dampak negatif adanya polemik kerja sama ialah dengan mendapat stigma negatif warga terkait politik kepentingan karena program yang dijalankan belum jelas dan berpengaruh pada aktor-aktor yang menjalin kerja sama mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan tanggung jawab dan kepentingan masyarakat yang lain.

B. Dampak Sosial Bagi Masyarakat Desa Trepan

1. Meningkatkan Sumber Daya Pengetahuan Masyarakat Desa Trepan

Sebelum adanya kerja sama yang dilakukan para stakeholder, masyarakat Desa Trepan masih memiliki keterbatasan memanfaatkan tanaman pohon pisang untuk dikelola dan dijadikan menjadi sumber penghasilan tambahan. Salah satu dampak positif yang dihasilkan adanya kerja sama ialah meningkatkan sumber daya pengetahuan warga Desa Trepan dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada di Desa Trepan melalui pohon pisang. Meskipun kerja sama pada proses yang dilakukan ada polemik, namun sisi positif yang dihasilkan dengan adanya kerja sama berpengaruh pada lingkungan sosial masyarakat Desa Trepan dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal ini disampaikan Bapak Shokib sebagai warga Desa Trepan yang menganggap kerja sama pemerintah desa dengan pihak CSR Petrokimia yang melibatkan para kelompok tani secara sosial masih memberikan pengaruh.

“Dampak positifnya kalau saya pribadi secara sosialnya ya warga desa sekarang lebih banyak tanam pohon pisang di lahan-lahan sebagian yang ada di persawahan mas, ya karena juga mencontoh dari Pak Mariadi selaku ketua kelompok tani dengan melihat hasil yang diperoleh. Sebagian masyarakat sekarang juga bisa mengelola buah pisang menjadi beberapa macam makanan seperti keripik, bolu atau roti, semprong dan kerajinan tangan lainnya seperti aksesoris kopyah, tas, celengan yang dikelola Mas Amin dan sebagian warga mencari limbah pelepah pisang dan disetorkan ke Mas Amin”. (Wawancara dengan Shokib, 20 Februari 2024)

Sumber daya pengetahuan warga Desa Trepan yang terbatas dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa, mempengaruhi secara sosial kebiasaan masyarakat Desa Trepan yang mayoritas pekerjaannya sebagai

petani dengan menanam padi, kini masyarakat sama-sama menanam pohon pisang di sebagian lahan masyarakat dengan mencontoh apa yang dilakukan Bapak Mariadi. Selain itu, banyaknya pohon pisang yang ada di Desa Trepan kini dapat dikelola menjadi beberapa macam makanan dan aksesoris seperti yang disampaikan Bapak Shokib.

Gambar 17 Aktivitas Warga Mencari Pelepah Pisang



Sumber : Mas Amin

Dampak sosial lain yang positif dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan juga di dapat pada para petani yang dapat membuat pupuk kompos secara mandiri yang diberikan pelatihan pemberdayaan oleh pihak CSR Petrokimia Gresik. Dampak sosial tersebut memberikan pengaruh pada kualitas sumber daya pengetahuan bagi para petani Desa Trepan dengan adanya kerja sama pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Hal ini seperti disampaikan Ibu Murni sebagai berikut:

“Kalau manfaatnya terkait pengembangan desa wisata yang dibantu pihak CSR Petro ya dampak secara sosial bisa seperti petani disini bisa memanfaatkan membuat pupuk kompos secara mandiri, kadang juga warga sini mencari pelepah pohon pisang untuk dikelola oleh Mas Amin. Apalagi yang saya tahu POKDARWIS membeli kotoran-kotoran para peternak juga untuk dikelola di rumah kompos juga dan dijadikan pupuk kompos untuk dijual lagi di luaran sana”. (Wawancara dengan Murni, 19 Februari 2024)

Hasil wawancara dengan Ibu Murni memberikan keterangan bahwa dampak sosial yang diperoleh dari adanya kerja sama Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik untuk mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan berpengaruh pada SDM para petani yang bisa membuat pupuk kompos

secara mandiri serta mencari pelepah pisang untuk dikelola dan dijual kepada Mas Amin yang kemudian oleh Mas Amin diolah kembali untuk dijadikan menjadi kerajinan tangan dari pelepah pohon pisang. Selain itu, dampak sosial lain yang dapat dirasakan dari sebagian warga ada pada penciri khas desa wisata Kampung Pisang Trepan bagi wisatawan dengan kearifan lokal serta kekayaan alam yang dimiliki Desa Trepan. Hal tersebut untuk menjaga kelestarian alam dan warisan budaya yang memiliki keunikan dan keaslian bagi masyarakat Desa Trepan dengan upaya keterlibatan masyarakat yang sekarang telah banyak menanam pohon pisang.

“Secara sosial memang warga Desa Trepan sekarang lebih bisa memanfaatkan potensi desa meskipun belum secara keseluruhan, namun warga sekarang telah banyak melestarikan memanfaatkan kekayaan alam dengan ikut menanam pohon pisang, ada yang mengelola, mencari pelepah pisang, menanam pohon pisang serta kesadaran desa wisata, dan Desa Trepan juga punya adat istiadat seni reog miliknya Cak Puri yang bisa dikembangkan untuk mendukung desa wisata kampung pisang”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariadi juga memberikan keterangan demikian, bahwa dampak sosial yang dihasilkan dari sisi positif berpengaruh pada sumber daya pengetahuan memanfaatkan potensi desa dengan menjaga kelestarian alam serta aktivitas warga memanfaatkan pohon pisang menjadi sumber penghasilan.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, adanya polemik kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan masih memiliki dampak positif secara sosial bagi masyarakat Desa Trepan meskipun belum secara keseluruhan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Trepan. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Trepan dengan kerja sama yang dilakukan dengan pihak CSR Petrokimia Gresik dapat berpengaruh pada dampak sosial yang dihasilkan dengan adanya pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

2. Ketimpangan Sumber Pendapatan Dan Masalah Tenaga Kerja

Dampak sosial pada jalinan kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan memang memiliki sisi positif yang dihasilkan dengan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Desa Trepan. Baik dari warga desa, para petani, serta pemuda-pemuda Desa Trepan yang mempunyai pemahaman serta kualitas sumber daya pengetahuan terkait adanya potensi desa

untuk dimanfaatkan menjadi desa wisata. Dampak sosial yang dihasilkan juga memiliki sisi negatif dengan adanya ketimpangan sumber pendapatan yang diperoleh warga dan masalah tenaga kerja yang dihasilkan dengan adanya polemik kerja sama tanpa adanya aturan secara jelas. Hal ini disampaikan Bapak Mustaqim sebagai berikut:

“Hasil pendapatan adanya desa wisata ini lho timpang pan, gak sesuai terkait pembagian hasil dan masih belum jelas. Warga yang membantu mencari pelepah pisang itu juga paling beberapa, malah yang deket sama CSR yang mendapat keuntungan lebih banyak yang dikelola secara pribadi seperti pelaku UMKM. Kan ya pasti ada kecemburuan sosial warga lah masyarakat masih kurang diberikan arahan keterlibatan yang lebih jelas terkait pembagian peran dan hasil dari masuknya wisatawan juga mana gak ada informasi apapun. Kalau memperkerjakan orang juga orang yang sekiranya deket dengan orang yang megelola desa wisata”. (Wawancara dengan Mustaqim 16 Februari 2024)

Setelah berbicara dengan Bapak Mustaqim, beliau memberikan keterangan bahwa adanya desa wisata masih belum ada terkait pembagian hasil dengan masyarakat desa serta aturan yang jelas. Hal ini berpengaruh ada kecemburuan sosial bagi warga karena keuntungan yang di dapat lebih banyak diperoleh para pelaku UMKM Desa Trepan yang mengelola dan memproduksi. Penghasilan yang di dapat warga juga bila ada para kelompok UMKM yang mendapat banyak orderan baru membutuhkan tenaga kerja untuk diperkerjakan. Selain itu, perolehan masuknya wisatawan juga masih belum ada transparansi dari POKDARWIS yang mengelola desa wisata.

Dampak polemik kerja sama yang dihasilkan juga berpengaruh pada hasil pendapatan yang tidak stabil dalam mempekerjakan warga untuk membuat pupuk kompos. Hal ini karena masih minimnya terkait segi pemasaran yan belum dimiliki kelompok tani sehingga masyarakat yang bekerja tidak selalu terjamin untuk dapat dipekerjakan.

“Dampak negatif e ya gini, masih rugi. Masyarakat juga gak banyak bisa diperkerjakan, biasae perhari bisa memperkerjakan 4-5 orang dengan biaya upah 100.000 ribu. Kini ya beda pendapatan antara yang mengelola dengan warga. Masyarakat disini juga yang punya ternak kotorannya juga kita beli perkarung Rp13.000, tapi masyarakat sini minta e masih Rp.15.000, jadi ya susah. Penjualan pupuk tahun lalu juga masih rugi Rp 300.000 jadi sulit untuk dikembangkan”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan Bapak Mariadi memberikan keterangan dampak negatif secara sosial dengan adanya polemik kerja sama ialah terdapat pada ketimpangan sumber pendapatan penghasilan masyarakat yang diperoleh dengan adanya kerugian pupuk kompos yang dibuat. Perbedaan keinginan masyarakat dengan pengelola pupuk kompos terkait jual beli kotoran hewan untuk dikelola menjadi pupuk menjadi penyebab pengelolaan pupuk kompos masih mengalami kesulitan dari segi pemasaran. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat masih menginginkan kotoran hewannya dibeli seharga Rp 15.000/per karung. Sedangkan dari pihak GAPOKTAN hanya mampu menyanggupi pada kisaran Rp 13.000/ per karung. Keinginan masyarakat yang tinggi juga berpengaruh pada kurangnya misi bersama dan ada kecemburuan pada pihak pengelola sehingga masyarakat yang memiliki ternak juga tidak mau memanfaatkan peluang untuk menghasilkan sumber penghasilan yang lebih.

Selain itu, tidak ada aturan secara jelas juga masyarakat merasa hasil yang diperoleh berbeda dengan para pengelola produk UMKM Desa Trepan yang masih mendapatkan banyak keuntungan tapi keuntungan tersebut tidak dimanfaatkan untuk orang banyak. Sehingga hal tersebut terdapat ketimpangan penghasilan yang diperoleh warga, serta tenaga kerja masyarakat Desa Trepan yang belum banyak dilibatkan untuk diperkerjakan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pada masyarakat sosial terkait kecemburuan sosial dengan aktor yang memiliki peran mengelola, tapi masyarakat desa belum banyak bisa untuk diperkerjakan. Hal ini juga seperti yang disampaikan Bapak Shokib dan Ibu Murni sebagai masyarakat Desa Trepan yang juga berkomentar terkait masalah tenaga kerja dan hasil pendapatan yang harus dikelola untuk kepentingan kedepan yang menjadi keperluan masyarakat desa.

“Pendapatan-pendapatan yang diperoleh seharusnya ya harus bisa untuk memutar keuangnya untuk penunjang fasilitas lain, biar masyarakat juga dapat terbantu adanya desa wisata. Masyarakat disini kalau dikasih pekerjaan ya senang, bisa membantu taraf perekonomian yang lain dari segi pendapatan. Lah kalok gak imbang, masyarakat kurang banyak dilibatkan ya keuntungan hanya bisa dirasakan aktor kepentingan yang mengelola, dan pasti dari masyarakat ada kecemburuan sosial dengan masuknya wisatawan ke desa tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa”. (Wawancara dengan Bapak Shokib, 20 Februari 2024)

Hal serupa juga disampaikan Ibu Murni sebagai warga Desa Trepan yang turut memberikan komentarnya sebagai berikut:

“Sumber pendapatan yang dihasilkan gak nentu eh mas nek dilihat sampai saat ini, mestinya pemerintah membuat aturan jelas dalam mengembangkan desa wisata juga harus memperhatikan masyarakat yang lain untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan sampai ada desa wisata kampung pisang tapi tidak bisa membuka lapangan pekerjaan yang lain. Mestinya juga harus diarahkan agar semua masyarakat juga bisa mendukung yang lain dan gak cuman anggota-anggota yang terlibat kerja sama”. (Wawancara Murni, 19 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Shokib dan Ibu Murni, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif secara sosial bagi masyarakat yang dirasakan ialah kurangnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Keuntungan yang dihasilkan para pelaku UMKM dan kelompok sadar wisata yang kurang melibatkan masyarakat desa menjadikan kecemburuan sosial warga dengan pihak pengelola yang lebih banyak diuntungkan dengan keanggotaan yang terlibat kerja sama. Sehingga diperlukan aturan yang jelas dan perhatian bersama untuk membuka lapangan pekerjaan yang lain untuk bisa terlibat pada pengelolaan pengembangan desa wisata kampung pisang.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara oleh peneliti, kerja sama yang dilakukan para stakeholder dengan adanya polemik yang ditimbulkan berpengaruh pada dampak yang dihasilkan dengan adanya nilai positif dan negatif pada pelaksanaan proses kolaborasi yang dilakukan. Hal ini bila merujuk pada teori Anell & Gash (2007), bahwa kolaborasi memiliki tiga tahapan proses pada penentuan permasalahan, penentuan tujuan, dan pelaksanaan. Meskipun pada kolaborasi yang dikerjakan bersifat kebergantungan dengan mengacu pada komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami dan hasil sementara yang diperoleh, pada pelaksanaannya kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik dalam menjalin kerja sama masih belum adanya komunikasi dialog tatap muka secara intens yang dilakukan dengan masyarakat Desa Trepan. Sehingga kurangnya keterlibatan masyarakat Desa Trepan dan hanya bergantung pada local hero yang mewakili pemangku kepentingan berpengaruh pada dampak hasil yang diperoleh untuk tujuan bersama yang ingin diraih. Ansell & Gash (2007) juga menjelaskan bahwa hasil sementara

yang diperoleh juga akan terciptanya membangun momentum suatu kolaborasi dan kepercayaan dengan pemangku kepentingan yang lain.

Adanya polemik kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan memiliki nilai negatif bagi warga, akan tetapi hasil yang ditunjukkan dengan masih adanya pengaruh positif warga Desa Trepan menunjukkan *collaborative governance* dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Trepan. Meskipun secara pelaksanaannya proses kolaborasi yang dilakukan ditemukan polemik dari masing masing aktor pemangku kepentingan. Peneliti menganalisa bahwa dampak adanya polemik kerja sama yang dilakukan akan mendorong para pemangku kepentingan untuk memecahkan permasalahan bersama dan menghasilkan komitmen yang baik dengan keterlibatan masyarakat Desa Trepan. Kerja sama yang masih ditemukan adanya polemik harus ada pertemuan bersama secara intensif dan menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat keadaan di lapangan pada saat menjalankan program pelaksanaan yang diberikan.

C. Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Trepan

1. Membuka Lapangan Pekerjaan Warga & Keuntungan Kelompok UMKM

Dinamika kerja sama antara pihak Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik yang melibatkan kelompok sosial masyarakat ditengah polemik tidak ada transparansi dan akuntabel, masih memiliki dampak ekonomi yang dihasilkan. Seperti halnya kelompok pelaku UMKM Desa Trepan yang dapat menghasilkan produk-produk dan diperjualkan dengan sumber penghasilan perbulan berkisar Rp 3.500,000- 4.000,000 dengan penjualan produk kelompok UMKM yang berbeda-beda. Selain itu, kelompok UMKM juga biasa dapat membantu memperkerjakan warga desa atau tetangga terdekat bila membutuhkan tenaga kerja saat mendapatkan banyaknya orderan yang masuk. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Rina sebagai berikut

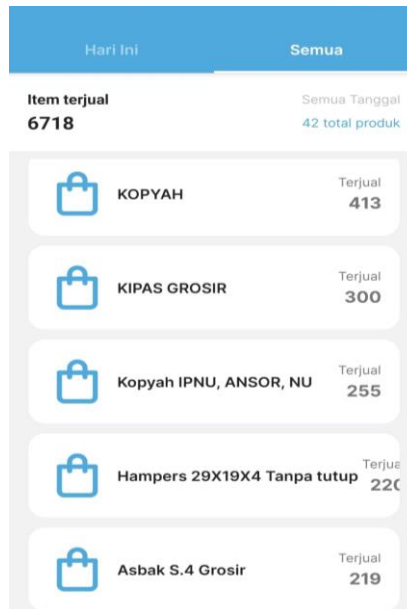
“Terkait dari segi ekonomi membantu sih mas, ya masih bisa dikatakan ada penghasilan lah perbulan Rp 3.500,000- 4.000,000 setiap produksi, kalau dari UMKM lain saya kurang tau. Bahkan kalau biasanya banyak orderan ya kadang ngajak tetangga gitu diperkerjakan per hari kadang Rp 50.000- 100.000 tergantung kebutuhan juga”. (Wawancara dengan Rina, 11 Desember 2023)






Kerja sama yang dihasilkan menurut penuturan dari Ibu Murni selaku kelompok UMKM Sambel Manoora masih memiliki dampak ekonomi dengan rate pemasukan Rp 3.500,000- 4.000,000 setiap bulannya. Beliau juga menuturkan adanya UMKM ini juga dapat membantu mempekerjakan tetangga yang berdekatan dengan biaya uang kerja per/hari Rp 50.000- 100.000 tergantung banyaknya orderan yang diperoleh. Dampak ekonomi bagi masyarakat Desa Trepan memang belum sepenuhnya diperoleh dan dirasakan oleh orang banyak, namun adanya pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan juga dapat membantu kelompok masyarakat yang mengembangkan UMKM produk Kampung Pisang Trepan. Selain itu kelompok sosial masyarakat yang mendapat binaan dari CSR Petrokimia Gresik juga berpengaruh pada pendapatan memberikan pengajaran kepada anak-anak di sekolah, seperti halnya Mas Amin yang memegang UMKM kerajinan pelepah pisang juga menjadi mentor pelatih untuk anak-anak dengan biaya perjam pelatihan Rp 300.000 sekali pelatihan. Keterbatasan-keterbatasan yang dulunya dimiliki masyarakat Desa Trepan kini dengan adanya kerja sama Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik memiliki pengaruh pada dampak ekonomi kelompok masyarakat yang terlibat kerja sama.

“Dampak ekonomi ada, tapi belum bisa dirasakan masyarakat banyak. Tapi untuk kelompok UMKM yang pasti memiliki dampak sumber penghasilan karena pelatihan pemberdayaan yang diberikan oleh pihak CSR, saya sendiri juga kadang per jamnya dapat Rp 300.000 di undang di sekolah-sekolah untuk mengisi pelatihan-pelatihan kerajinan”. (Wawancara dengan Amin, 7 Desember 2023)

Keuntungan dari kerja sama dalam mengembangkan desa wisata Kampung Pisang Trepan terkait dampak ekonomi membantu memberikan pengalaman dan sumber pendapatan bagi sebagian warga desa yang memanfaatkan potensi desa yang dimiliki. Berbagai macam produk UMKM Desa Trepan yang berjumlah 42 produk juga telah banyak di jual di pasar online shop maupun secara offline. Hasil kerja sama yang dilakukan membantu kelompok sosial masyarakat memperoleh sumber penghasilan dengan pelatihan yang sudah diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik kepada kelompok sosial masyarakat.

Gambar 18 Hasil Penjualan
Produk UMKM Trepan



Item terjual	Semua Tanggal
6718	42 total produk
 KOPYAH	Terjual 413
 KIPAS GROSIR	Terjual 300
 Kopyah IPNU, ANSOR, NU	Terjual 255
 Hampers 29X19X4 Tanpa tutup	Terjual 220
 Asbak S.4 Grosir	Terjual 219

Sumber : Mas Amin

Dampak lain juga dapat dirasakan oleh kelompok tani dan sebagian warga dengan adanya pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Salah satunya ialah kelompok sadar wisata yang mempekerjakan warga untuk pembuatan pupuk kompos. Warga yang diperkerjakan perhari digaji dengan nominal Rp 100.000 untuk pembuatan dan pengelolaan pupuk kompos secara alami dengan mengumpulkan kotoran para peternak yang ada di Desa Trepan untuk dikelola. Hal ini disampaikan langsung berdasarkan wawancara dengan Bapak Mariadi sebagai berikut:

“Dampaknya sekarang ya bisa membuka lapangan pekerjaan, pokdarwis dan poktan bekerja sama mengajak warga untuk diperkerjakan di rumah pupuk kompos perhari kita gaji Rp 100.000. Kotoran hewan yang ada di perternak kita beli perkarung Rp 13.000 meskipun ada juga warga yang meminta Rp 15.000 perkarung”. (Wawancara dengan Mariadi, 8 Desember 2023)

Dampak ekonomi yang dihasilkan dapat membantu sebagian kecil untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga untuk membuat pupuk kompos.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara oleh peneliti, kerja sama yang dilakukan para stakeholder dengan adanya polemik yang ditimbulkan berpengaruh pada dampak yang dihasilkan dengan adanya nilai positif dan negatif pada pelaksanaan proses kolaborasi yang dilakukan. Hal ini bila merujuk pada teori Anell & Gash (2007), bahwa kolaborasi memiliki tiga tahapan proses pada penentuan permasalahan, penentuan tujuan, dan pelaksanaan. Pelaksanaan yang ada dalam memanfaatkan potensi desa dengan adanya hubungan kerja sama yang dilakukan memiliki hasil yang dapat diperoleh, meskipun dampak yang dihasilkan belum dapat dirasakan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, *outcome* dari kerja sama yang dilakukan setidaknya memiliki dampak positif yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat desa. Maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kerja sama Pemerintah Desa Trepan dengan CSR Petrokimia Gresik yang melibatkan kelompok sosial masyarakat masih memberikan dampak positif bagi Desa Trepan meskipun belum maksimal secara keseluruhan.

2. Dampak Kerugian Yang Dihasilkan

Dampak ekonomi yang dihasilkan dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan yang memberikan pengaruh bagi masyarakat Desa Trepan, ternyata juga memiliki beberapa kerugian yang dihasilkan atau dampak negatif adanya polemik pada proses kerja sama yang dilakukan. Dampak negatif yang dialami pada hasilnya beberapa belum mencapai target yang dihasilkan. Salah satunya ialah pembuatan pupuk kompos yang dikelola oleh kelompok tani dan kelompok sadar wisata. Minimnya relasi dan kalah dengan pembuat pupuk kompos dari pabrik masih menjadi kendala yang dihadapi. Pelaksanaan pada tahap pembuatan pupuk kompos yang dikelola pernah mendapatkan kerugian saat tahap uji coba pupuk kompos dengan tahap awal membuat 1 truk. Penjualan yang diperjualkan 1kg berkisar harga Rp 1.100 yang hanya laku 3 ton dengan nilai Rp 3.300,000. Kalahnya pemasaran dan pengalaman yang dimiliki kelompok tani menjadi penyebab kerugian yang dihasilkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Mariadi sebagai berikut:

“Kerugian yang dimiliki ada karena kami masih minim literasi dari segi pembuatan, kalahnya pemasaran dari pihak luar yang belum mencapai target. Dari penjualan kita jual per kilo Rp 1.100 dan laku 3 ton yang berkisar Rp 3.300,000 dan masih mengalami

rugi Rp 300.000”. (Wawancara dengan Mariadi, 6 Desember 2023)

Kerugian-kerugian yang dihadapi menjadi keterbatasan yang dihasilkan, karena dalam proses kerja sama yang dilakukan tidak membahas pemberdayaan produk dan manajemen pemasaran untuk membantu kelompok sadar wisata dan kelompok tani. Seperti yang dialami kelompok tani yang masih mengalami kerugian Rp 300.000 yang belum mencapai target yang dihasilkan. Selain itu, hal serupa juga dialami oleh kelompok pelaku UMKM yang pernah mengalami kerugian yang dimiliki seperti halnya informasi yang disampaikan sebagai berikut:

“Rugi pernah mas, dulu pernah sampai Rp 1.000,000 yang dialami saat memasarkan sambel mas, kan kadang sudah basi gak kepakai ada yang bungkusnya kurang rapat cepet *expired* dan kurang dari segi pemasaran”. (Wawancara dengan Rina, 11 Desember 2023)

“Kalau penghasilan masih ada mas, gak nentu. Kadang untung kadang juga rugi, yang menjadi penyebab kerugian ya faktor kurangnya pemasaran di *offline*”. (Wawancara dengan Indah, 14 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku kelompok UMKM yang menjadi dampak negatif dari segi ekonomi ialah pernah mengalami kerugian dan masalah kurangnya pemasaran produk di pasaran *offline*. Selain itu, kerugian yang dialami juga disebabkan dengan manajemen keuangan dan pemasaran produk yang dimiliki kelompok UMKM Desa Trepan. Kerugian-kerugian yang didapat hanya di bebankan pada kelompok UMKM dan masalah dari minimnya pengalaman dari kelompok sadar wisata. Peneliti tidak melihat dampak kerugian secara keseluruhan kepada masyarakat Desa Trepan karena hasil yang diperoleh kepada masyarakat masih sebagian kecil yang mendapatkan dampak adanya kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

Hal ini bila merujuk pada teori Anell & Gash (2007), bahwa kolaborasi memiliki tiga tahapan proses pada penentuan permasalahan, penentuan tujuan, dan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yang dijalankan dalam proses kerja sama memang memiliki dampak ekonomi bagi warga desa dengan membuka lapangan pekerjaan. Namun secara realita yang ada dalam kerja sama masih memiliki tantangan dan hambatan terkait keterbatasan pada hubungan kerja sama yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerugian yang dimiliki dari kelompok sadar wisata dan kelompok UMKM seharusnya diperlukan keterbukaan dan transparansi

bersama dari pihak pengelola sehingga Pemerintah Desa Trepan juga mengetahui keadaan yang ada di lapangan serta membahas atau memonitoring bersama dengan pihak CSR Petrokimia Gresik yang sudah membantu kelompok sosial masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Peneliti juga belum melihat dari kerugian yang dihasilkan bagi masyarakat terkait dari sisi ekonomi. Keadaan yang ada di lapangan peneliti hanya memperoleh informasi atas kerugian yang pernah dihadapi kelompok UMKM Desa Trepan dan kelompok sadar wisata yang menjadi bagian aktor keterlibatan kerja sama. Kerugian yang dialami juga disebabkan dari pihak pengelola sendiri dengan kurangnya inovatif program dan jaringan pemasaran yang masih sempit yang menyebabkan mengalami kendala pada hasil kerugian yang ditanggung.

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif dari ekonomi yang dihasilkan hanya dialami dari kelompok sosial masyarakat yang mengelola desa wisata Kampung Pisang Trepan. Secara keseluruhan tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat banyak karena dampak positif yang dihasilkan hanya dapat dirasakan sebagian warga yang .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa adanya polemik kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang memiliki dinamika proses yang panjang antara Pemerintah Desa Trepan dan CSR Petrokimia Gresik yang kemudian melibatkan kelompok para kelompok tani dan para pelaku UMKM Desa Trepan. Berikut peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan bab yang sudah dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Dinamika terjalinnya kerja sama dalam pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan dipengaruhi adanya pemangku kepentingan yang saling kebergantungan atas masalah yang dimiliki. Antara lain, masalah dari keterbatasan Pemerintah Desa Trepan kepada warga terkait pemberdayaan. Kedua, tanggung jawab perusahaan Petrokimia Gresik kepada masyarakat desa terkait masalah limbah perusahaan yang masuk di arel warga, yang kemudian menghasilkan pertemuan bersama dengan masyarakat desa dan kemudian menawarkan program Kampung Pisang Trepan sampai pada tahapan negoisasi bersama untuk partisipasi masyarakat tanpa membuat MoU secara tertulis secara jelas.
2. Dampak polemik kerja sama yang dihasilkan masih memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat Desa Trepan, meskipun dampak yang dihasilkan masih ada kekurangan dalam hubungan kerja sama

B. Saran

1. Pemerintah Desa Trepan perlu membuat Mou secara jelas pada pengelolaan desa wisata Kampung Pisang Trepan. Sehingga para aktor kepentingan yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama dan strategi kedepan secara jelas yang dapat menghasilkan komitmen bersama.
2. Para pemangku kepentingan yang terlibat harus ada pertemuan secara intensif untuk kepentingan bersama dalam menjalankan pengelolaan destinasi desa wisata Kampung Pisang Trepan terutama adanya peran Kepala Desa Trepan untuk saling berkordinasi dengan aktor-aktor yang terlibat.
3. Masyarakat harus mendukung dan terlibat untuk mengawasi pada jalannya pengembangan desa wisata Kampung Pisang Trepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 170-171.
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 118.
- Amin. (2023, September Senin). Collaborative Governance: Pengembangan Desa wisata kampung pisang. (R. Amirudin, Interviewer)
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Arifin, S., & Dewi, U. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangdadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. *E-Jurnal Fisip*, 315-332.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, R. S., Rachim, A., & Warsono, H. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Biklen, R. C. (2003). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon.
- Chabibi, M. (2020). Polemik Marketing Politik Antara Image Dan Substansi. *Jurnal Al-Tsiqoh*, 20-21.
- Creswell, J. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research*, 3.
- Fadlurrahman, A. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 7 No.2*, 30.
- Falah, A. I., Febfauzza, R., & Sari, N. K. (2022). Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 80-90.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 200-207.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 355-367.
- Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irhandayaningsih, A. (2019). Strategi Pengembangan Desa Gemawang Sebagai Desa Wisata Eko Budaya. *Journal Undip*, 286.

- Kirana, C. A., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Jakarta: Renika Cipta.
- Kusbiantoro, D. (2021, September Selasa). *Lamongan programkan integrasi wisata untuk tarik wisatawan*. Retrieved from ANTARA JATIM: <https://jatim.antaranews.com/berita/529785/lamongan-programkan-integrasi-wisata-untuk-tarik-wisatawan>
- Martono, T. (2020, Januari Minggu). *Wisata Besar Agro Jadi Kubangan Air*. Retrieved from damarinfo: <https://damarinfo.com/wisata-besur-agro-jadi-kubangan-air/>
- Mawardia, & Asnawi, N. R. (2022). Analisis Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Kerja Sama Dengan Masyarakat Kec.Sanana. *Amanah Ilmu*, 77.
- Moelong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 140-145.
- Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Ganaya*, 136-137.
- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/136/128/2-13>.
- Nursyamsi, M. (2020, Agustus Selasa). *Komitmen CSR Petrokimia Diapresiasi*. Retrieved from Republika: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qeiyt9457/komitmen-csr-petrokimia-diapresiasi>
- Nuryanti, W. (1993). *Desa Wisata dan Lingkungannya*. Jakarta: Gramedia.
- Prafitri, G. R., & Darmayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 77-85.
- Resnawaty, A. J. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 38-44.
- Rhodes, R. A. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Journal Saga*, 654-667.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Penedar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 527-533.
- Saleh, C. (2020). *Modul Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Pustaka Universitas Terbuka.
- Setiawan, A., & Sutikno, C. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 1-10.

- Setiawandari, N. E., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik Vol.14 No,2*, 153.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bappeda Litbang*, 21.
- Sugianto, A. (2016). Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo. *Jurnal Ekuilibrium, Volume 11, Nomor 1*, 57.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixes Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sungkawati, E., Suarniati, N. W., Anugerah, R., & Hermanik, N. D. (2022). Penanaman Pohon Alpukat Sebagai Penciri Desa Bululawang Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 870-873.
- Suprihardjo, F. Z. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits Vol.3 No.2*, 246-249.
- Ukkas, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. *Journal of Islamic : Education Management*, 190.
- Utama, G. B. (2014). *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Vandayani, D. S., & Widiyantara, A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Indonesian Governance Journal*, 58-59.
- Wibowo, L. A. (2008). *Usaha Jasa Pariwisata*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yulian, E. (2021, Desember 13). *Tingkat Pendidikan SDM Masih Mempengaruhi Produktivitas Wilayah*. Retrieved from infobanknews.com: <https://infobanknews.com/tingkat-pendidikan-sdm-masih-pengaruhi-produktivitas-wilayah/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draft pertanyaan penelitian

Draft Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan Kepala Desa Trepan (Periode Lama)

Pertanyaan yang diajukan :

1. Bagaimana awal mula sejarah terjalinnya kerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik ?
2. Apakah dalam menjalin kerja sama ada forum komunikasi atau pertemuan rutin antar stakeholder untuk mendiskusikan pemberdayaan masyarakat dan dalam program pengembangan desa wisata kampung pisang yang semua tertuang dalam program CSR?
3. Bagaimana hubungan bapak/ ibu dengan para stakeholder terdahulu dalam menjalin kerja sama terdahulu?
4. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang saling bertentangan saat terjalinnya kerja sama? Dan dari bapak sendiri apa yang ingin dicapai dan dari pihak swasta sendiri bagaimana
5. Bagaimana proses kerja sama dulu terjalin dengan pihak swasta termasuk dengan PT. Petrokimia Gresik dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang ?
6. Apakah dalam pengembangan desa wisata trepan masyarakat dilibatkan dalam forum ini?
7. Selama menjadi Kepala Pemerintah Desa Trepan apakah bapak/ibu berbuat adil atau tidak terhadap kelompok yang tidak mendukung bapak terdahulu? Ketika yang jadi bapak, apakah ada masyarakat yang menentang terkait hasil putusan maupun respon negati?
8. Adanya keterlibatan dari pihak swasta sendiri dalam memberdayakan masyarakat Desa Trepan dan pengembangan desa wisata kampung pisang, apakah ada faktor ketidakmampuan pemerintah desa atau ada hal yang lain sehingga perlu menggandeng PT.Petrokimia Gresik, Gapoktan, dan para pelaku umkm termasuk POKDARWIS yang dibuat pemerintah desa ?

Pedoman wawancara dengan Pemerintah Desa Trepan & Kepala Desa Trepan

Nama Informan :

Alamat :

Hari/ Tanggal :

Pertanyaan yang diajukan :

1. Dalam pengembangan desa wisata kampung pisang apakah pemerintahan desa membuat forum komunikasi atau pertemuan dengan aktor yang terlibat untuk membuat aturan yang disepakati?
2. Bantuan apa saja dari Pemerintah Desa Trepan terhadap Pokdarwis dan pelaku Umkm dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang? (Buktikan dengan data bila ada)
3. Apa dampak dari Pemerintah Desa Trepan dengan adanya desa wisata kampung pisang yang ada di Desa Trepan ?
4. Selama proses pengembangan desa wisata kampung pisang, apakah ada desain kelembagaan atau aturan yang dibuat terkait pengelolaan desa wisata kampung pisang ?
5. Apakah pemerintah desa sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjalankan program desa wisata?
6. Apa hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Desa Trepan dalam menjalin kerja sama dengan PT.Petrokimia Gresik?
7. Sejauh ini bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dari partisipasi masyarakat Desa Trepan atau keterlibatan dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang?
8. Apa outcome/ dampak dan manfaat sejauh ini bagi pemerintah desa dengan adanya program desa wisata kampung pisang?
9. Apakah ada uang retribusi yang masuk bagi pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang?

10. Sejauh mana pemerintah desa melihat peran Pokdarwis saat ini dan apakah ada keterbukaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang ?
11. Bagaimana peran Pokdarwis sejauh ini dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah?
12. Sejauh mana peran Pokdarwis, Gapoktan, dan para pelaku UMKM dalam pengembangan desa wisata kampung pisang?
13. Sejauh ini apakah ada monitoring secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada aktor yang terlibat dan juga partisipasi masyarakat secara berkala dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang terkait evaluasi atau langkah langkah selanjutnya dalam membedakan dan mengajak minat warga?

Pedoman wawancara dengan POKDARWIS, GAPOKTAN, UMKM TREPAN

Nama Informan :

Alamat :

Hari/ Tanggal :

Pertanyaan yang diajukan :

1. Dalam pengembangan desa wisata kampung pisang Trepan, apakah ada program Pokdarwis Trepan kepada masyarakat Desa Trepan?
2. Bagaimana peran Pokdarwis sebagai aktor yang mengembangkan desa wisata dan mengelola kegiatan pariwisata ?
3. Ada berapa anggota Pokdarwis? (Sebutkan keanggotaannya dan struktur kepengurusannya)
4. Berapa income yang di dapat Pokdarwis saat menerima wisatawan luar dalam memberikan wisata edukasi ? (Apakah ada pembagian hasil terhadap pemerintah, umkm, gapoktan, dsb dalam kesepakatan yang dibuat)
5. Dalam pengembangan desa wisata, apa peran Gapoktan terkait wisata edukasi?

6. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi para petani mau ikut berpartisipasi dengan adanya program csr pengembangan desa wisata dan mau turut mengembangkan desa wisata kampung pisang?
7. Dalam mengembangkan desa wisata kampung pisang, lahan siapa yang digunakan? (Apakah ada kesepakatan hal lain dengan pihak stakeholder dalam penempatan lahan dan apa manfaatnya saat ini)
8. Dalam pengembangan desa wisata kampung pisang, apakah dari petani ada muatan program tersendiri ?
9. Adakah monitoring secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Gapoktan, Pokdarwis, dan UMKM maupun dengan masyarakat secara berkala dalam pengembangan desa wisata kampung pisang?
10. Bagaimana partisipasi dari warga sejauh ini terkait partisipasi dalam mengembangkan desa wisata ?
11. Apakah ada kendala yang dialami dalam menjalin kolaborasi dengan aktor-aktor yang terlibat baik dari pihak swasta dan pemerintah desa?
12. Sejauh ini bagaimana kepercayaan gapoktan terhadap stakeholder lain ?
13. Apa dampak masyarakat dan petani dalam mengembangkan desa wisata edukasi kampung pisang ?
14. Berapa income yang di dapat pelaku Umkm dalam pengelolaan tanaman pisang ?
15. Apakah ada kendala yang dialami oleh para pelaku umkm dalam segi hal pemasaran dan penjualan produk dari kampung pisang trepan ?
16. Apakah ada partisipasi warga turut membantu mensukseskan kegiatan tersebut ?
17. Seberapa aktif partisipasi masyarakat terkait pengelolaan tanaman pisang terhadap pelaku umkm?
18. Berapa income yang di dapat dari pelaku umkm? (Apakah ada pembagian hasil)
19. Bantuan apa saja yang diterima pelaku UMKM dalam mendorong pengembangan desa wisata ?
 - a) Dari instansi pemerintah,siapa/pihak mana saja.....

- b) Dari instansi swasta, siapa/pihak mana saja.....
- c) Dari instansi LSM, siapa/pihak mana saja.....

Pedoman wawancara dengan masyarakat desa

Nama Informan :
Alamat :
Hari/ Tanggal :

1. Apakah dalam pengembangan desa wisata masyarakat disini dilibatkan ?
2. Apakah ada program pemdes maupun pokdarwis terkait mengembangkan desa wisata dengan melibatkan partisipasi warga?
3. Apakah anda juga ikut berpartisipasi dalam program tersebut ?
4. Adanya kampung pisang di desa trepan, apakah membawa dampak perubahan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ?
5. Apakah dari pemerintah desa sendiri memberikan monitoring kepada warga untuk berpartisipasi dalam program desa wisata (termasuk perwakilan lingkup RT)

Pedoman wawancara dengan stakeholder CSR Petrokimia Gresik

Nama Informan :
Alamat :
Hari/ Tanggal :

1. Bagaimana kondisi awal terjalinnya kolaborasi ?, (Mengapa Pemdes hanya sebagai mengetahui saja ? menurut informasi peneliti yang di dapat)
2. Apakah dalam menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa Trepan apa ada kesepakatan Mou yang dibuat dengan pimpinan kepala desa atau dengan kelompok lain (Poktan,UMKM) ? (Apakah ada feedback balik dari stakeholder maupun dari Petrokimia)
3. Dalam menjalin kolaborasi apakah ada komunikasi dua arah secara intens dengan Kepala Desa Trepan?

4. Bagaimana pendapat Ibu terkait sikap dua kepemimpinan Pemerintah Desa terdahulu dan saat ini Pak Djuwoto & Pak Asikin (Terutama sikap insiatif pemimpin untuk jalinan kerja sama membangun pengembangan desa wisata)?
5. Dalam menjalin kerja sama apakah ada konflik ketidaksepahaman baik dari pemdes maupun kelompok tani atau pelaku umkm?
6. Dalam pengembangan desa wisata kampung pisang trepan, sejauh ini apakah ada monitoring yang dibuat pemdes maupun dari stakeholder petro sendiri yang melibatkan semua elemen baik dari Pokdarwis, Kelompok Tani, dan pelaku UMKM?
7. Bantuan apa saja yang diberikan oleh CSR Petrokimia Gresik kepada aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata kampung pisang?
8. Sejauh yang saya ketahui dalam memperoleh informasi program CSR kampung pisang trepan ada hal terkait sewa lahan untuk penanaman pohon pisang, apakah ada kontrak atau sewa lahan kepada masyarakat untuk terkait penanaman pohon pisang? (Bila benar, berapa biaya untuk sewa lahan)
9. Berapa bantuan yang diberikan CSR dalam pembangunan Rumah Kompos?
10. Bantuan yang diberikan CSR Petro terkait pengembangan desa wisata kampung pisang, apa harapan dari stakeholder sendiri terkait program 5 tahunan yang dibuat berakhir, apakah sudah ada kesepakatan lain dengan pihak desa untuk nantinya dapat dikelola oleh pemerintah desa melalui Bumdes atau justru sebaliknya?
11. Terkait rumah kompos, menurut informasi yang saya dapat bahwa rumah kompos dibangun atas kepemilikan tanah pak Mariadi, apakah ada kesepakatan mou yang dibuat baik dari Pak Mariadi sendiri maupun dari Pemdes? (Melihat situasi yang pro-kontra antara pemilik lahan dan pemdes setelah program csr kedepan berakhir, bagaimana nanti statusnya?)

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Djuwoto mantan Kepala Desa Trepan, 4 Desember

2023



Wawancara dengan Bapak Asikin Kepala Desa Trepan, 4 Desember 2023



Wawancara dengan Mas Amin ketua POKDARWIS, 7 Desember 2023



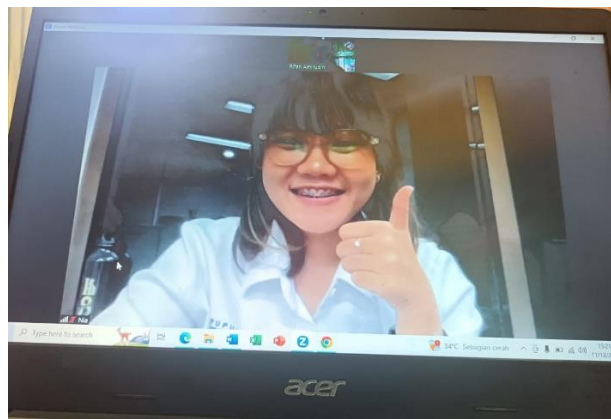
Wawancara dengan Bapak Karmono Kaur Keuangan Desa Trepan, 8 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak Mariadi ketua kelompok tani, 8 Desember 2023



Wawancara dengan perwakilan CSR Petrokimia Gresik, 11 Desember 2023



Wawancara dengan Ibu Rina pelaku UMKM Sambal Manoora, 11 Desember 2023



Wawancara dengan Ibu Indah pelaku UMKM Kennes Cake, 14 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak Mustaqim warga Desa Trepan, 16 Februari 2024



Wawancara dengan Ibu Murni warga Desa Trepan, 19 Februari 2024



Wawancara dengan Bapak Shokib warga Desa Trepan, 20 Februari



Wawancara dengan Bagas ketua Karang Taruna Desa Trepan, 5 Maret 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rif'an Amirudin
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 28 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Protokol Desa Trepan Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan
Email : rifanamirudin2@gmail.com
No. HP : 085855729912



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Trepan : Tahun 2007-2013
2. MTsn Denanyar Jombang : Tahun 2013-2016
3. SMA Raudlatul Muta'allimin Lamongan : Tahun 2016-2019

RIWAYAT ORGANISASI

1. Departemen Kesenian UKM QAI FISIP UIN Walisongo Tahun 2021
2. Departemen BTQ UKM QAI FISIP UIN Walisongo Tahun 2022
3. Anggota Biro Keagamaan PMII Rayon Fisip UIN Walisongo Tahun 2021
4. Anggota HMJ FISIP UIN Walisongo Semarang Tahun 2022